



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMBENTUKAN POLISI RW SEBAGAI IMPLEMENTASI  
POLMAS DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA**

**TESIS**

**I WAYAN GEDE ARDANA**

**No. Mhs: 0906595301**

**PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMBENTUKAN POLISI RW SEBAGAI IMPLEMENTASI  
POLMAS DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**I WAYAN GEDE ARDANA**

**No. Mhs: 0906595301**

**PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA  
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI  
JAKARTA  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : I WAYAN GEDE ARDANA**

**NPM : 0906595301**

**Tanda Tangan : .....**

**Tanggal : 4 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **I WAYAN GEDE ARDANA**  
NPM : **0906595301**  
Program Studi : **Kajian Ilmu Kepolisian**  
Judul Tesis : **PEMBENTUKAN POLISI RW SEBAGAI  
IMPLEMENTASI POLMAS DI KECAMATAN  
KEBAYORAN LAMA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, Msi.

Penguji I : Dr. dr. H. Hadiman, SH. Msc.

Penguji II : Drs. Ronny Lihawa, Msi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 4 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Sang Hyang Widi Wasa atas berkat dan rahmatNya penulis telah berhasil menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam pekerjaan ini membutuhkan ketekunan, keuletan dan usaha yang sungguh-sungguh dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Penulisan ini dimulai dengan penelitian yang dilakukan secara khusus untuk mengkaji tentang Pembentukan Polisi RW sebagai Implementasi Polmas di Kecamatan Kebayoran Lama.

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sejak awal menjadi mahasiswa Kajian Ilmu Kepolisian sampai penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada dosen Pembimbing, Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, yang dengan kerelaan dan sungguh-sungguh serta penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi yang sangat tinggi, serta membekali penulis dengan tambahan ilmu dan buku-buku referensi. Suatu hal yang tidak dapat dilupakan oleh penulis adalah bahwa beliau dengan ketulusannya mengarahkan penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan juga kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Drs. Gatot Eddy Pramono, MSi. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah kerja Polsek Kebayoran Lama. Demikian pula dengan segenap Babinkamtibmas dan anggota Polisi RW dan dan anggota Jajaran Polsek Kebayoran Lama, Camat Kebayoran Lama, para Lurah dan Ketua RW serta seluruh tokoh masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah

dengan senang hati menerima penulis melakukan tugas penelitian dan memberikan berbagai informasi yang diperlukan.

Kepada rekan-rekan mahasiswa dan staf Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan masukannya terhadap penulisan penelitian ini. Semoga hubungan yang telah terjalin dengan baik dalam kehidupan sebagai mahasiswa yang erat selama ini akan terus melekat dihati sanubari kita semua sampai di tempat penugasan baru dan sampai akhir hayat menggunakan ilmu yang ditimba dari Kajian Ilmu Kepolisian semoga dengan demikian dapat diwujudkan Polisi yang dicintai oleh masyarakatnya yang sedang menuju kehidupan demokratis.

Penghargaan yang sangat tinggi penulis berikan kepada orang tua penulis, Istri tercinta Yunita Aristina, SH., MKn., putri tersayang Putu Angelica Eldora Yuardana dan Made Nesya Gayatri Maharani Yuardana. Mereka selalu memberikan inspirasi, kekuatan dan mendo'akan setiap langkah dan kegiatan penulis.

Akhirnya, semoga apa yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan peningkatan pelayanan Polri dalam konteks pelaksanaan Polisi RW melalui pendekatan Polmas khususnya, dan pemeliharaan kamtibmas di wilayah pada umumnya.

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **I WAYAN GEDE ARDANA**  
NPM : **0906595301**  
Program Studi : **KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**  
Fakultas : **PROGRAM PASCA SARJANA**  
Jenis Karya : **TESIS**

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( *Non-Exclusive Royalti Free Right* )** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PEMBENTUKAN POLISI RW SEBAGAI IMPLEMENTASI  
POLMAS DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 4 Juli 2011

Yang menyatakan

**(I WAYAN GEDE ARDANA)**

## ABSTRAK

Nama : I WAYAN GEDE ARDANA  
Program Studi : KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
J u d u l : PEMBENTUKAN POLISI RW SEBAGAI  
IMPLEMENTASI POLMAS DI KECAMATAN  
KEBAYORAN LAMA

Masalah penelitian ini menyangkut Pembentukan Polisi RW sebagai Implementasi Polmas di Kecamatan Kebayoran Lama. Permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini adalah, *pertama*, pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama saat ini, serta peran Polisi RW dalam menerapkan program Polmas pada komunitas masyarakat di tingkat RW dirasakan belum maksimal. *Kedua*, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama dalam rangka mengimplementasikan Polmas, termasuk kekuatan dan kelemahan yang berasal dari internal organisasi, serta peluang dan kendala yang diakibatkan oleh perkembangan lingkungan strategis (eksternal). *Ketiga*, upaya Polsek Kebayoran Lama dalam meningkatkan kinerja Polisi RW melalui pendekatan Polmas, merupakan strategi Polsek Kebayoran Lama dalam meningkatkan kemampuan individu SDM Polri (*enabling*) maupun pemberdayaan institusi (*empowering*) Polisi RW itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data dan informasi sebagai representasi dari keadaan sebenarnya atau fenomenologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interviewing*), studi literatur, dan pengamatan terlibat (*participant observer*).

Konklusi dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Polisi RW melalui pendekatan Polmas di Kecamatan Kebayoran Lama belum tercapai karena tidak ada parameter baku yang digunakan untuk mengukur. Hal ini dipengaruhi faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Upaya Polsek Kebayoran Lama dalam menyikapi hal tersebut dengan membangun strategi yang berlandaskan Program Kerja. Sasaran, mencakup penyempurnaan struktur organisasi, pengawakan, dan tahapan serta transformasi organisasi.

Kata kunci : Polisi RW, Polmas, komunitas masyarakat, pemberdayaan institusi.

## ABSTRACT

Name : I WAYAN GEDE ARDANA  
Study Program : POLICE SCIENCE STUDY  
Title : THE LAUNCHING OF FORMATION  
NEIGBORHOOS POLICEMEN REGARDING THE  
IMPLEMENTATION OF COMMUNITY POLICING  
IN KEBAYORAN LAMA DISTRICT

Research concerns with the formation of Neighborhood Policemen regarding the implementation of community policing in Kebayoran Lama District. Issues covered in this study are, first, how far that the implementation of Neighborhood Policemen of Kebayoran Lama Police Sector has not been optimal implementing community policing programs in neighborhood communities. Second, there are several factors that influence the Neighborhood Policemen of Kebayoran Lama Police Sector in realizing the security of public order, namely the strengths and weaknesses from the internal organization, and opportunities and constraints caused by the development of the strategic environment (external). Third, efforts of Kebayoran Lama Police Sector in optimizing the performance of Neighborhood Policemen in realizing the security of public order, is a strategy of Kebayoran Lama Police Sector to increase both of individual capabilities of Neighborhood Policemen and institutional empowerment itself.

The research uses a qualitative approach in which data and information is a representation of actual conditions or in accordance with the phenomena. This approach aims to obtain data and objective information through in-depth interview technique (depth interviewing), literature studies, and involved observations (participant observer).

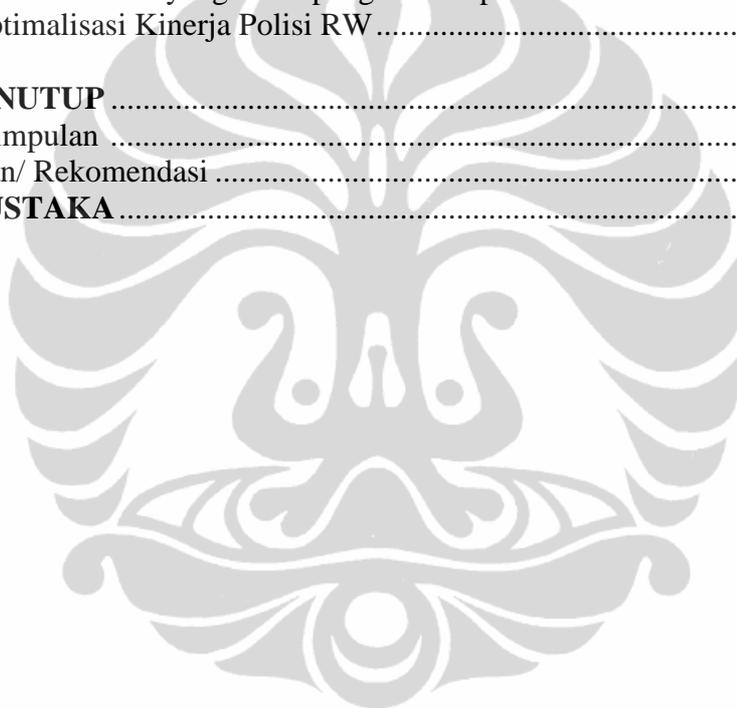
Conclusion from this research is the implementation of Neighborhood Police by community policing approach in the District of Kebayoran Lama has not been reached because there are no standard parameters used to measure. This is caused by the presence of factors that affect both from internal and external. Kebayoran Lama Police Sector efforts in addressing this by building a strategy based on work program, goals, organizational structure, manning, and the stages and organizational transformation.

Keywords : Neighborhood Policemen, community policing, society  
community, institutional empowerment.

# DAFTAR ISI

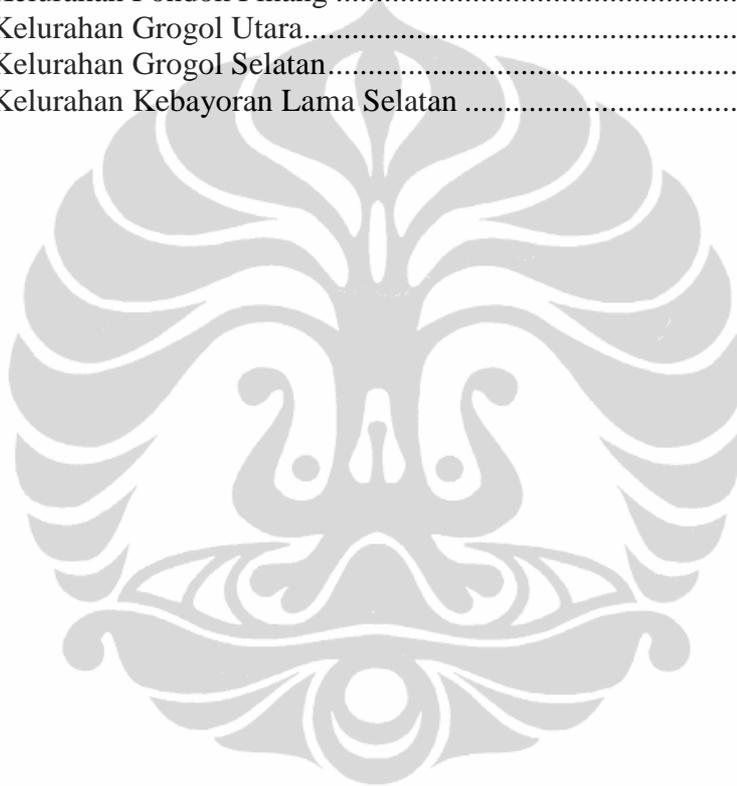
	Halaman
JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	15
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	15
1.4 Hipotesis Kerja.....	16
1.5 Ruang Lingkup.....	16
1.6 Fokus Penelitian.....	16
1.7 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
1.8 Metode Penelitian.....	18
1.9 Pengorganisasian Penulisan.....	27
1.10 Pengertian-Pengertian.....	29
<b>BAB II TINJAUAN LITERATUR .....</b>	<b>31</b>
2.1 Manajemen Operasional Polri.....	31
2.2 Teori Fungsional Struktural.....	34
2.3 Teori Interaksi Sosial.....	35
2.4 Teori Komunikasi.....	37
2.5 Teori Koordinasi.....	40
2.6 Konsep Perpolisian Masyarakat (Polmas).....	42
2.7 Konsep Polisi RW.....	54
2.8 Teori Broken Windows.....	57
2.9 Analisa SWOT.....	59
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
3.1 Wilayah.....	61
3.2 Pembentukan Polisi RW.....	80
3.3 Pelaksanaan Polisi RW saat ini.....	86
3.4 Implikasi Polisi RW terhadap Kamtibmas.....	95
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>	<b>97</b>
4.1 Pemasalahan di Bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya Keamanan, Hukum, dan HAM.....	97
4.2 Internal.....	99
4.2 Ekternal.....	101

<b>BAB V KINERJA POLISI RW YANG IDEAL .....</b>	<b>105</b>
5.1 Pelaksanaan Polisi RW yang diharapkan berkait dengan pemeliharaan kamtibmas wilayah.....	105
5.2 Sistem dan Metode Pelaksanaan Polisi RW Polsek Metro Kebayoran Lama yang diharapkan .....	108
5.3 Kontribusi Kinerja Polisi RW terhadap Kamtibmasdi Kecamatan Kebayoran Lama .....	113
<b>BAB VI UPAYA POLSEK KEBAYORAN LAMA DALAM MENOPTIMALKAN KINERJA POLISI RW .....</b>	<b>118</b>
6.1 Polisi RW Sebagai Implementasi Polmas .....	118
6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Operasional Polisi RW.....	122
6.3 Optimalisasi Kinerja Polisi RW.....	126
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>141</b>
7.1 Kesimpulan .....	141
7.2 Saran/ Rekomendasi .....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.	Jumlah Kelurahan, Luas daerah, RT dan RW .....	62
Tabel 3. 2.	Jumlah Penduduk per Kelurahan .....	63
Tabel 3. 3.	Lokasi Unjuk Rasa/ Aksi Massa .....	66
Tabel 3. 4.	Lokasi Tawuran Warga.....	70
Tabel 3. 5.	Daerah Rawan Perkelahian Pelajar/ Mahasiswa.....	73
Tabel 3. 6.	Rawan Laka Lantas.....	75
Tabel 3. 7.	Kasus Menonjol Selama Tahun 2010 .....	78
Tabel 3. 8.	Data Polisi RW Kelurahan Cipulir .....	87
Tabel 3. 9.	Kelurahan Kebayoran Lama Utara .....	88
Tabel 3. 10.	Kelurahan Pondok Pinang .....	89
Tabel 3. 11.	Kelurahan Grogol Utara.....	90
Tabel 3. 12.	Kelurahan Grogol Selatan.....	91
Tabel 3. 13.	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan .....	92



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Polisi itu adalah etalase (*show window*) bagi perubahan di masyarakat. Apakah suatu pemerintahan peka terhadap perubahan dalam hal ini reformasi dapat dilihat dari penampilan polisi-polisinya. Memang setiap terjadi perubahan di masyarakat, maka polisi yang pertama-tama terkena imbasnya. Apakah itu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, HAM, polisi akan menjadi etalase perubahan. Karena itu dikatakan, polisi seyogyanya selalu satu langkah di depan bangsanya karena polisi adalah pemimpin bangsanya.<sup>1</sup>

Fungsi polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan beraktifitas dalam keadaan aman dan tenteram. Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut<sup>2</sup>. Menurut Bayley (1994), bahwa untuk mewujudkan rasa aman itu mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara pemolisian yang konvensional oleh birokrasi yang rumit, mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain (Kunarto, 1998).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Masa Depan*, dalam <http://sociolegalstudies.wordpress.com/2008/07/01/membangun-polisi-masa-depan/>

<sup>2</sup> Suparlan, Parsudi (Ed), 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, YPKIK

<sup>3</sup> Kunarto, 1998, *Kapita Selekta Binteman (pembinaan tenaga manusia ) Polri*, Jakarta ,Cipta Manunggal. Hal. xi.

Polisi sebagai sebuah pranata merupakan sistem antar-hubungan berbagai norma dan peranan yang berfungsi dalam masyarakat yang membutuhkannya (lihat Suparlan, 2005)<sup>4</sup>. Hubungan antara polisi dengan masyarakat dilaksanakan melalui pemolisian (*policing*) yang terwujud dalam program dan strategi untuk menciptakan rasa aman, memelihara keamanan dan keteraturan kehidupan sosial, menegakkan hukum untuk pengayoman kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilayaninya. Pemolisian yang menjadi acuan dalam masyarakat modern dan demokratis adalah *community policing*. Dalam penyelenggaraan tugas Polri, istilah yang dikenal adalah Polmas. Polmas adalah sebuah kebijakan dan strategi mengenai hubungan polisi dengan warga komunitas menjadi dekat dan adanya peran serta warga dalam menciptakan rasa aman maupun memelihara keamanan di lingkungannya. Yang dilaksanakan proaktif dan berupaya untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan keamanan (Bailey David, 1994; Bayley William, 1995; Friedman, 1992; Suparlan (ed.), 2005).<sup>5</sup>

Menurut David Bailey (1998), dalam bukunya *Police for The Future* yang merupakan hasil penelitian kepolisian di lima negara maju Australia, Inggris, Canada, Jepang, dan Amerika Serikat dengan sistem pemerintahan dan kepolisiannya yang berbeda-beda, menyebutkan: “Semua negara tersebut mengutamakan kesatuan kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat, dinamakan *basic police unit* “(a *basic police unit would be the smallest full service administrative command unit of a police force*). Di Amerika Serikat ada *District Police*, di Inggris itu disebut *Sub-Division*, di Jepang *Police Station*, di Belanda *District Politie*. Bailey (1998) menyatakan, “*Basic Police Unit, would be responsible for delivering all but the most specialized police services their essential function would be to determine local needs and to devise strategies to meet those needs*”. “Disadari bahwa tanpa *public trust*, polisi tidak akan dapat bekerja dengan baik; tanpa *public participation* yang optimal, polisi akan lumpuh. Sumber informasi pertama mengenai kejahatan ada di tangan publik, dan tanpa informasi ini hampir tidak mungkin bagi polisi mulai bergerak. Menurut

---

<sup>4</sup> Kepemimpinan Transformasional dalam Penyelenggaraan Polmas, dalam <http://www.komisi.kepolisianindonesia.com/secondPg.php?cat=umum&id=177>

<sup>5</sup> *Ibid.*

Trojanowicz (dalam Bailey, 1998)<sup>6</sup>, kepolisian yang berorientasi pada masyarakat memerlukan *"An equal commitment to community-oriented government-Community-oriented government adapts the principles of community policing to the delivery of municipal services to neighborhoods"*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara dengan tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai penegak hukum pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Reformasi Polri merupakan dasar pemikiran dari kajian Grand Strategi tahun 2025 dan berlandaskan UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia serta UU Perencanaan Nasional No. 25 tahun 2004 yang mengharuskan institusi publik termasuk Polri agar merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) guna mendukung RPJP nasional.

Tantangan dalam berbagai dimensi berpotensi menjadi kendala yang memperlambat proses kehidupan organisasi Polri yang mempunyai peran, fungsi dan wewenang dalam pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum di tengah masyarakat sesuai dengan UU Nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri dengan independensinya setelah dikeluarkan Tap. MPR No. VII/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan kesungguhan dan niatnya telah bersepakat untuk membenahi baik secara internal maupun eksternal terhadap kinerjanya berkait dengan peran dan fungsinya terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam buku biru Grand Strategi Polri menuju tahun 2025 menyebutkan tentang adanya program Polmas sebagai pelaksanaan tugas pokok Polri dalam memelihara kamtibmas, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas diimplementasikan berdasarkan konsep keamanan swakarsa yang sesuai dengan nilai-nilai sosiokultural bangsa Indonesia. Namun hal tersebut bukan saja tidak mudah untuk diimplementasikan tetapi juga masih ditemukan adanya kendala dalam mensosialisasikan program Polmas.

Seiring dengan kenyataan di atas, maka jelaslah bahwa perkembangan Polri tidak terlepas dari perkembangan masyarakatnya atau dengan kata lain wajah

---

<sup>6</sup> Bailey, David H, 1998, *Police For The Future*, Terjemahan Kunarto, Jakarta, Cipta Manunggal.

polisi merupakan gambaran wajah masyarakatnya. Oleh sebab itu pembangunan Polri ke depan lebih diarahkan kepada pemberdayaan potensi masyarakatnya untuk lebih peduli kepada kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayahnya. Dengan demikian terjalin suatu interaksi sosial yang kohesif baik antar sesama warga maupun antara masyarakat dengan Polri.

Polmas sebagai paradigma baru Polri adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan sebagai perwujudan dari kepolisian sipil. Polmas merupakan filosofi, kebijakan dan strategi organisasi yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi. Dalam Polmas, Polisi dan Masyarakat bekerja sama sebagai mitra untuk mengidentifikasi, menentukan skala prioritas dan memecahkan masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat, seperti ketakutan akan tindak kejahatan, ketidaktertiban fisik dan persoalan masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah di mana Polmas berada.

Paradigma baru Polri tersebut menjadi kerangka dalam mewujudkan jati diri, profesionalisme dan modernisasi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, berada dekat masyarakat dan membaur bersamanya. Inilah paradigma yang dikenal sebagai *Community Policing*.

*Community Policing* adalah bentuk polisi sipil<sup>7</sup> untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan dengan

---

<sup>7</sup> Prof. Satjipto Rahardjo (2005) menyatakan perpolisian dengan paradigma baru memuat suatu yang kompleks: nilai, sikap, dan perilaku yang menciptakan sindrom merawat (*care*), yang merupakan karakteristik polisi sipil yang lebih cenderung "*caring the people*" daripada "*the use of force*" seperti:

- a. *Humane policing*
- b. *Decriminalizing*
- c. *Turning to others not to the police*
- d. *Exercise more social control on their (people) own*
- e. *Decentralized mode of social control*
- f. *People immediately involved*
- g. *To draw upon network of family friends*
- h. *The police moving away from militaristic configuration, engage in serious heart to heart communication with the entire community*
- i. *Unilateral control by police replaced by collective responsibility for social and community control of police*
- j. *De-emphasis of force, the re-emphasis of personal moral responsibility and development of concerned neighborhoods*
- k. *The police accept the role of ombudsman of the weak, ignorant confused, frustated, unemployed, sick, hungry, lonely, hopeless*
- l. *The police grasp the human suffering*
- m. *Weakening the police force*
- n. *Systematic depolicing.*

tindakan-tindakan : (1) Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah sosial (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat. (2) Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas, (3) Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (*crime prevention*), (4) Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penerapannya dengan mengedepankan untuk senantiasa memperbaiki dan menjaga hubungan antara polisi dengan warga komunitas sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Hubungan polisi dengan warga komunitas dibangun melalui komunikasi dimana polisi bisa menggunakan dengan kata hati dan pikirannya untuk memahami berbagai masalah sosial yang terjadi maupun dalam membahas masalah yang bersifat lokal dan adat istiadat masyarakat suku bangsa setempat.

Model *community policing* dapat dianalogikan bahwa posisi polisi adalah dapat berpindah secara fleksibel yaitu ; 1) Posisi setara antara polisi dengan warga komunitas dalam membangun kemitraan dimana polisi bersama-sama dengan warga dalam upaya untuk mencari solusi dalam menangani berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. 2) Posisi di bawah adalah polisi berada di bawah masyarakat yaitu polisi dapat memahami kebutuhan rasa aman warga komunitas yang dilayaninya, dan 3) posisi polisi di atas yaitu polisi dapat bertindak sebagai aparat penegak hukum yang dipercaya oleh warga masyarakat dan perilakunya dapat dijadikan panutan oleh warga yang dilayaninya. Polisi sebagai petugas dalam Perpolisian Komuniti mengidentifikasi warga yang taat dan patuh hukum dan diajak tidak hanya untuk mengamankan dirinya tetapi juga warga komunitasnya dan polisi berupaya membentuk jaringan (*network*).

Tugas Polisi yang mencakup tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan disamping tugasnya sebagai alat negara penegak hukum membuka format yang lebih luas kearah pemberdayaan masyarakat. Namun demikian dalam operasional Polmas adalah dalam lingkup wilayah yang kecil (Kelurahan atau RW) dengan tetap menitik beratkan kepada orientasi pada masyarakat yang dilayaninya (polisi cocok dengan masyarakat). Dalam penyelenggaraan tugas

---

Polri *community policing* akan dikenal dengan istilah Polmas (Perpolisian Masyarakat/ Pemolisian Masyarakat)<sup>8</sup>.

Paradigma baru ini didasari oleh kenyataan bahwa sumber daya manusia kepolisian yang terbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat secara solitair atau seorang diri. Polisi membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Syarat utama dari paradigma baru ini adalah terjalinnya kedekatan hubungan antara polisi dan masyarakat. Tepatnya, kemitraan yang harmonis dan upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan rasa aman warga masyarakat. Beberapa ilustrasi model *Community Policing* di negara lain misalnya:

a. Koban dan Chuzaicho di Jepang

Di negara Barat model *community policing* muncul karena kepolisian menyadari bahwa sebagian besar upaya mereka untuk memerangi kejahatan tidaklah efektif. Model patroli preventif, reaksi cepat terhadap tindak kejahatan, dan kegiatan tindak lanjut investigasi kriminal di polisi tradisional diteliti dan didapati bahwa kegiatan-kegiatan polisi tradisional semacam itu diperlukan, tetapi kalau hanya hal-hal tersebut yang dilakukan ternyata tidaklah cukup efektif untuk memerangi kejahatan. Lebih jauh lagi, penggunaan teknologi tinggi untuk memerangi kejahatan merupakan hal yang membantu dan penting, tetapi tidaklah cukup dengan itu saja. Anggaran dan sumberdaya kepolisian seringkali tidaklah cukup untuk mendukung penggunaan teknologi tinggi guna memerangi kejahatan. Oleh sebab itu, di negara Barat organisasi-organisasi kepolisian mendapati bahwa mereka perlu membentuk kemitraan dengan masyarakat untuk dapat secara efektif memerangi kejahatan. Di Asia *community policing* ternyata telah muncul dari pengalaman negara-negara yang melakukan kegiatan perpolisian dengan masyarakatnya, terutama karena mereka berorientasi pada masyarakat. Misalnya, sistem perpolisian Jepang muncul dari konteks budaya samurai, satu system yang sangat

---

<sup>8</sup> Dalam Perkap Kapolri nomor 7 tahun 2008, Polmas diartikan sebagai Perpolisian Masyarakat atau Pemolisian Masyarakat.

militeristik. Jepang memulai *community policing* dengan sistem Koban dan Chuzaicho di masa Meiji, sekitar 110 tahun yang lalu.

*Community Policing* dalam penyelenggaraan tugas kepolisian di Jepang mengedepankan Koban dan Chuzaicho. Kata Koban dalam Bahasa Jepang berarti sebuah kotak terbuka. Koban adalah sebuah Kotak polisi atau pos polisi yang terbuka selama 24 jam sehari untuk melindungi masyarakat. Kata yang secara harfiah berarti terbuka itu juga mengandung makna bahwa pos polisi tersebut terbuka untuk tukar pendapat secara bebas antara polisi dengan masyarakat. Bentuk lain dari Koban di daerah pedesaan adalah Chuzaiso yaitu sebuah pos polisi yang dihuni. Chuzaiso berarti tinggal disana. Ini adalah pos polisi di daerah pedesaan yang terbuka dalam arti bahwa seorang petugas polisi ada disana, di tengah masyarakat selama 24 jam sehari. Dibagian depan ada ruang kantor untuk polisi dan di bagian belakang ada kamar-kamar untuk tempat tinggal. Kedua jenis pos polisi ini (Koban dan Chusaizo) melakukan kegiatan polisi yang sama, yaitu perpolisian dengan pelayanan penuh kepada masyarakat.

Sifat-sifat Utama *Koban* dan *Chuzaicho* dalam pelaksanaan di Lapangan diantaranya:

- 1) Pos-pos polisi (*Chuzaiso* dan *Koban*) terdapat di tengah-tengah warga masyarakat
- 2) Polisi bertanggung jawab terhadap kehidupan sehari-hari warga, dalam hal kedamaian dan keamanan
- 3) Operasi 24 jam (tidak ada jarak dimana keamanan tidak terjaga)
- 4) Terlibat dalam tahap awal semua kegiatan polisi
- 5) Menjadi basis bagi kegiatan polisi dalam kerjasama dengan masyarakat:
  - a) memahami kebutuhan-kebutuhan penegakan hukum
  - b) menyelesaikan masalah
  - c) menyebarkan informasi pencegahan tindak kejahatan

Fungsi dan Kegiatan *Koban* sebagaimana tanggung jawab tugasnya, diantaranya:

- 1) Penangkapan dan Pencegahan
- 2) Investigasi tindak kejahatan ringan tertentu dan investigasi kecelakaan (Investigasi kejahatan serius dilakukan oleh penyelidik dari Kantor Polisi setingkat Polres/ta)
- 3) Menjaga hubungan baik dengan warga
- 4) Kunjungan ke rumah-rumah:
  - a) berkenalan
  - b) mendapatkan informasi (keluarga)
  - c) mendapatkan opini masyarakat
  - d) mendapat informasi mengenai kebutuhan/masalah-masalah berkaitan dengan penegakan hukum
  - e) mendapatkan informasi mengenai kegiatan penjahat
- 5) Pertemuan dengan masyarakat
  - a) kelompok-kelompok penyelesai masalah
  - b) menyebarkan informasi mengenai pencegahan kejahatan
  - c) mencari dukungan/partisipasi masyarakat dalam kontrol kejahatan

Sebagai wadah untuk komunikasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di wilayahnya di tiap-tiap Koban maupun Chuzaicho ada Dewan Koban maupun Dewan Chuzaicho yang berfungsi sebagai wadah dan penghubung antara warga masyarakat dengan polisi. Ketua Dewan tersebut adalah warga masyarakat yang peduli terhadap pemenuhan rasa aman warga.

- b. NPP (*Neighbourhood Police Post*) dan NPC (*Neighbourhood Police Centre*) di Singapura

Pemolisian di Singapura era tahun tujuh puluhan adalah dengan sistem telpon/panggil polisi dan polisi datang atau dengan sistem *redialcop policing*. Pada tahun 80-an Singapura menyadari bahwa polisi tidak mampu melawan kejahatan sendirian, tetapi harus mendapat bantuan dari masyarakat, maka pemolisiannya adalah bersama-sama dengan masyarakat untuk melawan kejahatan. Di era abad ke-21 pemolisian Singapura menjadi *proactive policing* yang

mengedepankan *Community Policing* yang berorientasi pemecahan masalah atau *problem solving policing*.

Mengapa pemolisian komuniti yang dipilih sebagai pendekatan dalam pemolisiannya? Jawabannya adalah keterbatasan kemampuan dari polisi dalam menangani masalah keamanan, karena polisi tidak tahu kapan kejahatan akan terjadi, di mana terjadi, siapa pelakunya dan mengapa melakukan kejahatan dsb. Selain itu masalah keamanan bukan hanya tanggungjawab polisi saja tetapi menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Namun dalam hal ini bukan berarti polisi melepas tugas dan tanggungjawabnya tetapi bersama-sama dengan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Berkaitan dengan hal itu maka langkah – langkah yang dilakukan kepolisian Singapura adalah sebagai berikut:

- 1) Mengubah pandangan para petugas kepolisian dalam melakukan pemolisiannya (*change the mind set of police officer*)
  - a) Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh anggota kepolisian Singapura di Police academy atau Sekolah Kepolisian tentang pemolisian komuniti (*Community Policing*) secara bertahap selama tiga minggu.
  - b) Bimbingan dan latihan terus menerus oleh pimpinan atau petugas kepolisian yang lebih senior.
  - c) Menanamkan *Core value* / nilai-nilai murni kepolisian kepada seluruh anggota kepolisian agar nilai-nilai tersebut menjadi landasan dan tindakannya sebagai petugas kepolisian.
- 2) Membangun kepercayaan masyarakat.
  - a) Melakukan tindakan dari hati ke hati menunjukkan bahwa tindakan petugas kepolisian memang untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi dan membimbing masyarakat.

- b) Tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan polisi tidak dipercaya antara lain:
    - (1) KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).
    - (2) Tidak profesional dalam melakukan tugasnya.
    - (3) Tidak responsif terhadap aduan atau keluhan masyarakat.
    - (4) Bersikap arogan.
    - (5) Melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat.
    - (6) Melakukan tindak pidana.
    - (7) Tidak transparan dan tidak bertanggungjawab kepada masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan.
  - c) Menunjukkan tindakan-tindakan empati terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- 3) Melakukan pendidikan bagi masyarakat agar masyarakat siap dan menyadari bahwa masalah keamanan merupakan hal yang utama dan penting bagi kehidupan masyarakat serta merupakan tanggungjawab seluruh warga.
- a) Memberitahukan tentang situasi dan kondisi masyarakat serta cara-cara menanggulangi ancaman yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
  - b) Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan / sekolah-sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga universitas untuk memberikan pelajaran atau pengetahuan tentang keamanan, ketertiban hukum dsb.
  - c) Melakukan komunikasi secara berkala dan terus-menerus dengan masyarakat.
  - d) Melakukan hubungan yang baik dengan para tokoh masyarakat maupun pemimpin informal yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat.

- 4) Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan (*crime prevention*) melalui aktifitas membangun program NPC (*Neighbourhood Police Centre*)

Sebagai wadah untuk komunikasi atau membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat maupun untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat tiap NPC dibangun CSSP (*Crime Safety and Security Program*).

*Community Safety and Security Programs* (CSSPs) merupakan organisasi-organisasi masyarakat yang melakukan upaya pemecahan masalah dalam bidang-bidang tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat. CSSPs memiliki Rencana Aksi Bersama yang dibuat oleh tokoh-tokoh serta warga masyarakat tingkat bawah (akar rumput) dan polisi untuk merespon masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Beberapa jenis CSSPs atau Program Keselamatan dan Keamanan Masyarakat (PKKM):

- 1) Care & Support CSSPs (PKKM Kepedulian dan Dukungan): Dewan Pembangunan Masyarakat berfungsi sebagai pihak yang ditunjuk oleh polisi untuk memberikan bantuan finansial dan emosional bagi keluarga dari si pelanggar hukum, korban kejahatan keluarganya, korban bencana, dll.
- 2) Crime Prevention CSSPs (PKKM Pencegahan Kejahatan): tokoh-tokoh masyarakat di tingkat bawah berpartisipasi dalam siskamling. Warga membentuk kelompok-kelompok siskamling untuk menjaga keselamatan dan keamanan di masyarakat.
- 3) Dispute Mediation CSSPs (PKKM Mediator Sengketa): tokoh-tokoh masyarakat tingkat bawah menengahi permasalahan-permasalahan di lingkungan setempat, dengan menggali keahlian dan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat serta organisasi-organisasi masyarakat.
- 4) Internally Displaced Persons CSSPs (PKKM untuk Pengungsi): tokoh-tokoh masyarakat tingkat bawah melakukan mediasi bagi imigran gelap, pengungsi, emigran, dll., dan membuat program

reintegrasi ke masyarakat, menjamin tidak terlanggarnya HAM mereka dalam perlakuan, serta selalu memberi informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini.

Ilustrasi pelaksanaan Polmas (*community policing*) di luar negeri tersebut memiliki signifikansi terhadap Polmas yang dilaksanakan di Indonesia. *Community Policing* merupakan program universal polisi di seluruh dunia. Ketentuan yang paling utama adalah membangkitkan kepedulian komunitas terhadap perkembangan lingkungan sosial berkait dengan ketertiban dalam kehidupan masyarakatnya yang berimplikasi terhadap kamtibmas di wilayah dengan mengacu kepada pranata lokal.

Di Indonesia, pelaksanaan Polmas pada tingkat Polsek adalah Kapolsek yang merupakan pimpinan tertinggi yang memegang tanggung jawab fungsi kepolisian di wilayah hukumnya. Hal ini menempatkan Kapolsek sebagai pengendali dan pengawas kegiatan Polmas di wilayah Polsek. Keberhasilan pelaksanaan Polmas tidak terlepas dari peran pemimpin yang merancang, mengkoordinir, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Polmas. Oleh karena itu Kapolsek memiliki peran penting sebagai pengendali dan pengawas dalam pelaksanaan Polmas di tingkat Polsek.

Keberadaan Polmas di tingkat Polsek memiliki fungsi penting dalam pencapaian tugas Polri mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena pada tingkat Polsek, polisi bersentuhan dengan masyarakat secara langsung dalam Polmas sehingga dimungkinkan terjadinya hubungan kerja sama yang baik antara polisi dan masyarakat. Peran Kapolsek sebagai pengawas dan pengendali kegiatan Polmas ikut menentukan keberhasilan pencapaian tugas mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolsek berperan sebagai pengawas dan pengendali langsung dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan di Polsek. Bentuk pengawasan yang diterapkan oleh Kapolsek dalam kaitannya dengan pelaksanaan Polmas, pertama, melalui pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kedua, dengan memerintahkan anggota untuk membuat laporan kegiatan secara rutin. Dengan

kata lain seluruh aktivitas atau kegiatan Polmas dimonitor dan dilaporkan pertanggungjawabannya kepada Kapolsek secara terus-menerus.

Kondisi ini pada akhirnya memerlukan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada ditengah kehidupan masyarakat. Di dalam pembangunan pemberdayaan potensi masyarakat tersebut di atas, Polsek Kebayoran Lama telah melakukan langkah-langkah dengan membentuk Polisi Rukun Warga pada tanggal 14 Januari 2011. Pelaksanaan pembentukan Polisi Rukun Warga (*selanjutnya disebut* Polisi RW) merupakan pengejawantahan dari konsep *Community Policing* atau Polmas pada komunitas masyarakat di tingkat Rukun Warga. Langkah ini ditempuh berdasarkan tuntutan masyarakat di wilayah hukum Polsek Kebayoran Lama yang kemudian disikapi dengan segera oleh Polsek dengan menurunkan seluruh personil Polsek Kebayoran Lama untuk setiap RW di Kecamatan Kebayoran Lama dengan pendekatan Polmas.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pengalaman dan pengamatan penulis di Kecamatan Kelapa Gading. Di Kelapa Gading telah terbentuk Polisi RW, yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sana, karena sudah terjalin hubungan dan komunikasi yang cukup baik dan erat antara anggota Polisi RW dengan warga lingkungan sekitar wilayah tugas mereka. Latar belakang yang lain adalah heterogenya masyarakat di wilayah Kebayoran Lama serta masih adanya gangguan kamtibmas yang terjadi di pemukiman, perumahan, jalan-jalan umum, perparkiran di pusat-pusat perbelanjaan (pasar-pasar, super market), seperti :

- a. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika
- b. Pencurian di rumah-rumah kosong yang dihuni oleh masyarakat kelas menengah ke atas
- c. Gejala konflik yang terjadi antar warga masyarakat, karena kurang kohesifnya jalinan interaksi sosial pada masyarakat kelas menengah ke bawah
- d. Pencurian kendaraan bermotor yang sedang di parkir, baik di pemukiman, pusat perbelanjaan maupun di jalan-jalan umum

Implementasi Polmas yang dilaksanakan dalam konsep Polisi RW dalam aspek penyelesaian sosial dengan pendekatan *Restorative Justice* (RJ). Pendekatan ini diharapkan memberikan sebuah keluaran dalam bentuk *win-win solution*. *Restorative Justice* (RJ) adalah adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.<sup>9</sup>

Sedangkan pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat yang dilakukan oleh Polisi RW mengacu kepada makna Polmas secara filosofis sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Kemitraan yang dimaksud adalah jalinan interaksi sosial antara Polisi RW dengan masyarakat dalam tataran yang setara berkait dengan pemeliharaan kamtibmas di wilayah RW.

---

<sup>9</sup> Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice Di Indonesia* (Peluang dan Tantangan Penerapannya), dalam <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html>

Penelitian saya ini difokuskan pada pembentukan Polisi RW sebagai implementasi Polmas di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama oleh Polsek Kebayoran Lama. Implementasi yang dimaksud adalah penerapan Polmas yang dilaksanakan Polisi RW.

## 1.2 Permasalahan

Beranjak dari latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi yaitu setelah pembentukan Polisi RW sebagai implementasi Polmas di Kecamatan Kebayoran Lama masih memerlukan peningkatan kinerja baik dalam program Polisi RW maupun kemampuan individu Polisi RW.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada identifikasi permasalahan kamtibmas diatas diuraikan sebagai berikut:

- a. *Bagaimana Pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama semenjak terbentuk hingga saat ini?*

Polisi RW merupakan salah satu Program Kerja Polri yang tertuang dalam Skep/737/X/2005 dan Perkap no. 7 tahun 2008 dimana konsepnya mengacu kepada Konsep Polmas sedangkan obyeknya adalah komunitas masyarakat di lingkup Rukun Warga. Pertanyaan ini akan menjawab sejauh mana implementasi konsep Polmas yang telah dilaksanakan oleh Polisi RW jajaran Polsek Kebayoran Lama dalam pemeliharaan kondisi kamtibmas wilayah di tingkat RW yang dikaitkan dengan struktur dan program kerja Polisi RW.

- b. *Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama?*

Persoalan penelitian ini untuk menguraikan berbagai aspek yang mempengaruhi pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama baik dari sisi internal organisasi maupun sisi eksternal yaitu perkembangan lingkungan strategik. Pendekatannya menggunakan analisis SWOT.

- c. *Bagaimana upaya Polsek Kebayoran Lama dalam meningkatkan kinerja Polisi RW melalui implementasi Polmas?*

Peran dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum dalam hal ini Polisi RW yang dibentuk oleh Polsek Kebayoran Lama masih memerlukan peningkatan baik pada individu SDM Polri (*enabling*) maupun pemberdayaan institusi (*empowering*) Polisi RW itu sendiri. Melalui Program Kerja, Sasaran, Struktur Organisasi, Sistem Pengawasan, yang kemudian disusun sebuah strategi menggunakan analisa SWOT. Pengolahan data ini menghasilkan kondisi kesehatan organisasi sehingga dapat ditentukan langkah meningkatkan kinerja melalui tiga tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

#### **1.4 Hipotesis Kerja**

Hipotesa kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Pembentukan Polisi RW sebagai implementasi Polmas di Kecamatan Kebayoran Lama dalam pelaksanaan di lapangan belum optimal”.

#### **1.5 Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi: (a) Organisasi dan pengorganisasian Polisi RW di jajaran Polsek Kebayoran Lama; (b) Pranata, norma, dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama dalam komunitas di tingkat RW; (c) Faktor yang mempengaruhi kinerja Polisi RW terhadap kamtibmas di Kec. Kebayoran Lama; dan (d) Koordinasi lintas sektoral dalam konteks pelaksanaan Polisi RW; serta (e) Upaya Polsek Kebayoran Lama dalam meningkatkan kinerja Polisi RW.

#### **1.6 Fokus Penelitian**

Mengacu kepada ruang lingkup masalah penelitian tersebut di atas, maka fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pelaksanaan Program Polmas yang diwujudkan melalui penerapan konsep Polisi RW yang dibentuk oleh Polsek Kebayoran Lama. Program Polmas yang dimaksud adalah membangun interaksi

sosial antara polisi dan masyarakat dalam tataran Rukun Warga yang dilakukan oleh Polisi RW. Interaksi sosial dengan mengedepankan pemahaman terhadap pranata, norma, dan nilai sosial yang diberlakukan secara lokal pada masyarakat di Kecamatan Kebayoran Lama.

### **1.7 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama semenjak terbentuk hingga saat ini.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama.
- c. Mengetahui upaya Polsek Kebayoran Lama dalam meningkatkan kinerja Polisi RW melalui implementasi Polmas.

Manfaat penelitian dalam aspek ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis secara lebih rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dalam menambah wawasan berfikir secara ilmiah, logis dan sistematis serta mampu menerapkan berbagai ilmu pengetahuan yang diterima di Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian. Bagi Universitas Indonesia dalam rangka pengembangan Ilmu Kepolisian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian dalam melakukan analisa pada permasalahan yang sama dalam konteks studi Kajian Ilmu Kepolisian atau disiplin ilmu sosial atau sains lainnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi terhadap penyelenggaraan fungsi kepolisian, dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan metode yang tepat dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

## 1.8 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Hal ini dimaksudkan untuk memahami pelaksanaan Polisi Rukun Warga (RW) di Kecamatan Kebayoran Lama yang baru terbentuk melalui pendekatan konsep Polmas yang dilakukan oleh Polsek Kebayoran Lama. Kegunaannya sebagai metode berfikir yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola.<sup>10</sup> Manfaat etnografi ini untuk meniadakan pengaruh-pengaruh represif dan tekanan eksternal, meningkatkan kesadaran, dan melakukan tindakan yang kemungkinan akan mengarah kepada perubahan sosial.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilaksanakan ini bersifat deskriptif, sebab peneliti menghendaki suatu himpunan data untuk menggambarkan suatu aktifitas atau fenomena yaitu kinerja Polisi RW di Kecamatan Kebayoran Lama dalam menciptakan kondusifitas kamtibmas wilayah melalui pendekatan kemitraan sebagaimana yang tertuang dalam konsep Polmas.

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui teknik pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara, dengan demikian peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Untuk pengamatan terlibat ini, peneliti berupaya untuk memahami setiap gejala, korelasi gejala yang satu dengan lainnya, sesuai dengan cara memandang dan cara memperlakukan sesuatu gejala dari sudut pandang Polisi RW, sehingga mampu memahami mengapa gejala tersebut ada dan berfungsi serta dibutuhkan di dalam struktur kehidupan masyarakat setingkat Rukun Warga (RW) di Kecamatan Kebayoran Lama.

Metode pengamatan terlibat (*participant observer*), adalah aktifitas untuk mengamati fenomena yang terjadi pada kinerja Polisi RW dalam aktifitasnya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum secara rutin untuk mendapatkan gambaran secara jelas guna dimaknakan. Di samping itu, pengamatan terlibat yang dilakukan secara langsung turun ke

---

<sup>10</sup> Parsudi Suparlan, “ *Metode Penelitian Kualitatif* “, Jakarta, Kajian Wilayah Amerika Prog. Pasca Sarjana-UI, 1995.

<sup>11</sup> John W. Creswell, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, (terjemahan Angk. III & IV KIK-UI, dipakai di kalangan sendiri), Jakarta, KIK Press, 2002, hlm.10.

lapangan ini bekerja sama dengan Polisi RW dan para Ketua RW dan masyarakat guna melihat fenomena sosial atas kinerja Polisi RW di wilayah.

Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara mendalam (bukan wawancara yang terstruktur), dimana wawancara yang diwujudkan dalam dialog berkenaan dengan masalah atau topik yang sedang dihadapi, sehingga keadaan menjadi terbuka, tumbuh dan berkembang yang memperkenankan *informan*<sup>12</sup> menguraikan dan menjelaskan pengalamannya. Kebutuhan wawancara kualitatif berfungsi untuk menguraikan pengalaman responden. Metode wawancara mendalam ini dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap berbagai informasi yang tidak dapat ditangkap oleh peneliti hanya dengan data maupun pengamatan.

Sumber data atau informan yang dimaksud diantaranya adalah pribadi yang memiliki (dianggap memiliki) kompetensi terhadap tema dan topik penelitian ini diantaranya adalah:

a. Informan Kunci

Waka Polsek Kebayoran Lama, AKP. Riftazudin, S.Kom.

AKP. Riftazudin, S. Kom, saat ini berusia 41 tahun, dilahirkan di Tegal. Pendidikan dasar hingga strata satu ditempuh di Jakarta. Pada tahun 1999 diterima menjadi anggota Polri melalui pendidikan Sepa PK POLRI. Kedinasan pertama sebagai Pama Kasubbag Min Pusdokkes Mabes Polri, kemudian pada tahun 2001 menjabat sebagai Kaurdal Taud Pusdokkes Mabes Polri. Pada tahun 2004 menjabat sebagai Kanit Lantas Polsek Metro Ciputat. Pada bulan Maret tahun 2006 ditempatkan sebagai Ka SPK Polres Metro Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Agustus di tahun yang sama menjabat sebagai Kasubbag Binops Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 2007 menjabat sebagai Waka Polsek Metro Setia Budi, selanjutnya pada tahun 2010 menjabat sebagai Waka Polsek Kebayoran Lama.

---

<sup>12</sup> *Informan* adalah para nara sumber yang memberikan informasi.

b. Informan Penting

- 1) Kanit Bimas Polsek Kebayoran Lama, AKP. Teguh Sukmawati  
AKP. Teguh Sukmawati, kelahiran Cilacap saat ini berusia 50 tahun. Menjadi anggota Polri pada tahun 1982 melalui seleksi Seba Polwan. Selama menjadi anggota Polwan sudah banyak tugas yang dijalankannya, diantaranya pada tahun 2001 menjabat sebagai Paur Inven Dit Binmas PMJ, kemudian pada tahun 2003 bertugas sebagai Paur Siskamling Binmas PMJ. Pada tahun 2004 sempat menjabat sebagai Kapospol Kebayoran Lama, selanjutnya pada tahun 2010 hingga saat ini menjabat Kanit Binmas Polsek Kebayoran Lama.
- 2) Bhabinkamtibmas jajaran Polsek Kebayoran Lama
  - a) Kelurahan Cipulir, Bripka Suhedi  
Aipda Suhedi, kelahiran Jakarta, saat ini berusia 40 tahun. Menjadi anggota Polri melalui seleksi Seba Polsuk pada tahun 1993. Pada tahun 1993 hingga tahun 1996 bertugas sebagai anggota Samapta Polda Metro Jaya. Sejak tahun 1996 hingga saat ini, bertugas sebagai anggota Bhabinkamtibmas Polsek Kebayoran Lama.
  - b) Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Bripka Widodo  
Bripka Widodo, kelahiran Indramayu, saat ini berusia 50 tahun. Menjadi anggota Polri sejak tahun 1983 melalui seleksi Secata Polri. Awal bertugas sebagai anggota Satwal Denmabes Polri. Kemudian pada tahun 1987 menjadi staf Angkutan Denmabes Polri. Pada tahun 1996 bertugas sebagai anggota SPK Polsek Kebayoran Lama. Kemudian pada tahun 2002 mulai bertugas sebagai anggota Bhabinkamtibmas Polsek Kebayoran Lama hingga saat ini.
  - c) Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Aiptu Mashuri  
Aiptu Mashuri, kelahiran Klaten, saat ini berusia 56 tahun. Menjadi anggota Polri pada tahun 1976 melalui seleksi

Secata Wamil Polri, kemudian pada tahun 1983 mengikuti seleksi Secaba Reguler. Pada penugasan awal menjadi anggota Sabhara Polres Metro Jakarta Selatan. Pada tahun 1978 bertugas sebagai anggota Staf Bag Min Polres Metro Jakarta Selatan. Pada tahun 1984 bertugas sebagai Kapospol Pasar Kebayoran Lama. Pada tahun 1992 bertugas sebagai anggota Intel Polsek Kebayoran Lama. Pada tahun 1993 bertugas sebagai anggota Pospol Pondok Indah, selanjutnya pada tahun 2006 hingga saat ini bertugas sebagai anggota Bhabinkamtibmas Polsek Kebayoran Lama.

d) Kelurahan Pondok Pinang, Aiptu Sumardi

Aiptu Sumardi, saat ini berusia 52 tahun kelahiran Gunung Kidul. Menjadi anggota Polri pada tahun 1979 melalui seleksi Secata Polri Lido, kemudian mengikuti Secaba Reguler Polri pada tahun 1984. Setelah lulus menjadi anggota Polri pada tahun 1980 ditempatkan sebagai anggota Sabhara PMJ, kemudian pada tahun 1985 dipindah tugaskan sebagai anggota Sabhara Polsek Kebayoran Lama. Pada tahun 1992 mulai menjabat sebagai Bhabinkamtibmaskel Kelurahan Ulujami, dan pada tahun 1996 hingga sekarang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Kelurahan Pondok Pinang Polsek Kebayoran Lama.

e) Kelurahan Grogol Utara, Aiptu Sumarno

Aiptu Sumarno, kelahiran Gunung Kidul, saat ini berusia 51 tahun. Menjadi anggota Polri pada tahun 1982 melalui seleksi Seba Milsuk Polri. Adapun masa dinas awal pada tahun 1983 sebagai Anggota Puskodal PMJ. Pada tahun 1985 berpindah tugas ke Polres Metro Jakarta Selatan menjadi anggota Sabhara Polsek Kebayoran Lama. Pada tahun 1992 bertugas sebagai anggota Intel Polsek

Kebayoran Lama, selanjutnya pada tahun 1996 bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Polsek Kebayoran Lama.

f) Kelurahan Grogol Selatan Aiptu Suradi  
Aiptu Suradi, kelahiran Solo, saat ini berusia 50 tahun. Menjadi anggota Polri pada tahun 1982. Penugasan awal pada tahun 1983 sebagai anggota Satwal Mabes Polri, selanjutnya sejak tahun 1993 mulai bertugas sebagai anggota Bhabinkamtibmas Polsek Kebayoran Lama hingga saat ini.

3) Polisi RW Polsek Kebayoran Lama, yaitu:

a) Aiptu Imam Royani, Polisi RW 07 Pondok Pinang  
Aiptu Imam Royani merupakan kelahiran Wonogiri, saat ini berusia 52 tahun, menjadi anggota Polri melalui Seba Milsuk Polri pada tahun 1982. Tugas pertama sebagai anggota Puskodal PMJ pada tahun 1983, kemudian pada tahun 1985 bertugas sebagai anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Pada tahun 1987 bertugas sebagai anggota Sabhara Polsek Kebayoran Lama, pada tahun 1992 bertugas sebagai anggota intel Polsek Kebayoran Lama, dan pada tahun 1996 bertugas sebagai Pjs Panit II Reskrim Polsek Kebayoran Lama hingga saat ini.

b) Aiptu H. Jarwo, Polisi RW 01 Kebayoran Lama Utara  
Aiptu H. Jarwo kelahiran Gunung Kidul, saat ini berusia 43 tahun. Menjadi anggota Polri melalui seleksi Seba Polri pada tahun 1988. Tugas pertama tahun 1989 sebagai Bintara Yanmas, kemudian pada tahun 1991 bertugas sebagai anggota serse, dilanjutkan pada tahun 1997 bertugas sebagai anggota intel. Tahun 2002 bertugas sebagai Gadik Muda II Secapa, kemudian pada tahun 2004 bertugas sebagai Danton Protokol Mabes, pada tahun 2005 bertugas sebagai Kanit narkoba Polsek Kebayoran Lama,

dan sejak tahun 2006 hingga saat ini bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama.

c) Bripda Sujai, Polisi RW 03 Kebayoran Lama Utara  
Bripda Sujai merupakan kelahiran Palembang dan saat ini berusia 34 tahun. Menjadi anggota Polri melalui seleksi Secatam pada tahun 1999, pada tahun yang sama bertugas sebagai anggota Sabhara PMJ, kemudian pada tahun 2000 bertugas sebagai anggota Sabhara Polres Metro Jakarta Selatan, dan pada tahun 2003 hingga saat ini bertugas sebagai anggota Polsek Kebayoran Lama.

d) Briptu Reymo, Polisi RW 08 Kelurahan Grogol Selatan  
Briptu Reymo kelahiran Jakarta dan saat ini berusia 28 tahun. Menjadi anggota Polri melalui seleksi Diktuba Polri pada tahun 2003. Pada masa awal dinas tahun 2004 bertugas sebagai anggota Polda Metro Jaya, pada tahun yang sama berpindah tugas sebagai anggota Polres Metro Jakarta Selatan, dan pada tahun 2008 hingga saat ini bertugas sebagai anggota Polsek Kebayoran Lama.

4) Kasi Umum Polsek Kebayoran Lama, Aiptu Sartoyo  
Aiptu Sartoyo merupakan kelahiran Kediri, saat ini berusia 54 tahun. Menjadi anggota Polri melalui seleksi Secata Wamil Polri pada tahun 1978. Pada masa awal dinas bertugas sebagai anggota staff Sabhara dan Puskodalops PMJ, kemudian pada tahun 1989 bertugas sebagai anggota staff Taud Polsek Kebayoran Lama. Tahun 1998 bertugas sebagai Bataud Polsek Kebayoran Lama, dan pada tahun 2010 hingga saat ini bertugas sebagai Kasi Um Polsek Kebayoran Lama.

5) Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP. Prayitno  
AKP Prayitno merupakan kelahiran Blitar, saat ini berusia 44 tahun. Menjadi anggota Polri melalui seleksi Seba Milsuk pada tahun 1986. Awal dinas bertugas di Polsek Ciputat sebagai anggota sabhara dan reskrim, selanjutnya tahun 1993 bertugas

sebagai anggota intelkam Polset Ciputat sampai tahun 1994. Pernah juga bertugas sebagai babinkamtibmas Polsek Ciputat dan tahun 1998 bertugas sebagai Kapospol Polsek Ciputat. Pada tahun yang sama sebagai Kanit Lantas Polsek Ciputat, selanjutnya berpindah tugas sebagai Kanit Narkoba selama 6 bulan, kemudian sebagai Kanit Reskrim Polsek Ciputat. Pada tahun 2009 hingga saat ini bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama.

c. Informan Tambahan

1) Camat Kebayoran Lama, Budi Wibowo, SH., MSi.

Budi Wibowo, SH. MSI. Kelahiran Jakarta, 21 Februari 1964. Tugas pertama setelah lulus dari Universitas Jayabaya pada tahun 1994 pada Sekretariat Kodya Jakarta Selatan. Menjabat Camat Kebayoran Lama sejak tanggal 13 Januari 2009 hingga saat ini.

2) Lurah Jajaran Kecamatan Kebayoran Lama, yaitu:

a) Pondok Pinang : Bapak H. Achmad Arsani, S.Sos.

Kelurahan Pondok Pinang dipimpin oleh H. Achmad Arsani, S.Sos. Kelahiran Jakarta pada tanggal 4 Januari 1956. Tugas pertama sebagai lurah di Kelurahan Srengseng Sawah, kemudian menjabat sebagai lurah Pondok Pinang sejak tanggal 28 April 2010.

b) Cipulir : Ambayar, SE.

Kelurahan Cipulir yang dipimpin oleh Ambayar, SE. Kelahiran Padang pada tanggal 7 Juli 1960. Tugas pertama sebagai wakil lurah Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, selanjutnya menjabat sebagai lurah di kelurahan Cipulir sejak tanggal 1 Agustus 2010 hingga saat ini.

c) Kebayoran Lama Selatan : Bapak H. Umar Ali, S.Sos.

Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang dipimpin oleh Bapak H. Umar Ali, S.Sos. Kelahiran Jakarta pada tanggal 28 Februari 1956. Tugas pertama sebagai lurah Selong Kecamatan Kebayoran Baru, kemudian menjabat sebagai lurah Kebayoran Lama Selatan sejak tanggal 28 April 2010 hingga saat ini.

d) Kebayoran Lama Utara : H. Agus Suryadi, S.Sos., MSi.  
H. Agus Suryadi, S.Sos. MSi kelahiran Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1965. Tugas pertama sebagai Wakil Lurah Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru, kemudian menjabat sebagai lurah Kebayoran Lama Utara sejak tanggal 1 April 2008 hingga saat ini.

e) Grogol Selatan : Bapak Mustaqim, S.Sos.  
Mustaqim, S.Sos kelahiran Luwung pada tanggal 28 Maret 1961. Tugas pertama sebagai wakil lurah di Kelurahan Grogol Utara, menjabat sebagai lurah di kelurahan Grogol Selatan sejak tanggal 15 Mei 2008 hingga saat ini.

f) Grogol Utara : M Bapak Mohammad Santoso, AP. MSi.  
Mohammad Santoso, AP. MSi, kelahiran Jakarta pada tanggal 14 Juni 1977. Tugas pertama sebagai wakil lurah Ulujami Kecamatan Pesanggrahan. Mulai bertugas sebagai lurah di Kelurahan Grogol Utara pada tanggal 30 Desember 2009 hingga saat ini.

3) Ketua RW Jajaran Kecamatan Kebayoran Lama

a) Ketua RW 08 Kelurahan Grogol Selatan, Widi Agung  
Widi Agung kelahiran Yogyakarta, saat ini berusia 40 tahun dan telah 2 tahun ini menjabat sebagai Ketua RW 08, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama.

b) Ketua RW 06 Kelurahan Pondok Pinang, M. Yasin

Mohammad Yasin kelahiran Jakarta saat ini berusia 49 tahun dan telah dua periode sejak tahun 2006 hingga saat ini menjabat sebagai Ketua RW 06, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama.

Data yang terkumpul dari sumber data atau informan tersebut selanjutnya diproses. Untuk lebih mempertajam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *Verstehen* dari Max Weber yaitu pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia. Penggunaan pendekatan *Verstehen* dikarenakan peneliti berusaha menggambarkan atau menginterpretasikan makna pengorganisasian Polisi RW. Sebagaimana dikemukakan oleh Weber, pendekatan ini menggunakan pengetahuan pribadi (*persona*) dan pengalaman secara subyektif (*insight*) yang diperoleh dalam interaksi sosial melalui proses pengambilan peranan sebagai alat bagi pemahaman mengenai perilaku sosial baik pada Polisi RW maupun masyarakat di Kecamatan Kebayoran Lama.

Beberapa bagian dari proses analisis data ini terdiri dari pembahasan. Proses analisis data bersifat pilih-pilih; tidak ada cara yang benar<sup>13</sup>. Perumpamaan dan analogi sama tepatnya seperti pertanyaan terbuka. Analisis data mengharuskan peneliti mencocokkan fenomena yang diserap oleh peneliti dan dimaknakan ke dalam penulisan.

Analisis data pada dasarnya merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan, yang meliputi penggolongan dalam suatu pola tertentu, mencari interpretasi dalam arti memberi makna, mencari hubungan antar berbagai konsep yang terdiri dari hasil catatan lapangan. Menurut Miles analisis terdiri dari: (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan.<sup>14</sup>

Data yang diperoleh dianalisis dan diuji dengan analisis kualitatif, yang pengujiannya tidak menggunakan analisis statistik, namun menggunakan metode gabungan yang disebut metode *triangulasi* yang digunakan sebagai metode antara, artinya menyusun prosedur pengumpulan data kuantitatif (khususnya data

---

<sup>13</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, Terjemahan Bahasa Indonesia, Jakarta, KIK Pres, 2002, hlm. 142.

<sup>14</sup> M.B. Miles & A.M. Hubberman, *Qualitative data analysis: A sourcebook of new method*, Beverlyhills, CA, Sage, 1984, hlm. 16.

sekunder yaitu tabel dan angka) dan kualitatif (hasil pengamatan dan wawancara). Konsep triangulasi didasarkan kepada asumsi bahwa setiap prasangka yang ada dalam sumber data, peneliti, dan metode akan dinetralisir ketika digunakan bersama dengan sumber data, peneliti dan metode lain.<sup>15</sup>

## 1.9 Pengorganisasian Penulisan

Sistematika penulisan pada Tesis ini diorganisasikan dalam 7 (tujuh) Bab dan beberapa Sub-Bab, yang dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut:

### Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan tesis dimana dapat dimunculkan permasalahan dan diidentifikasi persoalan-persoalan yang harus dipecahkan. Disamping itu, penulisan ini dibatasi dengan ruang lingkup pembahasan kemudian maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini. Dijelaskan pula metode pendekatan agar tergambar karakter hasil karya ini dan tata urutan penulisan sebagai sistematika penulisan yang mengacu kepada ketentuan serta ditutup dengan pengertian-pengertian yang ada dalam penulisan ini agar tidak bias dalam mempersepsikan setiap masalah yang ada.

### Bab II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini menguraikan tentang penggunaan teori dan konsep dimaksudkan agar pada penulisan tesis ini dapat dibuat dari perspektif apa dan juga harus mengerucut kepada suatu permasalahan yang dihadapi. Beberapa teori dan konsep yang diuraikan pada bab ini diantaranya adalah Manajemen Operasional Kepolisian (MOP), Teori Fungsional Struktural, Teori Komunikasi, Teori Koordinasi, Konsep Interaksi Sosial, Teori Broken Windows, Konsep Polmas dan Pemberdayaan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

Masyarakat Dalam Konsep Polmas serta Konsep Analisis SWOT.

**Bab III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

Bab ini mendeskripsikan implementasi Polisi RW yang dilakukan oleh Polsek Kebayoran Lama saat ini. Uraian tentang kondisi wilayah dari perspektif administrasi pemerintahan dalam aspek geografi dan demografi serta sosial budaya masyarakat.

Disamping itu dijelaskan tentang kondisi internal Polsek Kebayoran Lama dalam melaksanakan konsep Polmas dikaitkan dengan pelaksanaan Polisi RW.

**Bab IV ANALISIS PERMASALAHAN**

Beberapa aspek yang menghambat dan mendukung perwujudan implementasi Polisi RW yang dilakukan oleh Polsek Kebayoran Lama dijelaskan pada bab ini. Kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan peluang serta kendala yang bersifat eksternal terperinci diuraikan satu persatu.

**Bab V KINERJA POLISI RW YANG IDEAL**

Pada bab ini menjelaskan tentang kondisi yang diharapkan yaitu pelaksanaan Polisi RW dalam konteks Polmas yang sesuai dengan harapan masyarakat di tingkat RW dimana terwujud suatu sinergitas dalam bentuk kemitraan yang sejajar. Pada bab ini dijelaskan pula tentang implikasi implementasi Polisi RW terhadap perwujudan kamtibmas wilayah yang kondusif.

**Bab VI UPAYA POLSEK KEBAYORAN LAMA DALAM MENGOPTIMALKAN KINERJA POLISI RW**

Substansi dari tesis ini tergambar secara rinci pada bab ini. Solusi dari persoalan-persoalan dijelaskan secara rinci mengacu kepada kebijakan, dan strategi serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan Polisi RW di Kecamatan Kebayoran Lama melalui pendekatan Konsep Polmas dalam rangka mewujudkan kamtibmas wilayah yang kondusif.

## BAB VII PENUTUP

Bab ini merupakan konklusi dari jawaban pertanyaan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dan pemaknaan penulis difungsikan sebagai alat untuk menjawab Hipotesa Penelitian yang dijelaskan dalam subbab Kesimpulan. Kemudian diberikan Saran atau Rekomendasi sebagai saran untuk memperbaiki kinerja Polisi RW ke depan pada subbab tersendiri.

### 1.10 Pengertian-Pengertian

**Pembentukan** adalah proses, cara, perbuatan membentuk. (kamus besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional) Konteks kata ini adalah suatu proses yang ditempuh mulai dari konsep awal Polisi RW sampai dengan pelantikan anggota dan pengurus Polisi RW di Kecamatan Kebayoran Lama.

**Implementasi** adalah pelaksanaan, penerapan (kamus besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional).

**Kemampuan** (*ability*) adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakan.

([http://digilib.petra.ac.id/img-rep//jiunkpe/s1/eman/2008/jiunkpe-ns-s1-2008-31403361-9052-hanurda-chapter2\\_1\\_high.jpg](http://digilib.petra.ac.id/img-rep//jiunkpe/s1/eman/2008/jiunkpe-ns-s1-2008-31403361-9052-hanurda-chapter2_1_high.jpg))

**Polisi RW** adalah anggota polisi di tingkat Polsek yang ditugaskan mengemban fungsi Polmas dalam konteks peran dan fungsi Polri pada aspek binmas (pembinaan masyarakat). Konsep Polisi RW adalah suatu kebijakan dan strategi yg bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap Polisi, serta jalinan kerja sama proaktif dengan sumber daya masyarakat. Hal ini berarti diperlukan adanya Kepolisian yang handal, peran masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan perhatian yang besar terhadap hak asasi dan kebebasan individu. (Materi perkuliahan S2 KIK)

**Polmas** (Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya. ( Perkap no 7 tahun 2008 )

**Kamtibmas** adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.



## BAB II TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan kepustakaan pada penelitian ini berfungsi sebagai pengarah dalam mengorganisasikan, menjelaskan, memprediksi dan menganalisis fenomena sosial, pada institusi kepolisian khususnya Polsek Kebayoran Lama dalam peran dan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum. Polisi RW merupakan sasaran penelitian yang akan dilaksanakan secara sistematis obyektif melalui pola pikir penalaran ilmiah. Mendudukan konsep-konsep khusus pada konsep-konsep umum, sehingga benar bahwa konsep khusus merupakan bagian dari unsur konsep umum tersebut. Menyatakan bahwa hal-hal yang berlaku pada teori tersebut berlaku pula hal-hal khusus pada masalah obyek yang akan diadakan penelitian.

Di samping kepekaan teoritis yang ada pada peneliti, maka tinjauan kepustakaan ini menggunakan literatur yang berupa laporan-laporan dari hasil kajian penelitian, dan kajian teoritis berupa tulisan para ahli, serta tata cara penulisan ilmiah. Di samping itu juga dipergunakan catatan harian, dokumen-dokumen, naskah, rekaman, laporan, katalog dan sebagainya yang dipergunakan sebagai data pokok pengganti hasil interview. “Dalam suatu penelitian yang bersifat menerangkan dapat dipastikan tentu adanya teori-teori yang merupakan alat yang penting dari suatu ilmu pengetahuan, tanpa teori hanyalah ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan”.<sup>1</sup>

Beberapa konsep dan teori berikut akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian diantaranya:

### **2.1 Manajemen Operasional Polri**

Manajemen Operasional Polri adalah cara Polisi melaksanakan tugas pokoknya melalui operasi dengan prinsip-prinsip manajemen sehingga hasilnya bagus.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Mabes Polri, Manajemen Operasional Polri adalah

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1986, hlm. 32.

<sup>2</sup> Hadiman, *Panduan Kuliah dan Pelajaran Manajemen Operasional Polri di PTIK*, hal 2

suatu proses untuk menciptakan dan memelihara situasi kamtibmas yang mantap, secara efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh segenap kesatuan Polri.<sup>3</sup> Dalam penyelenggaraan manajemen operasional Polri, maka pimpinan Polri (Kepala Kesatuan baik di tingkat Mabes, Kewilayahan dan fungsi) terlibat dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Menyusun perencanaan-perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas operasional Polri.
- b. Mengorganisasikan unsur-unsur kesatuan yang meliputi personil, materiil, keuangan dan metoda-metoda untuk dihadapkan kepada sasaran tugas operasional Polri.
- c. Melaksanakan semua rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu dalam rangka menciptakan dan memelihara situasi kamtibmas yang mantap dan dinamik.
- d. Mengendalikan semua unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Polri.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan Manajemen Operasional Polri dapat dilaksanakan dengan baik, apabila dapat merumuskan 4 (empat) jiwa MOP, yang terdiri dari:

- a. Sasaran yang jelas, yaitu merupakan hal-hal yang dijadikan objek untuk ditangani/diselesaikan/dituntaskan pada waktu yang ditentukan dalam suatu operasi kepolisian.
- b. Kekuatan/ petugas yang jelas, yaitu merupakan pelibatan personil yang akan dilibatkan dalam menangani/menyelesaikan sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Cara bertindak (CB) yang jelas, yaitu merupakan kegiatan fungsi yang dipilih dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian dengan disesuaikan pada sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Pengendalian Operasi yang jelas, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara arah gerak dinamika pelaksanaan operasi

---

<sup>3</sup> Mabes Polri, *Manajemen Operasional Polri*, Jakarta, Mabes Polri, 1998, hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

kepolisian terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan.<sup>5</sup>

Dalam Manajemen Operasional Polri, dikenal adanya kegiatan Manajemen Operasional Tujuh Langkah yang meliputi:

- a. Perencanaan tugas yaitu pengambilan keputusan tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada saat yang akan datang agar dapat menentukan sasaran yang akan menjadi objek operasi kepolisian.
- b. *Briefing* yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan arahan/penyampaian informasi kepada anggota tentang tugas yang akan dilaksanakan.
- c. Persiapan pelaksanaan tugas yaitu kegiatan berupa pengecekan ulang terhadap kesiapan anggota unit sebelum melaksanakan tugas dilapangan.
- d. Pelaksanaan yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota unit sesuai rencana kegiatan yang telah disusun dengan sasaran, pembagian tugas dan cara bertindak yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan HTCK antar fungsi kepolisian maupun instansi terkait.
- e. Pengendalian Operasi yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan setelah sasaran yang tertuang dalam rencana kegiatan dipahami benar oleh anggota unit, sehingga baik sasaran, personil yang dilibatkan, maupun cara bertindak yang diinginkan dapat dimonitor dan dievaluasi.
- f. *De Briefing* yaitu kegiatan pelaporan secara “lisan” dari pelaksana kepada Kasatga, Pamapta dan atau Bamapta.
- g. Pelaporan yaitu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan dalam laporan hasil pelaksanaan tugas yang dibuat secara tertulis, dikaitkan dengan sasaran dan cara bertindak yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bibit. S. Rianto, *Manajemen Operasional Polri Di Polda Kaltim*, Kaltim, Polda Kaltim, 1998, hlm. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

## 2.2 Teori Fungsional Struktural

Lahirnya fungsionalisme struktural sebagai suatu perspektif yang berbeda dalam sosiologi memperoleh dorongan yang sangat besar lewat karya-karya klasik seorang ahli sosiologi Perancis, yaitu Emile Durkheim. Masyarakat modern dilihat oleh Durkheim sebagai keseluruhan organisme yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bila mana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat patologis. Sebagai contoh dalam masyarakat modern fungsi ekonomi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Bilamana kehidupan ekonomi mengalami suatu fluktuasi yang keras, maka bagian ini akan mempengaruhi bagian yang lain dari sistem itu dan akhirnya sistem sebagai keseluruhan. Suatu depresi yang parah dapat menghancurkan sistem politik, mengubah sistem keluarga dan menyebabkan perubahan dalam struktur keagamaan. Pukulan yang demikian terhadap sistem dilihat sebagai suatu keadaan patologis, yang pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya sehingga keadaan normal kembali dapat dipertahankan. Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai equilibrium, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial.

Fungsionalisme Durkheim ini tetap bertahan dan dikembangkan lagi oleh dua orang ahli antropologi abad ke-20, yaitu Bronislaw Malinowski dan A.R. Radcliffe-Brown. Malinowski dan Brown dipengaruhi oleh ahli-ahli sosiologi yang melihat masyarakat sebagai organisme hidup, dan keduanya menyumbangkan buah pikiran mereka tentang hakikat, analisa fungsional yang dibangun di atas model organis. Di dalam batasannya tentang beberapa konsep dasar fungsionalisme dalam ilmu-ilmu sosial, pemahaman Radcliffe-Brown (1976:503-511) mengenai fungsionalisme struktural merupakan dasar bagi analisa fungsional kontemporer.

Fungsi dari setiap kegiatan yang selalu berulang, seperti penghukuman kejahatan, atau upacara penguburan, adalah merupakan bagian yang dimainkannya dalam kehidupan sosial sebagai keseluruhan dan, karena itu

merupakan sumbangan yang diberikannya bagi pemeliharaan kelangsungan struktural (Radcliffe-Brown (1976:505)).<sup>7</sup>

Menurut Brown, Paradigma yang dianut dalam struktural fungsional yaitu memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan terdiri atas institusi yang secara fungsional saling bergantung. Brown adalah Darwinist sosial yang menekankan kepada kompetisi sosial yang paling fit untuk tetap survive. Dia banyak belajar dari sosiolog Perancis Durkheim tentang organ fisik atau badan yang bekerja sama untuk mendukung suatu badan hidup. Karirnya melejit setelah penelitian antropologinya tentang penduduk Andaman dan Aborigin menggunakan pendekatan fungsionalisme, namun banyak ilmuwan menuduh struktural fungsional adalah format reduksionis. Brown dapat dikelompokkan pada tokoh fungsionalisme klasik. Konsep fungsi oleh Brown didasarkan pada analogi antara kehidupan sosial dan kehidupan organik. Dia mencontohkan bahwa hukuman pada pelaku kriminal memiliki fungsi untuk menjaga keberlangsungan struktur.<sup>8</sup>

### 2.3 Teori Interaksi Sosial

Untuk mempelajari interaksi sosial digunakan pendekatan tertentu, yang dikenal dengan nama *interactionist perspective*. Di antara berbagai pendekatan yang digunakan untuk mempelajari interaksi sosial, dijumpai pendekatan yang dikenal dengan nama interaksionisme simbolik (*symbolic interactionism*). Pendekatan ini bersumber pada pemikiran George Herbert Mead. Dari kata interaksionisme sudah nampak bahwa sasaran pendekatan ini ialah interaksi sosial; kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi.

Apakah yang dimaksudkan di sini dengan simbol? Leslie White mendefinisikan simbol sebagai “*a thing the value or meaning of which is bestowed upon by those who use it*” (suatu nilai atau maksud yang dianugerahkan oleh mereka yang menggunakan nilai atau maksud itu). Jadi simbol merupakan sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang mempergunakannya. Menurut White makna atau nilai tersebut tidak berasal dari atau ditentukan oleh sifat-sifat yang secara intrinsik terdapat di dalam bentuk

---

<sup>7</sup> *Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim*, dalam <http://rumahmakalah.blogspot.com/2010/01/teori-stuktural-fungsional-emile.html>

<sup>8</sup> <http://tubiwityu.typepad.com/blog/2010/11/teori-hukum-part-ii.html>

fisiknya. Makna suatu simbol, menurut White, hanya dapat ditangkap melalui cara nonsensoris; melalui cara simbolik. Sebagai contoh: makna suatu warna tergantung pada mereka yang menggunakannya. Warna merah, misalnya, dapat berarti berani (merah berarti berani, dan putih suci), dapat berarti komunis (kaum merah), dapat pula berarti tempat pelacuran (daerah lampu merah). Warna putih dapat berarti suci, dapat berarti berkabung (pada orang Tionghoa), dapat pula berarti menyerah. Makna-makna tersebut tidak dapat ditangkap dengan pancaindera; sebagaimana telah dikemukakan White, makna-makna tersebut tidak ada kaitannya dengan sifat-sifat yang secara intrinsik terdapat pada warna. Hanya sama dengan sesuatu yang lain, misalnya air atau benda lain yang dianggap suci. Kesucian hewan tertentu (misalnya sapi di India), orang tertentu (orang suci di India), atau benda tertentu (seperti air, patung) tergantung pada makna yang diberikan oleh pihak yang menggunakannya; kesucian suatu benda tidak dapat diamati dengan pancaindera. Sebagaimana telah dikemukakan White, kesucian suatu benda, makhluk atau sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat yang secara intrinsik melekat pada benda, makhluk atau sesuatu yang lain itu.

Herbert Blumer, salah seorang penganut pemikiran Mead, berusaha menjabarkan pemikiran Mead mengenai interaksionisme simbolik. Menurut Blumer pokok pikiran interaksionisme simbolik ada tiga; yang pertama ialah bahwa manusia bertindak (*act*) terhadap sesuatu (*thing*) atas dasar makna (*meaning*) yang dipunyai sesuatu tersebut baginya. Dengan demikian tindakan (*act*) seorang penganut agama Hindu di India terhadap seekor sapi (*thing*) akan berbeda dengan tindakan seorang penganut agama Islam di Pakistan, karena bagi masing-masing orang tersebut sapi tersebut mempunyai makna (*meaning*) berbeda.

Blumer selanjutnya mengemukakan bahwa makna yang dipunyai sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antara seseorang dengan sesamanya. Mengapa dalam masyarakat kita warna merah bermakna berani, dan putih suci? Mengapa orang yang ideologinya radikal sering disebut kiri, sedangkan yang konservatif disebut kanan? Makna yang diberikan orang pada konsep merah, putih, kanan, kiri ini muncul dari interaksi sosial. Keberanian tidak melekat pada warna merah (sebagai telah disebutkan, dalam konteks lain warna

merah dapat diartikan sebagai komunisme atau tempat pelacuran) dan pandangan ideologis pun tidak ada kaitannya dengan arah kiri atau kanan (kecuali dalam konteks tertentu di masa lalu, di mana pandangan politik yang dianut seseorang pernah terkait dengan letak tempat duduknya dalam parlemen).

Pokok pikiran ketiga yang dikemukakan Blummer ialah bahwa makna diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran (*interpretative process*), yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Yang hendak ditekankan Blumer di sini ialah bahwa makna yang muncul dari interaksi tersebut tidak begitu saja diterima oleh seseorang melainkan ditafsirkan terlebih dahulu. Apakah seseorang akan menanggapi dengan baik ucapan selamat pagi atau *assalamualaikum*, tergantung pada penafsirannya apakah si pemberi salam tersebut beritikad baik ataukah beritikad buruk.<sup>9</sup>

#### 2.4 Teori Komunikasi

Komunikasi adalah peristiwa sosial, peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia yang lain. Mencoba menganalisa peristiwa sosial secara psikologis membawa kita pada psikologi sosial. Memang, bila ditanyakan di mana letak psikologi komunikasi, kita cenderung meletakkannya sebagai bagian dari psikologi sosial. Karena itu, pendekatan psikologi sosial adalah juga pendekatan psikologi komunikasi. Seorang psikologi komunikasi akan menggunakan pendekatan yang berbeda.

Colin Cherry (1964) mendefinisikan komunikasi sebagai “usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda. Memiliki bersama serangkaian peraturan untuk berbagai kegiatan mencapai tujuan”. Harnack dan Fest (1964) menganggap komunikasi sebagai “proses interaksi diantara orang untuk tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal”. Edwin Neuman juga (1948) mendefinisikan komunikasi sebagai “proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi”. Aliran sosiologi yang banyak mewarnai studi komunikasi ialah aliran *interaksi simbolik*.

Fisher menyebut empat ciri pendekatan psikologi pada komunikasi: penerimaan stimuli secara indrawi (*sensory reception of stimuli*), proses yang

---

<sup>9</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000, hlm. 37-39.

menjadi antara stimuli dan respons (*internal mediation of stimuli*), prediksi respons (*prediction of response*), dan penguatan respons (*reinforcement of responses*). Psikologi melihat komunikasi dimulai dengan dikenainya masukan kepada organ-organ penginderaan kita yang berupa data. Stimuli berbentuk orang, pesan, suara, warna-pokoknya segala hal yang mempengaruhi kita. Stimuli ini kemudian diolah dalam jiwa kita, dalam kotak hitam yang tidak pernah kita ketahui. Kita hanya mengambil kesimpulan tentang proses yang terjadi pada kotak hitam dari respons yang tampak. Kita mengetahui bahwa bila ia tersenyum, tepuk tangan, dan meloncat-loncat, pasti ia dalam keadaan gembira.

Psikologi komunikasi juga melihat bagaimana respons yang terjadi pada masa lalu dapat meramalkan respons yang akan datang. Kita harus mengetahui sejarah respons sebelum meramalkan respons individu masa ini. Dari sinilah timbul perhatian pada gudang memori (*memory storage*) dan *set* (penghubung masa lalu dan masa sekarang). Salah satu unsur sejarah respons ialah pengetahuan. Penguatan adalah respons lingkungan (atau orang lain pada respons organisme yang asli). Bergera dan Lambert menyebutnya *feedback* (umpan balik). Fisher tetap menyebutnya penguatan saja.<sup>10</sup>

Komunikasi efektif adalah proses interaksi antar individu ataupun kelompok yang dilakukan sehingga terbentuk secara perlahan yang disebut kepribadian. Proses penafsiran dari interaksi tersebut baik yang dilakukan oleh individu maupun lawannya yang diajak interaksi atau lingkungan.

Kepribadian terbentuk sepanjang hidup kita. Selama itu pula komunikasi menjadi penting untuk pertumbuhan pribadi kita. Melalui komunikasi kita menemukan diri kita, mengembangkan konsep diri, dan menetapkan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Hubungan kita dengan orang lain akan menentukan kualitas hidup kita. Bila orang lain tidak memahami gagasan Anda, bila pesan Anda menjengkelkan mereka, bila Anda tidak berhasil mengatasi masalah pelik karena orang lain menentang pendapat Anda dan tidak mau

---

<sup>10</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Edisi Revisi, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 7-16.

membantu Anda. Bila Anda selalu gagal untuk mendorong orang lain bertindak, Anda telah gagal dalam komunikasi. Komunikasi Anda tidak efektif.<sup>11</sup>

Salah satu persoalan di dalam memberi pengertian komunikasi, yakni banyaknya definisi yang telah dibuat oleh para pakar menurut bidang ilmunya. Hal ini disebabkan karena banyaknya disiplin ilmu yang telah memberi masukan terhadap perkembangan ilmu komunikasi, misalnya psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu manajemen, linguistik, matematika, ilmu elektronika dan lain sebagainya.

Begitu banyak sarjana tertarik mempelajari komunikasi telah melahirkan berbagai macam definisi yang bisa membingungkan jika tidak memahami hakikat komunikasi antarmanusia yang sebenarnya. Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin *Communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa Latin *Communico* yang artinya membagi (Cherry dalam Stuart, 1983).

Sebuah definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia (*human communication*) bahwa Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia (2) melalui pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.

Definisi-definisi yang dikemukakan di atas tentunya belum mewakili semua definisi komunikasi yang telah dibuat oleh banyak pakar, namun sedikit banyaknya kita telah dapat memperoleh gambaran seperti apa yang diungkapkan oleh Shannon dan Weaver (1949) bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi.

Karena itu jika kita berada dalam suatu situasi berkomunikasi, maka kita memiliki beberapa kesamaan dengan orang lain, seperti kesamaan bahasa atau kesamaan arti dari simbol-simbol yang digunakan dalam berkomunikasi.

---

<sup>11</sup> Edunet, *Mengasah Kemampuan Komunikasi Anak*, dalam <http://www.tempointeraktif.com/edunet/artikel/2003/02/03/edu,20030203-03,id.html>

Sedangkan prinsip komunikasi adalah kesamaan dalam berkomunikasi yang dapat diibaratkan sebagai dua buah lingkaran yang bertindihan satu sama lain. Daerah yang bertindihan itu disebut kerangka pengalaman (*field of experience*), yang menunjukkan adanya persamaan antara A dan B dalam hal tertentu, misalnya bahasa atau simbol.

Dari gambaran di atas, kita dapat menarik dua prinsip dasar komunikasi, yakni:

- a. Komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi (*sharing similar experiences*).
- b. Semakin luas kesamaan pengalaman (*the field of experience*) pihak-pihak yang berkomunikasi, semakin mudah dan semakin efektif, kemungkinannya tercipta suatu proses komunikasi, tetapi kalau daerah tumpang tindih ini makin mengecil dan menjauhi sentuhan kedua lingkaran, atau cenderung mengisolasi lingkaran masing-masing, maka komunikasi yang terjadi sangat terbatas. Bahkan besar kemungkinannya gagal dalam menciptakan suatu proses komunikasi yang efektif.<sup>12</sup>

## 2.5 Teori Koordinasi

Koordinasi merupakan pengaturan tata hubungan antara beberapa unit dalam satu organisasi dan atau antara beberapa individu dalam unit-unit organisasi dalam usaha bersama untuk tujuan atau sasaran bersama dengan cara yang efisien. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sondang P. Siagian:

Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula, dan koordinasi adalah suatu proses yang mengatur kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 17-21.

<sup>13</sup> Sondang P. Siagian, *Peranan Staf dalam Manajemen*, dalam Moekijat, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 6.

Sedangkan menurut Arifin Abdulrachman bahwa koordinasi itu merupakan hasil dari pengkoordinasian, seperti diungkapkan berikut:

Pengkoordinasian adalah kegiatan-kegiatan untuk menertibkan, sehingga segenap kegiatan manajemen maupun kegiatan pelaksanaan satu sama lain tidak simpang siur, tidak berlawanan dan dapat ditunjukkan pada titik arah penerapan tujuan dengan efisien (*ordo=orde=tertib*).<sup>14</sup>

Pengkoordinasian merupakan suatu fungsi manajemen bagian terpenting dari semua fungsi manajemen. Manajemen selalu mengandung kegiatan pengkoordinasian, seperti disampaikan oleh George R. Terry dalam konsepnya bahwa fungsi manajemen adalah *planning, organizing, actuating, dan controlling*.<sup>15</sup>

Dengan demikian maka jelas bahwa koordinasi adalah aktifitas berupa kesepakatan-kesepakatan dari suatu kegiatan yang diintegrasikan ke dalam suatu tindakan efisien. Namun demikian, koordinasi bukan merupakan suatu kegiatan proses tetapi adalah suatu aktifitas upaya (*effort*).

Sedangkan prinsip-prinsip koordinasi, menurut Moekijat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
- b. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.
- c. Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.
- e. Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama.

---

<sup>14</sup> Arifin Abdulrachman, *Kerangka Pokok-Pokok Manajemen Umum*, dalam Moekijat, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 9.

<sup>15</sup> Moekijat, *Koordinasi*..... *op.cit.* hlm. 12.

- f. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
- g. Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional semua pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.<sup>16</sup>

## 2.6 Konsep Perpolisian masyarakat (Polmas)

Konsep *Community Policing* dalam penyelenggaraan tugas Polri disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dengan cara dan dengan nama Indonesia. Tanpa menyempitkan kemungkinan penggunaan istilah yang berbeda terutama bagi keperluan akademis, secara formal oleh jajaran Polri, model tersebut diberi nama perpolisian masyarakat/ pemolisian masyarakat dan selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut “Polmas”.

Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri, adalah sebagai filosofi, kebijakan dan strategi organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi. Di sini Polisi dan masyarakat bekerja sama sebagai mitra untuk mengidentifikasi, menentukan skala prioritas dan memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi, seperti tindak kejahatan, narkoba, ketakutan akan tindak kejahatan, ketidak-tertiban sosial dan ketidaktertiban fisik, dan kekurangan/persoalan masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di wilayah di mana Polmas diterapkan. Polmas menuntut adanya komitmen dari keseluruhan jajaran organisasi kepolisian pada filosofi Polmas.

### a. Pengertian

Dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, disebutkan konsep Polmas mencakup 2 (dua) unsur: perpolisian dan masyarakat. Secara harfiah perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata “*policing*” berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini

<sup>16</sup> Moekijat, *Koordinasi*..... *Ibid.* hlm. 38.

perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/ teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya.

Masyarakat yang merupakan terjemahan dari kata “*Community*” (komunitas) dalam konteks Polmas berarti:

- 1) Warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan ataupun berupa pasar/ pusat belanja/ mall, kawasan industri, pusat/ kompleks olahraga, stasiun bus/ kereta api dan lain-lain.
- 2) Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten/ kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh kelompok berdasar etnis/ suku, kelompok berdasar agama, kelompok berdasar profesi, hoby dan sebagainya. Kelompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasar kepentingan (*community of interest*).

Sebagai suatu strategi, Polmas berarti model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

- 1) Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama.
- 2) Dalam pengertian pengelolaan terkandung makna bahwa masyarakat berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari cara pemecahan masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban termasuk pertikaian antar warga serta penyakit masyarakat dan masalah sosial lain yang bersumber dari dalam kehidupan mereka sendiri bagi terwujudnya suasana kehidupan bersama yang damai dan tentram.
- 3) Operasional konsep Polmas pada tataran lokal memungkinkan masyarakat setempat untuk memelihara dan menumbuh-kembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma sosial dan/ atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Siskamswakarsa yang dalam pengembangannya disesuaikan dengan kekinian penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat madani, sehingga tidak semata-mata merupakan pengadopsian dari konsep *community policing*.

Mengacu pada uraian di atas, Polmas pada hakekatnya mengandung 2 (dua) unsur utama yaitu:

- 1) Membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat

- 2) Menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal dengan memberdayakan potensi yang ada di masyarakat.

Sebagai suatu falsafah, Polmas mengandung makna suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/ kemanusiaan dan menampilkan sikap satuan dan saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup.

b. Perwujudan Polmas

1) Model Polmas dapat mengambil bentuk:

- a) Model Wilayah yaitu yang mencakup satu atau gabungan beberapa area/ kawasan pemukiman (RW/ RK/ dusun/ kelurahan). Pembentukan Polmas model ini harus lebih didasarkan pada keinginan masyarakat itu sendiri, walaupun proses ini bisa saja dilatarbelakangi oleh dorongan polisi.
- b) Model Kawasan yaitu satu kesatuan area kegiatan bisnis dengan pembatasan yang jelas (mall/ pusat perdagangan/ pertokoan/ perkantoran/ kawasan industri). Pembentukan Polmas model ini dapat dilakukan atas inisiatif polisi dan masyarakat.

2) Pembentukan Polmas mempersyaratkan:

- a) Adanya seorang petugas yang ditugaskan secara tetap untuk model kewilayahan dan sejumlah petugas yang ditugaskan secara tetap untuk model kawasan.
- b) Model kawasan mempersyaratkan adanya Pos (balai) sebagai pusat layanan kepolisian sedangkan model wilayah dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada kantor desa/ kelurahan atau tempat tinggal petugas.

- c) Adanya suatu forum kemitraan yang keanggotaannya mencerminkan keterwakilan semua unsur dalam masyarakat termasuk petugas dan pemerintah setempat.
- 3) Perwujudan Polmas sebagai suatu falsafah merasuk dalam sikap dan perilaku setiap anggota Polri yang mencerminkan pendekatan kemanusiaan baik dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepolisian maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- c. Operasionalisasi Polmas
- 1) Prinsip-prinsip Operasionalisasi Polmas meliputi:
    - a) **Transparansi dan Akuntabilitas.** Operasionalisasi Polmas oleh petugas dan Forum Kemitraan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat.
    - b) **Partisipasi dan Kesetaraan.** Operasionalisasi Polmas harus dibangun atas dasar kemitraan yang setara dan saling mendukung dengan menjamin keikutsertaan warga dalam proses pengambilan keputusan dan menghargai perbedaan pendapat.
    - c) **Personalisasi.** Petugas dituntut untuk memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi dari pada hubungan formal yang kaku dengan menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal di antara mereka.
    - d) **Penugasan Permanen.** Penempatan anggota Polri sebagai petugas merupakan penugasan yang permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat dalam wilayah yurisdiksi yang jelas batas-batasnya.

- e) Desentralisasi dan Otonomisasi. Operasionalisasi Polmas mensyaratkan adanya desentralisasi kewenangan yang meliputi pemberian tanggung jawab dan otoritas kepada petugas dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) sehingga merupakan pranata yang bersifat otonom dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah termasuk penyelesaian konflik antar warga maupun antara warga dengan polisi/ pejabat setempat.
- 2) Keefektifan operasionalisasi Polmas ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a) Perubahan pendekatan manajerial yang meliputi:
    - (1) Kapolsek bertanggung jawab menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas Polmas.
    - (2) Kapolres bersama staf terkait bertanggung jawab memperoleh dan menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk pemecahan masalah.
  - b) Perubahan persepsi di kalangan segenap anggota kepolisian setempat bahwa masyarakat adalah *stakeholder* bukan saja kepada siapa polisi memberikan layanan tetapi juga kepada siapa mereka bertanggung jawab.
  - c) Pelaksanaan tugas setiap anggota satuan fungsi operasional Polri harus dijiwai dengan semangat melayani dan melindungi sebagai suatu kewajiban profesi.
  - d) Kerjasama dan dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD serta segenap komponen terkait, yaitu: instansi pemerintah terkait, pengusaha, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan (termasuk LSM) dan media massa (media elektronik dan media cetak).
- d. Tujuan Penerapan Polmas
- 1) Tujuan penerapan Polmas adalah terwujudnya kerjasama polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi

kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat.

- 2) Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan ke luar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri serta dalam batas-batas tertentu mengambil tindakan pertama jika terjadi kejahatan atau bahkan menyelesaikan pertikaian antar warga sehingga tidak memerlukan penanganan melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana.
- 3) Menciptakan ketentraman umum mengandung makna bahwa yang dituju oleh Polmas bukan hanya sekadar ketiadaan gangguan faktual terhadap keamanan dan ketertiban tetapi juga perasaan takut warga dalam kehidupan bersama dalam komunitas mereka.
- 4) Kerjasama polisi dan masyarakat mengandung makna bukan sekadar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial saja tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan/pengendalian dan analisis/ evaluasi atas pelaksanaannya. Karena itu, sebagai suatu tujuan, kerjasama tersebut merupakan proses yang terus menerus tanpa akhir.

e. Sasaran Penerapan Polmas

- 1) Untuk memungkinkan terbangunnya kerjasama yang menjadi tujuan penerapan Polmas maka sasaran yang harus dicapai adalah membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat dan membangun komunitas yang siap bekerjasama dengan Polri dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketentraman warga setempat.

- 2) Polri yang dapat dipercaya tercermin dari sikap dan perilaku segenap personel Polri, baik dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari komunitas maupun dalam pelaksanaan tugas mereka, yang menyadari bahwa warga komunitas adalah *stakeholder* kepada siapa mereka dituntut untuk menyajikan layanan kepolisian sebagaimana mestinya.
- 3) Komunitas yang siap bekerjasama adalah kesatuan kehidupan bersama warga yang walaupun dengan latar belakang kepentingan yang berada memahami dan menyadari bahwa kepentingan penciptaan situasi keamanan dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama antar warga dan antara warga dengan polisi.

f. Kebijakan Penerapan Polmas

- 1) Sebagaimana diutarakan sebelumnya, Polmas bukan hanya semacam program dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian tetapi merupakan suatu metafora yang menuntut perubahan yang mendasar ke arah personalisasi penyajian layanan kepolisian. Perubahan demikian sudah barang tentu akan membawa konsekuensi dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai aparat penegak hukum dalam suatu masyarakat demokratis yang menjunjung supremasi hukum seperti di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan dasar yang harus diletakkan adalah bahwa penerapan Polmas hanya direalisasikan pada level lokal terutama lingkungan komunitas yang mencerminkan kehidupan bersama yang komunitarian.
- 2) Penerapan Polmas secara lokal tidak berarti bahwa prosesnya hanya dilakukan terbatas pada tataran operasional tetapi harus berlandaskan pada kebijakan yang komprehensif mulai dari tataran konseptual pada level manajemen puncak.
- 3) Sebagai suatu pendekatan yang bersifat komprehensif maka kebijakan penerapan Polmas menyangkut bidang-bidang organisasi/ kelembagaan, manajemen sumberdaya manusia,

manajemen logistik, dan manajemen anggaran/ keuangan serta manajemen operasional Polri.

- 4) Dalam bidang organisasi/ kelembagaan, kebijakan yang digariskan meliputi:
  - a) Penyelenggaraan fungsi pembinaan Polmas harus distrukturkan dalam suatu wadah organisasi tersendiri yang dapat dihimpun bersama fungsi-fungsi terkait, mulai dari tingkat Markas Besar sampai sekurang-kurangnya pada tingkat Polres.
  - b) Petugas merupakan ujung tombak (*community officer*) yang berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan beroperasinya Polmas dan sekaligus penghubung antara kesatuan Polri dan komunitas setempat.
  - c) Penilaian keberhasilan pimpinan suatu organisasi pada tingkat operasional (Polsek/ Polres) lebih di tekankan pada kemampuannya untuk mengembangkan dan menjamin keefektifan Polmas di samping aspek-aspek lainnya.
  - d) Penerapan Polmas memprasyaratkan adanya kesamaan komitmen dan kerjasama dengan segenap instansi terkait terutama pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya lokal dan yang pada gilirannya ikut memetik manfaat dari keberhasilan Polmas dalam peningkatan kesejahteraan warganya.
- 5) Dalam bidang manajemen sumberdaya manusia, kebijakan yang digariskan meliputi:
  - a) Penambahan kekuatan personel Polri harus secara bertahap memperhitungkan pemenuhan kebutuhan tenaga petugas sehingga setiap desa/ kelurahan diharapkan dapat terisi dengan sekurang-kurangnya seorang petugas.
  - b) Kurikulum setiap program pendidikan pertama dan pengembangan umum harus mencakup mata pelajaran/

mata kuliah Polmas yang silabus dan satuan acara pelajaran/ perkuliahannya disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikannya.

- c) Pada setiap Polda atau sekurang-kurangnya gabungan dari beberapa Polda tetangga harus diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali program pelatihan khusus tentang Polmas setiap tahun dalam rangka penyegaran pengetahuan dan/ atau regenerasi petugas.
  - d) Pemilihan personel untuk ditugaskan sebagai petugas harus memperhitungkan latar belakang pengalaman tugas pada satuan-satuan fungsi operasional dan aspek moral/ kepribadian yang mendukung pelaksanaan misinya sebagai petugas.
  - e) Sistem pembinaan personel harus menjamin terbukanya peluang peningkatan karier yang proaktif bagi petugas/ pembina Polmas yang dinilai berhasil membina dan mengembangkan Polmas.
- 6) Dalam bidang manajemen logistik, program pengadaan materil Polri harus secara bertahap memperhitungkan pemenuhan kebutuhan peralatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan misi petugas sehingga petugas pada setiap desa/ kelurahan diharapkan dapat dilengkapi dengan sepeda motor dan alat komunikasi.
- 7) Dalam bidang manajemen anggaran/ keuangan, kebijakan yang digariskan meliputi:
- a) Perhitungan rencana anggaran Polri harus mengalokasikan biaya operasional yang selukupnya untuk menjamin aktivitas dan dinamika pelaksanaan tugas Polmas termasuk biaya manajemen pada setiap tingkatan organisasi dalam rangka secara terus menerus memantau, mengawasi/ mengendalikan, mengarahkan dan menilai keberhasilan pelaksanaan penerapan Polmas.

- b) Untuk mengembangkan program-program Polmas, masing-masing kesatuan kewilayah dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga donor baik internasional maupun nasional dan lokal.
  - c) Untuk menjamin keberlangsungan Polmas masing-masing kesatuan kewilayah perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat sehingga operasionalisasi Polmas dapat merupakan program pemerintah daerah yang didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan.
- 8) Dalam bidang operasional, kebijakan yang digariskan meliputi:
- a) Penerapan Polmas sebagai suatu strategi diimplementasikan hanya pada tataran lokal di mana model perpolisian dioperasionalisasikan.
  - b) Penerapan Polmas sebagai suatu falsafah diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas masing-masing satuan fungsi operasional Polri termasuk tampilan setiap personel Polri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>17</sup>

g. Indikator Keberhasilan Polmas

Tujuan dari Polmas adalah untuk mencegah serta menanggulangi kriminalitas dan ketidaktertiban, dengan mengkaji secara seksama karakteristik persoalan yang ada dalam masyarakat dan menerapkan solusi yang tepat bagi penanggulangannya. Dengan tercapainya tujuan ini, maka secara otomatis kualitas kehidupan masyarakat akan bertambah baik.

Untuk mencapai keberhasilan itu ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dapat menjadi indikasi awal bagi kemungkinan keberhasilan penerapan Polmas:

---

<sup>17</sup> Mabes Polri, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang *Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*, Jakarta, Mabes Polri, 2005, hlm. 5-12

- 1) Adanya perubahan struktur dan manajemen internal organisasi Polri.
- 2) Implementasi dilakukan dalam ruang lingkup wilayah yang kecil dan terbatas.
- 3) Terciptanya hubungan serta komunikasi dari hati ke hati antara aparat dengan warga masyarakat.
- 4) Petugas mampu memahami berbagai gejala yang ada dalam masyarakat dan mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya kejahatan.
- 5) Petugas mampu merencanakan aktifitas, program, tindakan bersama masyarakat untuk mencegah dan mengatasi kejahatan, serta hal-hal lain yang dapat merugikan masyarakat.
- 6) Terciptanya dan terpeliharanya keteraturan sosial serta rasa aman bagi masyarakat.
- 7) Petugas mampu mengevaluasi apa yang telah dilakukan untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan serta sebagai acuan dalam memahami gejala sejenis yang mungkin muncul di masa mendatang atau di kelompok masyarakat lainnya.
- 8) Petugas mampu memberikan penerangan atau penyuluhan bila diminta oleh warga dalam berbagai permasalahan sosial yang mereka hadapi.
- 9) Petugas tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan polisi tidak dipercaya oleh masyarakat.
- 10) Petugas mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya yaitu ditunjukkan telah terbentuknya berbagai forum kemitraan.
- 11) Kehadiran dan performa petugas mampu meningkatkan produktifitas masyarakat.

Di sini nampak bahwa indikasi-indikasi awal bagi keberhasilan Polmas ini merupakan suatu awalan bagi indikator lainnya, yang pada akhirnya bermuara pada suatu indikator utama, yaitu adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di mana masyarakat merasa leluasa untuk menjalankan aktifitas kehidupannya, bekerja dan bersosialisasi tanpa merasa takut akan ancaman kejahatan serta meningkatkan produktifitasnya.

Dalam Implementasi Polmas ini untuk sebagai wadah untuk komunikasi dan membangun kemitraan serta pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah melalui Forum Kemitraan Polisis Masyarakat (FKPM). Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat disingkat FKPM dibentuk pada tingkat desa/ kelurahan, Polsek, Polres, dan tingkat organisasi Polri lainnya sesuai kebutuhan .

## 2.7 Konsep Polisi RW

Fungsi kepolisian yang pertama dan utama idealnya adalah mencegah timbulnya kejahatan secara jelas dan nyata. Namun dalam realita seakan hal pencegahan kejahatan bukan misinya. Kepolisian menilai kinerjanya secara *self appreciations* berdasarkan standar pengungkapan kasus/ penyelesaian perkara. Memang di sini terjadi suatu dilema bagi tugas kepolisian, apabila kejahatan menurun seakan polisi hanya santai/ rileks saja. Masyarakat melihat dan menilai tugas polisi (karena situasi aman) adalah pekerjaan yang *satisfied* (enak & ringan). Pada *event* inilah fungsi polisi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, bahwa menciptakan kondisi aman memerlukan suatu strategi yang tidak gampang. Diperlukan suatu sinergitas yang komplek dari seluruh sumber daya (elemen kemasyarakatan) yang ada di wilayah tanpa terkecuali tentunya di samping institusi kepolisian yang telah *solid* terlebih dahulu.

Diperlukan adanya usaha yang intensif dan luas untuk menemukan pendekatan baru yang lebih efektif. Kepolisian di wilayah (setingkat Polsek) menyikapi adanya fenomena seperti tersebut di atas berupaya dan harus mampu membangun sinergitas dengan masyarakat di wilayah hukumnya dengan membentuk Polisi Rukun Warga. Dasar pembentukan Polisi Rukun Warga berdasarkan pemikiran sebagai berikut:

- a. Bahwa polisi tidak dapat mencegah kejahatan tanpa bantuan masyarakat. Polisi tidak dapat memecahkan sendiri masalah kejahatan dalam masyarakat. Mereka membutuhkan bantuan masyarakat untuk memberi peringatan kemungkinan calon penjahat, serta memberikan

informasi yang mengarah kepada penangkapan dan penghukuman penjahat. Pencegahan kejahatan bukanlah suatu layanan yang diberikan kepada masyarakat; tugas ini juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan masyarakat. Masyarakat harus menjadi mitra dalam mewujudkan keamanan masyarakat<sup>18</sup>.

- b. Bahwa polisi harus berbuat lebih banyak daripada bereaksi terhadap terjadinya kejahatan. Sumber daya kepolisian harus disebar secara proaktif untuk menghadapi kejahatan, yang berarti mengawasi keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan kejahatan. Polisi menghabiskan hampir semua waktunya untuk bereaksi terhadap kejahatan dan sedikit sekali dari waktu mereka yang digunakan benar-benar untuk mencegah kejahatan. Hal ini perlu disadari bahwa kejahatan dan kekacauan tidak tersebar secara merata. Kejahatan dapat diantisipasi terutama di tempat terjadinya kejahatan tersebut. Dengan kata lain, kepolisian seharusnya memusatkan sumber daya manusianya pada tempat-tempat khusus, apabila mereka dapat mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan di sana untuk mencegah kejahatan.
- c. Bahwa kegiatan patroli yang dilakukan masih kurang intensif karena luasnya wilayah. Kehadiran polisi, yang ditujukan untuk mencegah kejahatan, tidak cukup hanya kelihatan saja. Patroli-patroli yang bergerak, tidak meyakinkan masyarakat ataupun memperingatkan mereka akan terjadi kejahatan. Yang dilakukan oleh polisi adalah membantu secara aktif dan terlihat nyata dalam menciptakan suatu iklim kamtibmas yang kondusif, terutama di lokasi-lokasi tempat pemusatan kejahatan. Langkah yang dilakukan oleh polisi ini sewaktu sedang tidak bertugas, dengan mengatur tingkah laku masyarakat yang bukan merupakan tindak kejahatan, tetapi mengganggu ketenangan, menimbulkan kecemasan atau bahkan ketakutan warga masyarakat terhadap kelompok ini. Polisi harus mengambil peran aktif dalam membantu mengurangi tanda-tanda kejahatan fisik seperti sampah bertebaran, gedung yang kosong, corat-coret, mobil rongsokan, dan

---

<sup>18</sup> Ostrom, Eleanor, 1978, "The Public Service Production Process : A Framework for Analyzing Services", *Police Studies Journal* vol.7. Hal.381-389.

lampu jalan yang rusak sehingga membuat wilayah tersebut tampak tidak aman, ditelantarkan dan tidak diawasi. Tujuan patroli adalah membantu untuk menciptakan tatanan moral yang jelas (pranata-pranata sosial) sesuai dengan standar masyarakat setempat<sup>19</sup>.

- d. Ketiga wawasan tersebut harus dijadikan memotivasi kepolisian khususnya Polisi RW dalam membentuk dasar-dasar pemikiran kembali strategi yang dikenal secara teoritis sebagai kegiatan polisi dalam pengamanan masyarakat yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk Polisi Rukun Warga di tingkat Polsek.

Polisi RW ini secara legalistik berlandaskan kepada pasal 2 dan pasal 13, UU No. 2/2002, sedangkan di dalam implementasinya lebih merupakan jembatan antara warga masyarakat yang dinaunginya secara hukum dengan institusi Polsek. Polisi RW sekaligus merupakan wakil Polri pada tingkat Rukun Warga (RW) yang membawahi Rukun Tetangga (RT) dalam mengupayakan kondisi kamtibmas wilayah yang merupakan tanggung jawabnya. Peran Polisi RW sangat berbeda dengan Babinkamtibmas pada tingkat kelurahan/ desa. Perbedaan ini terletak pada tugas pokok, yaitu fungsi *represif*. Polisi RW tidak akan melakukan tindakan represif dalam menjalankan tugasnya (kecuali hal-hal khusus, misalnya tertangkap tangan pada saat melakukan tindak pidana yang kemudian dilanjutkan ke tingkat Polsek). Jadi pada dasarnya, Polisi RW mempunyai tugas menyediakan pelayanan masyarakat secara proaktif untuk membangun hubungan dan kerjasama antara Polri dengan masyarakat. Tugas Polisi RW ini diuraikan secara garis besar, sebagai berikut:

- a. Menyosialisasikan kebijakan Polri berkait dengan perundang-undangan yang berlaku terhadap fungsi pre-emptif, preventif dan represif kepada masyarakat.
- b. Mencari dan menemukan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat secara aktif dan berusaha untuk mengatasinya.

---

<sup>19</sup> Wilson, James Q & Kelling, George L, 1982, “*Broken Windows : The Police and Neighborhood Safety*”, Atlantic Monthly, March, 1982. Hal. 29-38.

- c. Memberikan penyuluhan tentang kamtibmas wilayah diantaranya, cara mencegah pencurian, kebakaran, kerusakan alam, penyelesaian konflik antar warga dan lain-lain.
- d. Membangun informasi tentang kerawanan sosial, politik serta gejala-gejala yang ditengarai akan menimbulkan gangguan keamanan masyarakat untuk didistribusikan langsung kepada Kapolsek.

## 2.8 Teori Broken Windows

Teori Broken Windows yang dikemukakan oleh George L. Kelling dan James Q. Wilson dalam tulisannya yang dimuat dalam majalah *The Atlantic Monthly*, March 1982, pada dasarnya menggunakan perumpamaan jendela rusak untuk menggambarkan hubungan antara ketertiban dengan kejahatan, yang dijelaskan sebagai berikut :

*if a window in a building is broken and is left unrepaired, all the rest of the windows will soon be broken ... One unrepaired broken window is a signal that no one cares, and so breaking more windows cost nothing (Kelling & Wilson, 1982).*

Selain pernyataan tersebut, Kelling & Wilson dalam sumber yang sama juga menyatakan bahwa :

*Serious street crimes flourishes in areas in which disorderly behavior goes unchecked. The unchecked panhandlers, in effect, the first broken window, Muggers and robbers, whether opportunistic or professional, believe they reduce their chances of being caught or even identified if they operate on streets where potential victims are already intimidated by prevailing conditions. If the neighborhood can not keep a bothersome panhandler from annoying passerby, the thief may reason, it is even less likely to call the police to identify a potential mugger or to interfere if the mugging actually take place. (Kelling & Wilson, 1982:20).*

Ketidaktertiban adalah perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam bentuk ekstrim perilaku ini berbentuk kejahatan serius, dalam bentuk biasa ketidaktertiban merupakan pelanggaran hukum kecil namun mengganggu ketertiban masyarakat karena menciptakan ketakutan dan kondisi yang dapat menimbulkan kejahatan. Berkaitan dengan hal ini Kelling dan Wilson mengatakan :

*By disorder we refer specifically to agresive panhandling, street prostitution, drunkenness and public drinking, menacing behavior,*

*harrasment, obstruction of streets and public space, vandalism and grafitti, public urination and defecation, unlicensed vending and peddling, unsolicited window washing of cars (squeegeeing), and other such act (Kelling & Wilson, 1982:25).*

Memperbaiki jendela rusak diibaratkan adalah suatu kegiatan Kepolisian yang menekankan perpaduan segenap potensi masyarakat yang ada dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan pada tingkat yang masih kecil atau awal. Tumbuh dan timbulnya tindak kejahatan dimulai dari perilaku tidak tertib yang apabila dibiarkan akan tumbuh menjadi tindak kejahatan yang besar.

Dalam bukunya *Fixing Broken Windows* yang disadur oleh Kunarto dari George L. Kelling & Catherine M. Coles (1996) menyebutkan bahwa terdapat empat unsur dalam melakukan perbaikan jendela yang rusak yang akan dapat mengurangi jumlah kejahatan. Keempat unsur tersebut, antara lain :

1. Menangani ketidaktertiban dan para pelanggar hukum kecil-kecilan, menginformasikan kepada Polisi dan memungkinkan Polisi untuk mengungkap eksistensi kejahatan.
2. Sangat jelasnya tindakan dan konsentrasi kegiatan Polisi terhadap ketidaktertiban akan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Polisi aktif melindungi orang-orang yang baik dan sekaligus memberikan sinyal kepada warga masyarakat yang tidak punya kepedulian terhadap ketertiban dan kepada masyarakat yang cenderung melanggar hukum secara kecil-kecilan.
3. Penduduk sendiri mulai melaksanakan pengawasan terhadap tempat-tempat umum dengan menegakkan berbagai standar perilaku masyarakat pada akhirnya bermuara ke tahap inti dalam proses pemeliharaan ketertiban dan pencegahan kejahatan.
4. Sewaktu permasalahan ketidaktertiban dan kejahatan menjadi tanggung jawab bukan saja oleh Polisi melainkan juga seluruh masyarakat, termasuk badan-badan dan lembaga di luar perkampungan tetapi berkaitan dengan itu semua akan memobilisasi untuk menanganinya secara terpadu. (Kunarto, 1998:373-374)

Permasalahan ketidaktertiban dan kejahatan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polisi melainkan juga seluruh warga masyarakat, sehingga seluruh warga masyarakat perlu didorong untuk menganganinya atau setidaknya berperan aktif dalam penanganan setiap ancaman dan tindak kejahatan secara terpadu. Melalui upaya yang berlandaskan keterpaduan ini akan dapat diperoleh sumber daya yang dapat dimobilisasi dalam melakukan pemecahan masalah ketertiban masyarakat. Berbagai bentuk Pam Swakarsa yang dibentuk warga bersama Polisi adalah suatu bentuk mobilisasi masyarakat dalam menangani ketidaktertiban.

## 2.9 Analisa SWOT

Analisis SWOT merupakan penilaian atau *assesment* terhadap hasil identifikasi situasi, untuk menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan kekuatan-kelemahan (internal) atau peluang-kendala (eksternal). Dengan demikian analisis SWOT adalah teori yang menganalisis strategi organisasi dengan memanfaatkan faktor eksternal dan internal yang terdiri dari peluang dan kendala eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal.

Analisis SWOT digunakan untuk memilih alternatif-alternatif strategi yang akan dilakukan dalam merencanakan kegiatan jangka pendek, sedang dan jangka panjang (Freddy Rangkuti, 2006 : 10). Analisis SWOT sebenarnya merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenght*) dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan kendala (*Threat*). Hal ini berarti bahwa pada analisis SWOT harus dianalisis faktor-faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.

Kekuatan adalah suatu kemampuan atau kondisi yang dapat dicapai organisasi dengan baik atau karakteristik-karakteristik tertentu yang dapat meningkatkan kinerja dan profesionalismenya. Kelemahan adalah suatu kemampuan atau kondisi yang tidak atau kurang dapat dicapai organisasi dengan baik, atau kondisi yang meletakkan organisasi pada posisi yang tidak menguntungkan. Peluang adalah faktor-faktor eksternal penting yang dapat

dimanfaatkan secara maksimal untuk membentuk atau mengembangkan strategi organisasi. Sedangkan ancaman adalah faktor eksternal yang dapat mengancam kemampuan dan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga eksistensinya tidak mendukung atau bahkan dapat mendatangkan kerugian.

Pengujian eksternal dan internal yang terstruktur ini yang kemudian dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan strategis. Pengujian dilakukan terutama dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang untuk meminimalkan kelemahan dan ancaman. Sedangkan keputusan strategis yang akan dijalankan harus dikaitkan dengan visi dan tujuan organisasi.

Sekalipun dalam tataran implementasi analisis SWOT dianggap sebagai suatu hal yang mudah namun kadang kala manajer menghadapi masalah dalam analisis ini. Menurut Bawono (2007), masalah-masalah tersebut terutama terkait dengan hilangnya unsur keterkaitan, yaitu gagalnya menghubungkan evaluasi terhadap faktor internal dan evaluasi terhadap faktor eksternal, terlalu cepat dalam pengambilan keputusan, adanya kondisi yang tidak menguntungkan sebagai akibat meremehkan pengaruh dari ancaman lingkungan, terlalu fokus pada kelemahan organisasi, dan dalam merumuskan strategi yang tepat sesuai kondisi internal dan eksternal yang dihadapi.

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan Internal *Strengths* dan *Weakness* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*strengths*) dan Kelemahan (*weakness*).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Freddy Rangkuty, 2009, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus*, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk menghadapi Abad 21, Cet. Ke 16, Jakarta, Ikrar Mandiri Abadi.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

#### 3.1 Wilayah

Kecamatan Kebayoran Lama terletak di Jakarta Selatan. Kebayoran Lama dahulu adalah wilayah terbarat dari Kotamadya Jakarta Selatan. Namun semenjak dimekarkan menjadi dua kecamatan baru, Kebayoran Lama dan Pesanggrahan, maka sebagian wilayah kelurahan Kebayoran Lama masuk ke dalam wilayah Pesanggrahan yang merupakan wilayah terbarat dari Kota Jakarta Selatan.

Konon, nama Kebayoran berasal dari kata Bahasa Betawi *kabayuran*, yang artinya tempat penimbunan kayu bayur (*pterosperrum javanicum*). Kayu bayur tersebut dianggap sangat baik karena kuat dan tahan terhadap serangan rayap.

Sampai sebelum kemerdekaan Indonesia, Kebayoran adalah sebuah distrik yang dikepalai oleh seorang wedana. Ia adalah bagian dari Kabupaten Meester Cornelis, yang wilayahnya sampai meliputi Ciputat. Kira-kira tahun 1938, Pemerintah Hindia Belanda merencanakan sebuah lapangan terbang internasional, yang batal terwujud karena Perang Dunia Kedua. Pemerintah Indonesia akhirnya mengembangkan areal tersebut menjadi wilayah Kebayoran Baru tahun 1969, sedangkan daerah lainnya menjadi wilayah Kebayoran Lama. Tahun 1990, sebagian wilayah Kebayoran Lama kembali dipisahkan untuk menjadi wilayah Pesanggrahan.

Wilayah Kebayoran Lama membentang dari Pertigaan Rawa Belong, Kemandoran, Palmerah hingga di selatan yakni Pasar Jumat, Ciputat, dan Lebak Bulus. Wilayah ini terdapat sejumlah mall mulai dari ITC Permata Hijau, hingga Pondok Indah Mall. Wilayah yang masih rindang terutama di sepanjang jalan Raya Kebayoran Lama menjadikan tempat ini cukup asri dan masih hijau guna menyegarkan mata.

Wilayah elit Permata Hijau dipenuhi sejumlah *real estate*, perumahan, apartemen, dan kondominium tingkat atas. Di sebelah selatan, Pondok Indah

memiliki sejumlah perumahan yang masih hijau di sepanjang jalan Metro Pondok Indah. Apartemen dan kondominium mewah pun tak luput dari tempat ini.

### 3.1.1 Geografi

Luas wilayah tercatat 1,931.52. Ha, untuk Kecamatan Keb. Lama dengan perincian sebagai berikut :

**TABEL 3.1**  
**JUMLAH KELURAHAN, LUAS DAERAH, RT DAN RW**

No	Kelurahan	Luas (Ha)	KK	RT	RW
1.	Kel. Grogol Utara	332,50		165	16
2.	Kel. Grogol Selatan	286,55		115	11
3.	Kel. Cipulir	193,3		240	11
4.	Kel. Keb. Lama Utara	178,22		106	10
5.	Kel. Keb. Lama Selatan	257,22		142	12
6.	Kel. Pondok Pinang	684,00		187	17

Sumber: Intel Dasar Polsek Kebayoran Lama, 2011

Tabel 3.1 menunjukkan data wilayah Kecamatan Kebayoran Lama dengan luas wilayah 1,931.52. Ha, meliputi 6 Kelurahan, 77 RW, dan 187 RT.

Menurut Camat Kebayoran Lama, Budi Wibowo dikatakan bahwa:

Secara administratif pemerintahan sipil, saya sebagai Camat Kebayoran Lama memiliki lahan yang menjadi tanggung jawab kecamatan seluas 1.931, 52 Ha. Sebenarnya dibandingkan dengan kecamatan lain di jajaran Pemkot Jakarta Selatan relatif luas, hal ini dikarenakan, wilayah Kebayoran Lama termasuk agak berada di pinggiran.<sup>1</sup>

Data ini dibenarkan oleh Sumber Informasi lain, yang mengatakan bahwa:

Karakteristik geografis Kecamatan Kebayoran Lama ini merupakan dataran rendah dan memiliki luas wilayah yang relatif besar jika dibandingkan dengan luas wilayah yang

<sup>1</sup> Wawancara dengan Budi Wibowo, SH., MSi., Camat Kebayoran Lama

menjadi tanggung jawab Polsek lain di jajaran Polres Metro Jakarta Selatan.<sup>2</sup>

Demikian pula menurut sumber informasi Muhamad Fajar Santoso, menuturkan:

Wilayah kerja saya di Kelurahan Grogol Utara ini paling luas yaitu 332,50 Ha, yang terdiri dari 165 Rukun Tetangga dan 16 Rukun Warga, jadi paling besar dibanding kelurahan lainnya di Kecamatan Kebayoran Lama.<sup>3</sup>

### 3.1.2 Demografi

**TABEL 3.2**  
**JUMLAH PENDUDUK PER KELURAHAN**

No	Kelurahan	WNI (Jiwa)	WNA (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Pondok Pinang	62.819	30	62.849
2	Kebayoran Lama Selatan	42.679	23	42.702
3	Kebayoran Lama Utara	41.875	4	41.879
4	Cipulir	34.854	10	34.864
5	Grogol Selatan	40.719		40.719
6	Grogol Utara	42.429	33	42.462
	<b>Jumlah</b>	<b>265.375</b>	<b>100</b>	<b>265.475</b>

Sumber: Intel Dasar Polsek Kebayoran Lama, 2011

Tabel 3.2 menunjukkan pembagian penduduk per kelurahan, Pondok Pinang merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak (62.819), sedangkan Kelurahan Cipulir paling sedikit penduduknya (34.854 jiwa). Daerah hukum Polsek Metro Kebayoran Lama berpenduduk 265.375 jiwa dengan kepadatan 125 jiwa/ Km berdomisili di Kecamatan Kebayoran Lama

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Kebayoran Lama, AKP. Teguh Sukmawati

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kepala Kelurahan Grogol Utara, Muhamad Fajar Santoso, S.Sos.

### 3.1.3 Kesatuan Polsek Kebayoran Lama

Polsek Kebayoran Lama selaku Institusi Polri dalam mengemban fungsi keamanan dan ketertiban, dituntut untuk dapat menjamin terpeliharanya situasi dan kondisi kamtibmas dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan supremasi hukum dan HAM diharapkan lebih profesional guna menjamin terwujudnya situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif. Meskipun disisi lain Polsek Kebayoran Lama masih memiliki segala keterbatasan sumber daya yang ada.

Untuk menciptakan situasi yang aman di wilayah hukum Polsek Kebayoran Lama diperlukan suatu kerjasama yang nyata antara polisi dan masyarakat. Wujud kerjasama ini merupakan imlementasi polmas, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2008, bahwa pengemban polmas pada dasarnya adalah seluruh anggota polisi mulai dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi.

Sebenarnya implementasi polmas di wilayah Kebayoran Lama telah dilaksanakan, namun demikian setelah dilakukan evaluasi masih ditemukan kekurangan-kekurangan yang pantas untuk ditingkatkan, sehingga pada akhirnya Polsek Kebayoran Lama akan mengefektifkan kebijakan yang telah ada yaitu implementasi Polmas dengan mengedepankan personel dari unit sabhara dan anggota polsubsektor.

Menurut Waka Polsek Kebayoran Lama, AKP Riftazudin, S.Kom :

Polsek Kebayoran Lama membawahi 3 Polsubsektor yaitu Polsubsektor Permata Hijau, Polsubsektor Pasar, dan Polsubsektor Pondok Indah. Jumlah personel Polsek Kebayoran Lama adalah 128 anggota Polri yang terdiri dari 10 (sepuluh) perwira dan 122 Bintara. Perwira Menengah satu orang (Kapolsek), 5 (lima) AKP dan 4(empat) Ipda.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Wakapolsek Kebayoran Lama AKP. Riftazudin, S.Kom.

Sedangkan menurut keterangan Kasi Um Polsek Kebayoran Lama, Aiptu Sartoyo, bahwa:

Dislokasi personel ini sesuai dengan tingkat kebutuhan organisasi dan melalui sebuah kesepakatan tingkat pimpinan di Polsek, apalagi bila dikaitkan dengan Perkap nomor 23 tahun 2010, jumlah personel untuk Polsek type urban adalah sebanyak 90 personel. Hasil evaluasi jumlah anggota dengan luas wilayah tersebut menyatakan bahwa penempatan personel selalu memperhatikan kondisi FKK wilayah yang telah diidentifikasi yaitu pada fungsi yang ada sesuai struktur organisasi.<sup>5</sup>

Pendapat yang berbeda berasal dari sumber informasi yang lain yaitu Aiptu Suradi, Bhabinkamtibmas Kelurahan Grogol Selatan yang mengatakan bahwa :

Justru dislokasi anggota Polsek Kebayoran Lama belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya wilayah RW yang dua wilayahnya cuma ditempati satu personel polisi RW, karena kekurangan pesonel.<sup>6</sup>

Pernyataan ini dibenarkan oleh Polisi RW 06 Grogol Utara Aiptu A.Sumarno, yang mengatakan bahwa :

Diperlukan evaluasi ulang untuk penempatan personel atau jika perlu dilakukan rotasi secara berkala sehingga seluruh jajaran akan dapat memahami adat setempat di wilayah kerja Polsek Kebayoran Lama.<sup>7</sup>

### **3.1.4 Kamtibmas**

Permasalahan kamtibmas di Ibukota, pada dasarnya hampir sama dengan wilayah lain dengan kompleksitas kota besar. Apalagi, Jakarta sebagai ibukota negara, hampir dapat dipastikan untuk pemeliharaan kamtibmas menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh heterogenitas budaya, demografi, dan aspek lain yang mempengaruhi. Hal

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan dengan Kasi Umum Polsek Kebayoran Lama, Aiptu Sartoyo

<sup>6</sup> Wawancara dengan dengan Bhabinkamtibmas Kelurahan Grogol Selatan, Aiptu Suradi

<sup>7</sup> Wawancara dengan Polisi RW 06 Grogol Utara, Aiptu A. Sumarno

ini sebagaimana diutarakan oleh Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP. Prayitno sebagai berikut:

Kondisi kamtibmas di wilayah kami (maksudnya wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, penulis) pada dasarnya hampir sama dengan Polsek lain di jajaran Metro Jaya, dimana agak sulit untuk diprediksi kejadian kriminal dari aspek pelakunya. Ada yang perorangan dan ada yang bekerja secara kelompok dan profilnya merupakan rantai putus, jadi tidak mengenal satu dengan yang. Cara yang selama ini agak efektif adalah memberdayakan peran serta masyarakat secara aktif dalam memelihara kamtibmas di wilayahnya khususnya dalam pencegahan kejahatan.<sup>8</sup>

#### 3.1.4.1 Daerah Rawan Unras/ Aksi Massa

**TABEL 3.3**  
**LOKASI UNJUK RASA/ AKSI MASSA**

No	Lokasi	Pelaku	Ket.
1	Kampus Usni Jl. Sultan Iskandar Muda Keb. Lama Utara.	Mahasiswa/ Mahasiswi	
2	Carefour Lb Bulus Jl. Lebak bulus Pondok Pinang	Para Karyawan	
3	Kantor Kopaja Jl. Air Maya No. 3 Keb. Lama Utara.	Para sopir dan kondektur	

Sumber: Intel Dasar Polsek Kebayoran Lama, 2011

Lokasi unjuk rasa yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa adalah di depan Kampus USNI yang lokasinya memang strategis di pinggir jalan. Menurut Camat Kebayoran Lama, Budi Wibowo, SH., Msi, mengatakan bahwa:

Jalan Sultan Iskandar Muda ini lokasi yang paling strategis bagi unjuk rasa khususnya yang berkaitan dengan kontrol sosial terhadap birokrat, karena lokasi ini apabila ada demo, maka suasana lalu lintas akan macet, dan hal ini sebenarnya yang diinginkan oleh mahasiswa sehingga

<sup>8</sup> Wawancara dengan dengan Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP. Prayitno.

pengguna jalan akan cenderung melihat apa tuntutan yang diajukan dalam demo saat itu.<sup>9</sup>

Pendapat dari sumber informasi lain yaitu Bhabinkamtibmas Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Bripka Widodo, mengatakan:

Selama saya menjabat sebagai bhabinkamtibmas di wilayah ini, unjuk rasa yang dilakukan di depan kampus USNI, biasanya dilakukan oleh mahasiswa dari USNI dan apabila tema yang diangkat masalah yang besar akan melibatkan mahasiswa dari kampus lain di Jakarta.<sup>10</sup>

Pendapat lain disampaikan oleh Ps Kanit Intelkam Polsek Kebayoran lama, Aiptu Sunardi.

Demo di USNI biasanya dilakukan oleh mahasiswa USNI yang tidak tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), jumlahnya pun tidak lebih dari 15 orang, tetapi bila ada issue yang menonjol jumlah massa bisa bertambah banyak, apalagi bila mengundang tokoh politik dan mahasiswa lain di luar USNI. Masalah yang diangkat biasanya ketidakpuasan terhadap pemerintah yang berkuasa. Tetapi selama ini tidak ada masalah dalam menangani unjuk rasa di USNI, karena sudah mengetahui kegiatan mereka paling lambat sehari sebelumnya.<sup>11</sup>

Menurut Lurah Kebayoran Lama Utara, H. Agus Suryadi, S.Sos., Msi menyikapi adanya unjuk rasa di wilayahnya, dikatakan:

Tugas kami membantu polisi dalam menertibkan jalannya unjuk rasa dan kami selalu siap dalam perbantuan tenaga misalnya Satpol PP yang ada di Kelurahan dan Satpol PP perbantuan dari Kecamatan kami kerahkan dengan sistem *plotting* disesuaikan dengan luas lokasi yang digunakan untuk unjuk rasa.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Camat Kebayoran Lama, *op.cit.*

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Bripka Widodo

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ps Kanit Intelkam Polsek Kebayoran lama, Aiptu Sunardi.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Lurah Kebayoran Lama Utara, H. Agus Suryadi, S.Sos., Msi.

Pendapat lain disampaikan Polisi RW kawasan USNI Brigadir Misman (RW 02 Keb Lama Utara) yang berdekatan dengan lokasi unjuk rasa mahasiswa mengatakan:

Antisipasi meluasnya area demo adalah tugas utama saya, dengan demikian peran saya lebih pada pengamanan wilayah RW 02 bekerja sama dengan perangkat RW yang kebetulan ada di tempat, karena kebanyakan mereka sedang bekerja di tempat lain.<sup>13</sup>

Sedangkan unjuk rasa yang dilakukan oleh para karyawan Carefour Lebak Bulus, menurut Lurah Pondok Pinang, Drs. H. Achmad Arsani, S.Sos. dikatakan:

Kalau unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawan Carefour di Lebak Bulus biasanya dilakukan saat perayaan hari buruh tanggal 1 mei, dan biasanya pengunjung rasa dari wilayah lain akan berkumpul di sini, sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Unjuk rasa ini perlu diantisipasi terutama dikhawatirkan terjadi massa anarkis yang dilakukan oleh massa akibat adanya provokator.<sup>14</sup>

Menurut sumber informasi Polisi RW Aiptu Imam Royani (RW 10 Pondok Pinang) yang membawahi wilayah Carefour, dikatakan bahwa:

Unjuk rasa yang terjadi biasanya masalah ketidakpuasan karyawan terhadap kebijakan manajemen Carefour yang dianggap merugikan mereka, misalnya masalah *outsourcing* dan kenaikan upah karyawan serta masalah solidaritas sesama karyawan karena temannya diberhentikan tanpa pesangon akibat melakukan pelanggaran disiplin manajemen.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, menurut Lurah Pondok Pinang, Drs. H. Achmad Arsani, S.Sos., mengatakan:

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Polisi RW kawasan USNI Brigadir Misman (RW 02 Keb Lama Utara)

<sup>14</sup> Wawancara dengan Lurah Pondok Pinang, Drs. H. Achmad Arsani, S.Sos.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Polisi RW, Aiptu Imam R (RW 07 Pondok Pinang)

Apabila terjadi unjuk rasa di Carefour untuk pengamanannya dilaksanakan oleh petugas polisi dari Polsek dan Polres Jakarta Selatan, dan selama ini unjuk rasa di carefour berjalan tertib, karena dari manajemen carefour sendiri mau mendengarkan dan menjelaskan berbagai tuntutan yang mereka kehendaki, walaupun demikian kita juga menyiapkan satpol PP untuk menertibkan spanduk dan pedagang kaki lima.<sup>16</sup>

Demikian pula yang terjadi Kantor Kopaja Jl. Air Maya No. 3 Kebayoran Lama Utara, menurut Brigadir Aritonang, Polisi RW 08 Kebayoran Lama Utara yang membawahi wilayah tersebut:

Permasalahan yang diangkat di demo ini yaitu trayek dan penambahan armada baru serta adanya sopir yang nakal mengambil penumpang di jalurnya sehingga masalah ini dibawa hingga ke pool Kopaja, namun hal ini tidak sampe menimbulkan korban, hanya teriakan-teriakan ketidakpuasan yang menyita pengguna jalan di depan pool Kopaja sehingga pada berhenti dan menimbulkan kemacetan.<sup>17</sup>

Lokasi unjuk rasa yang baru di wilayah Kebayoran lama adalah di Mall Gandaria City. Mall ini berdiri sejak tahun 2010 di jalan Isakandar Muda. Seperti yang disampaikan oleh Lurah Kebayoran Lama Utara, H.Agus Suryadi, S.Sos., Msi,

Permasalahan di Mall Gandaria City disebabkan oleh adanya ketidakpuasan warga terhadap berdirinya mall tersebut, masyarakat menginginkan adanya kompensasi terhadap gangguan yang diakibatkan oleh pembangunan mall dan minta agar warga sekitar ditampung sebagai tenaga kerja atau mengelola parkir di mall tersebut.<sup>18</sup>

Lokasi unjuk rasa yang lain ada di Wisma Pondok Indah, karena banyak perkantoran yang menyewa lokasi di tempat ini. Seperti yang terjadi baru-baru ini, yaitu adanya permasalahan antara perusahaan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Lurah Pondok Pinang, *op.cit.*

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bripda Sujai, Polisi RW 03 Kebayoran Lama Utara

<sup>18</sup> Wawancara dengan Lurah Kebayoran Lama Utara, *op.cit.*

yang ada di Maluku dengan warga setempat. Karena tidak mendapat kejelasan di lokasi pabrik di Maluku, pengunjung rasa datang ke Jakarta.

Seperti disampaikan Ketua Divisi Umum PT Metro Kencana yang membawahi gedung Wisma Pondok Indah, bapak Meiky Haryono sebagai berikut :

Di gedung ini unjuk rasa tidak terlalu sering, terakhir bulan kemaren unjuk rasa di PT Weda Bay Nickel, masyarakat di Maluku merasa tidak ada kompensasi dari pabrik ke warga yang memadai, tetapi setelah dijelaskan oleh pihak manajemen dan difasilitasi bhabinkamtibmas, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan massa pengunjung rasa membubarkan diri dengan tertib.<sup>19</sup>

#### 3.1.4.2 Daerah Rawan Tawuran Warga

**TABEL 3.4**  
**LOKASI TAWURAN WARGA**

No	Lokasi	Pelaku	Keterangan
1	Pasar Keb. Lama	Para Pedagang Pasar	Pada saat bulan puasa
2	Jl. Jiban Grogol Selatan	Anak-anak muda/ remaja	Pada saat bulan puasa
3	Komplek Kostrad dan Komplek Kodam Keb. Lama Selatan	Anak-anak muda/ remaja	Pada saat bulan puasa
4	Pondok Pinang Center	Anak-anak muda/ remaja	Pada saat bulan puasa

Sumber: Intel Dasar Polsek Kebayoran Lama, 2011

Kejadian tawuran warga yang terjadi di wilayah kerja Polsek Kebayoran Lama, menurut Wakapolsek Kebayoran Lama AKP. Riftazudin, S.Kom. lebih bersifat insidental namun sulit diprediksi khususnya yang terjadi di Pasar Kebayoran Lama.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ketua Divisi Umum PT Metro Kencana, bapak Meiky Haryono

Hal ini dikarenakan biasanya masalah rejeki dan perparkiran. Meskipun insidental, namun jika penanganannya terlambat tidak tertutup kemungkinan jatuhnya korban.

Kondisi ini dibenarkan oleh Camat Kebayoran Lama, Budi Wibowo, SH., Msi., bahwa:

Pasar Kebayoran Lama ini rawan konflik individu yang berujung konflik komunitas, jika konflik sudah membesar menjadi konflik komunitas apakah itu berdasar primordial (kesukuan) ataupun antar kelompok, akan tetap rawan akan jatuhnya korban. Apabila ada gejala konflik sebaiknya diselesaikan secara musyawarah sedini mungkin, hal ini dimaksudkan agar konflik tidak berkepanjangan dan menimbulkan korban.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut sumber informasi, AKP. Teguh Sukmawati, Kanit Binmas Polsek Kebayoran Lama, dikatakan:

Polsek Kebayoran Lama dalam menyikapi tawuran ini telah melakukan tindakan pre-emptif dan preventif tentang kamtibmas di wilayah melalui Bhabinkamtibmas di setiap Kelurahan. Tindakan konkrit yang dimaksud adalah implementasi konsep Polmas dalam membangun kemitraan sejajar dan penyelesaian masalah-masalah sosial yang terjadi. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menjalin interaksi sosial per individu dengan masyarakatnya. Hal ini diharapkan untuk membangkitkan kepedulian terhadap kondisi kamtibmas di wilayah.<sup>21</sup>

Pernyataan Kanit Binmas Polsek Kebayoran Lama tersebut didukung oleh Bripta Suhedi, Bhabinkamtibmas Cipulir, yang menyatakan sebagai berikut:

Kami selaku Babinkamtibmas selalu melakukan upaya preventif yaitu mendekati tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk kami ajak secara bersama-sama turut serta

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Camat Kebayoran Lama, *op.cit*

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kanit Binmas Kebayoran Lama, *op.cit*.

memikirkan masalah tawuran warga ini. Pada dasarnya kami sering berdialog dan berdiskusi sekaligus melakukan sosialisasi tentang kamtibmas, harapan kami, setelah adanya jalinan interaksi sosial yang terbangun akan mampu mengubah cara pandang masyarakat untuk berperan secara aktif dalam menyelesaikan masalah tawuran ini.<sup>22</sup>

Menurut Lurah Kebayoran Lama Selatan, H. Umar Ali, S.Sos. Dalam menyikapi tawuran warga, mengatakan:

Pihak kelurahan telah melakukan koordinasi rutin dengan para Ketua RT/ RW yang wilayahnya sering terjadi tawuran warga untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menjadi benih konflik. Disamping itu, para RT/ RW kami tugaskan untuk memetakan lokasi dan pelaku yang sering terlibat tawuran warga secara individu, kemudian dilakukan pendekatan untuk diajak bermusyawarah.<sup>23</sup>

Pernyataan Lurah Kebayoran Lama Selatan ini dibenarkan oleh Camat Kebayoran Lama, Budi Wibowo, SH., Msi., dikatakan bahwa:

Kami telah memerintahkan para Lurah di jajaran Kecamatan Kebayoran Lama untuk melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang bertikai melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berpengaruh di wilayah masing-masing guna mencari alternatif solusi terbaik dalam kasus tawuran warga, karena kami tidak menginginkan adanya korban baik materiil maupun luka-luka, apalagi korban jiwa.<sup>24</sup>

Kecamatan Kebayoran Lama telah mencanangkan tertib sipil melalui perwujudan kehidupan masyarakat yang nyaman dan tenteram. Hal ini meskipun tidak dideklarasikan secara eksplisit, namun dalam operasional keseharian, Camat selalu

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Cipulir, Bripka Suhedi.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Lurah Kebayoran Lama Selatan, H. Umar Ali, S.Sos.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Camat Kebayoran Lama, *op.cit.*

mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menciptakan tertib sipil melalui kinerja Sat Pol PP.

#### 3.1.4.3 Daerah Rawan Perkelahian Pelajar/ Mahasiswa

**TABEL 3.5**  
**DAERAH RAWAN PERKELAHIAN PELAJAR**

No	Lokasi	Pelaku	Ket.
1	TL Seskoal Jl. Ciledug Raya Cipulir	Pelajar SMU, STM, SMK	Bubaran sekolah
2	Jl. Sultan Iskandar Muda	Pelajar SMU, STM, SMK	Bubaran sekolah
3	PGA Pondok Pinang	Pelajar SMU, STM, SMK	Bubaran sekolah

Sumber: Intel Dasar Polsek Kebayoran Lama, 2011

Antisipasi terhadap perkelahian pelajar khususnya untuk lokasi Jl. Sultan Iskandar Muda dan PGA Pondok Pinang, menurut Wakapolsek Kebayoran Lama AKP. Riftazudin, S.Kom. :

Dilakukan dengan menempatkan anggota berseragam pada jam-jam rawan perkelahian yaitu saat pulang sekolah. Menyikapi berbagai situasi dan kondisi khususnya maraknya perkelahian pelajar, Polsek Kebayoran Lama berupaya dengan berbagai langkah pencegahan dan penanggulangan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh anggota polsek. Karena itu harus dilakukan secara komprehensif antara Polsek, pemerintah daerah, TNI (koramil) dan segenap komponen masyarakat, orang tua siswa, pihak sekolah para pelajar itu sendiri, yaitu dengan pembentukan kawasan aman dan damai.<sup>25</sup>

Pencanangan itu dilaksanan hari Selasa tanggal 12 April 2011 di SMA 47 , Jl Delman Utama 1, Kebayoran lama Utara.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Wakapolsek Kebayoran Lama, *op.cit.*

Acara itu dihadiri oleh Kapolres Metro Jakarta selatan, perwakilan siswa dari SMA dan SMP di wilayah Kebayoran Lama, serta Muspika dan tokoh agama dan masyarakat.

Dikatakan juga oleh wakapolsek :

Dalam acara tersebut dibuatkan ikrar dan pemahaman bahwa generasi muda penerus bangsa seharusnya tugasnya adalah belajar dan tidak untuk tawuran. Untuk itu atas prakarsa polsek dan muspika disepakati dibentuk pos-pos pengaman di lokasi rawan tawuran pelajar dengan menempatkan anggota Polsek, Polsubsektor, Koramil, dan Satpol PP pada jam rawan tawuran. Untuk wilayah TL Seskoal, kami sering dibantu dengan Pomal yang sedang berdinan di Seskoal sehingga dengan cepat konsentrasi perkelahian itu dapat dipecah. Kemudian di lokasi sudah ditempatkan satu unit mobil Patko sehingga pelaku perkelahian dapat diarahkan untuk membubarkan diri dan dihimbau untuk tertib sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.<sup>26</sup>

Hal ini didukung dengan pendapat Lurah Cipulir, Ambayar, SE. yang mengatakan:

Pada saat bubar sekolah, petugas Linmas langsung kita tempatkan untuk membantu pak polisi baik mengatur kelancaran lalu lintas maupun menjaga ketertiban sosial. Mereka kami terjunkan ke wilayah rawan perkelahian pelajar.<sup>27</sup>

Menyikapi hal ini, Kantor Kecamatan Kebayoran Lama mengirimkan 1 (satu) regu Satpol PP beserta kendaraan roda empat lengkap dengan peralatan lapangan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya tindakan anarkhis misalnya lemparan batu, atau benda keras lainnya sehingga keselamatan individu petugas terjamin. Menurut Camat Kebayoran Lama, petugas

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Wakapolsek Kebayoran Lama, *op.cit.*

<sup>27</sup> Wawancara dengan Lurah Cipulir, Ambayar, SE.

Satpol PP yang di lapangan langsung di bawah kendali Polri karena hal ini bersifat perbantuan tenaga pengamanan.

Menurut Bhabinkamtibmas Kelurahan Grogol Utara, Aiptu Sumarno, mengatakan :

Dalam menyikapi perkelahian pelajar yaitu dengan mempelajari Kirka Intel yang dibuat oleh Unit Intelkam Polsek. Kemudian kita antisipasi dengan cara meminimalkan kerugian masyarakat misalnya adanya kios yang berada di lokasi yang biasanya terjadi perkelahian pelajar/ mahasiswa kita himbau untuk tutup sementara namun tetap dijaga. Hal ini untuk menghindari penjarahan pelaku perkelahian (khususnya kios makanan dan minuman) sehingga barang-barang dagangan bisa aman.<sup>28</sup>

#### 3.1.4.4 Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas

**TABEL 3.6**  
**RAWAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

No.	Lokasi	Korban	Ket.
1	Jl. Metro Pondok Indah Pondok Pinang	Pengendara Spd Motor	Melebihi batas kecepatan
2	TL Permata Hijau Grogol utara	Pengendara R2 dan R 4	Lawan arus
3	Jl. Tengku Nyak Arif Grogol Selatan	Pengendara R 2 dan R 4	Out Kontrol
4	Jl. Sultan Iskandar Muda Keb. Lama Selatan	Pengendara R 2 dan R 4	Padat Lalin
5	Jl. TB Simatupang Pondok Pinang	Pengendara R 2 dan R 4	Melebihi batas kecepatan

Sumber: Intel Dasar Polsek Kebayoran Lama, 2011

Permasalahan lalu lintas di wilayah kerja Polsek Kebayoran Lama ini sedikit rumit. Hal ini dikarenakan letak geografis yang dilalui oleh masyarakat baik Ibukota maupun

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Kelurahan Grogol Utara, Aiptu Sumarno

Urban untuk berangkat dan pulang kerja. Disamping itu, disiplin pengguna jalan yang relatif rendah menjadikan ruas jalan di wilayah Kebayoran Lama selalu macet khususnya untuk jalan-jalan utamanya, sehingga banyak yang mencari jalur alternatif melalui pemukiman padat penduduk. Seperti disampaikan oleh Kanit Lantas Polsek Kebayoran Lama AKP Soenardjo,

Untuk menanggulangi masalah lalu lintas di wilayah Kebayoran Lama cukup sulit karena dengan jumlah anggota yang hanya tigapuluh orang cukup kewalahan dalam menangani masalah lalu lintas di wilayah ini.<sup>29</sup>

Sedangkan daerah yang berbahaya dan sering terjadi kecelakaan biasanya pengendara memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Hal ini dikarenakan kondisi jalan yang mulus dan lurus sehingga kecenderungan pengendara memacu kendaraannya sangat tinggi karena mengejar waktu yang tersita oleh kemacetan sebelumnya atau kemacetan yang akan terjadi pada rute kesehariannya.

Hal ini sering terjadi di Jalan Tengku Nyak Arief sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Arifin Ketua RW 08 Kelurahan Grogol Selatan sebagai berikut:

Jalan raya ini sering terjadi kecelakaan tunggal, biasanya karena kecepatan tinggi. Hal ini karena tikungan tajam dan menurun dari arah simprug kearah Pondok Indah, namun untungnya mereka damai dan saling menyadari kesalahannya sehingga tidak sampe ditangani petugas Polantas.<sup>30</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Polisi RW 08, Kelurahan Grogol Selatan, Briptu Reymo, yang menyatakan:

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Kebayoran Lama, AKP Soenardjo

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ketua RW 03 Kelurahan Grogol Selatan, M. Arifin.

Jalan raya itu memang rawan (maksudnya, Jalan Tengku Nyak Arif, penulis). Berkali-kali kejadian dan untungnya tidak sampai menelan korban jiwa. Biasanya pengendara sepeda motor jatuh karena tidak mampu menguasai kendaraannya yang berkecepatan tinggi karena situasi jalannya menikung atau mengurangi kecepatannya secara mendadak.<sup>31</sup>

Hal ini sempat dikonfirmasi oleh penulis kepada Wakapolsek Kebayoran Lama, AKP. Riftazudin, S.Kom., dikatakan bahwa:

Seringnya kejadian laka lantas yang terjadi di jalan Tengku Nyak Arif sebenarnya terletak pada pengguna jalan itu sendiri. Hal ini juga terjadi di Jalan Metro Pondok Indah dan jalan TB. Simatupang, wilayah kelurahan Pindok Pinang. Pengguna jalan biasanya tergesa-gesa, ketika melihat jalan mulus dan kosong selalu cenderung meningkatkan kecepatannya, namun ketika ada mobil yang berhenti mendadak, dia *out control* dan akhirnya selip (jatuh).<sup>32</sup>

Hal ini pernah dibicarakan oleh Lurah Pondok Pinang, Drs H. Achmad Arsani, dengan pihak kecamatan sebagai atasannya dan diteruskan ke pihak yang memiliki kompetensi terhadap antisipasi kerawanan kecelakaan lalu lintas, dengan membuat garis kejut di sepanjang jalan arteri, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak terkait.

Menurut Kanit Binmas Polsek Kebayoran Lama, AKP. Teguh Sukmawati, dikatakan:

Masalah ini sebenarnya klasik, karena sejak awal sudah pernah disampaikan bahkan berkali-kali dibahas, namun mungkin kurangnya koordinasi di jalur atas (maksudnya di tingkat pimpinan, penulis) hingga kini selalu kejadian laka lantas berulang di tempat atau lokasi yang sama.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Polisi RW 03 Kelurahan Grogol Selatan, Briptu Reymo.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Wakapolsek Kebayoran Lama, *op.cit.*

<sup>33</sup> Wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Kebayoran Lama, *op.cit.*

3.1.4.5 Data 11 kasus menonjol selama tahun 2010

**TABEL 3.7**  
**KASUS MENONJOL SELAMA TAHUN 2010**

No.	Jenis Peristiwa	Jumlah Peristiwa		% SL
		LP	SL	
1	Pembunuhan	0	0	-
2	Aniaya Berat	16	15	93,75
3	Pencurian Berat	55	35	63,64
4	Pencurian dng kekerasan			
	a. Todong	0	0	-
	b. Rampas	0	0	-
	c. Rampok	1	0	0
	d. Bajak	0	0	-
5	Pencurian Ranmor			
	a. Roda 2	49	4	8,16
	b. Roda 3	0	0	-
	c. Roda 4	4	0	0
6	Kebakaran	1	0	0
7	Perjudian	6	6	100
8	Peras / Ancam	1	1	100
9	Perkosaan	0	0	-
10	Narkotika	34	34	100
11	Kenakalan Remaja	0	0	-
	<b>Jumlah</b>	<b>167</b>	<b>95</b>	<b>56,89</b>

Sumber: Unit Reskrim Polsek Kebayoran lama, 2011

Kasus menonjol yang terjadi di wilayah kerja Polsek Kebayoran Lama selama tahun 2010, yang terbanyak adalah pencurian dengan pemberatan berjumlah 55 kasus dengan keberhasilan pengungkapan sebanyak 35 kasus sehingga persentase penyelesaian kasus sebesar 63,64%. Sedangkan urutan berikutnya adalah pencurian kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) sebanyak 49 kasus dengan keberhasilan pengungkapan sebanyak 4 (empat) kasus atau 8,16% keberhasilan pengungkapannya. Dan beberapa kasus menonjol

lainnya termasuk Narkoba (34 kasus) yang kesemuanya berhasil diungkapkan hingga sidang pengadilan.

Menurut Wakapolsek Kebayoran Lama, AKP. Riftazudin tentang kasus menonjol yang terjadi di wilayah kerja Polsek Kebayoran Lama, dikatakan:

Wilayah Kebayoran Lama ini merupakan daerah transit menuju sub-urban, sehingga tindak pidana yang terjadi ini biasanya sebagai sambilan bagi pelaku yang tidak berhasil melaksanakan niatnya di wilayah lain, khususnya masalah pencurian kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua.<sup>34</sup>

Hal ini dibenarkan oleh sumber informasi lainnya yaitu Kanit Binmas Polsek Kebayoran Lama, AKP. Teguh Sukmawati yang mengatakan:

Pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan di sini (maksudnya, wilayah Kebayoran Lama, penulis) hampir semuanya bukan penduduk setempat. Mereka jarang menetapkan TO (Target Operasi)nya di Kebayoran Lama, biasanya mereka itu gagal beroperasi di wilayah yang telah ditentukan kemudian pulang ke *base camp* nya melewati daerah kita, ternyata ada sasaran yang menggiurkan dan memungkinkan untuk dipetik. Rupanya upayanya gagal dan tertangkap tangan oleh masyarakat, dihakimi hingga luka-luka untung tidak sampai meninggal karena keburu anggota datang.<sup>35</sup>

Menurut Camat Kebayoran Lama, Budi Wibowo, SH., Msi, menjelaskan bahwa :

Pada dasarnya wilayah Kebayoran Lama relatif aman dibanding wilayah lain. Hal ini terungkap ketika Rapat Evaluasi masalah Ketertiban Masyarakat di Kantor Walikota Jakarta Selatan, ternyata data dari Kecamatan Kebayoran Lama relatif baik.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Wakapolsek, *op.cit.*

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kanit Binmas, *op.cit.*

<sup>36</sup> Wawancara dengan Camat Kebayoran Lama, *op.cit.*

### 3.2 Pembentukan Polisi RW

Untuk menciptakan situasi kondusif di wilayah hukum Polsek Kebayoran Lama diperlukan suatu kerjasama yang nyata antara polisi dan masyarakat. Wujud kerjasama ini merupakan implementasi Polmas yang sudah lama di gulirkan oleh pimpinan Polri. Sebagaimana di tuangkan dalam peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2008, bahwa pengemban Polmas pada dasarnya adalah seluruh anggota polisi mulai dari pangkat terendah hingga yang tertinggi, karena Polmas merupakan penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan dan ketertiban.

Dalam menyusun perencanaan guna menentukan model Polmas yang akan diterapkan di wilayah Polsek Kebayoran Lama, dilaksanakan rapat internal yang terdiri dari Kapolsek, Waka Polsek, Para Kanit, Kasi, Kapolsubsektor, Ka SPK dan perwakilan anggota operasional, agenda rapat membahas :

- 1) Pola operasional personel Intelkam, Reskrim, petugas sabhara, Bhabinkamtibmas, dan anggota Subsektor jajaran Polsek Kebayoran Lama.
- 2) Keberadaan dan efektifitas Bapulbaket, dan kring serse di wilayah Kebayoran Lama.
- 3) Hubungan petugas patroli Sabhara dan personel Polsubsektor jajaran dengan warga di lingkungan wilayah Kebayoran Lama.

- 4) Pola penerapan implementasi Polmas yang pernah dilaksanakan dan capaiannya.
- 5) Jumlah perkelahian antar warga (kelompok/Komunitas) tahun 2010.
- 6) Jumlah kejahatan curanmor tahun 2010.
- 7) Jumlah kejahatan jalanan tahun 2010.
- 8) Jumlah penyelesaian perkara tahun 2010.
- 9) Jumlah publik komplain tahun 2010
- 10) Jumlah kegiatan sosial bersama warga masyarakat tahun 2010.

Hasil yang dicapai / disepakati sebagai keputusan rapat antara lain :

- 1) Ditetapkan untuk mengembangkan model Polmas dengan menunjuk personel Sabhara dan anggota Polsubsektor jajaran Polsek Kebayoran lama sebagai petugas Polisi RW.
- 2) Memerintahkan waka Polsek untuk menunjuk personel yang akan ditugaskan sebagai Polisi RW dan mempersiapkan piranti lunak berupa surat perintah, buku kunjungan, kartu himbauan kamtibmas, serta blangko rencana kegiatan, blangko hasil kegiatan dan blangko laporan penanganan konflik warga dengan mengambil contoh-contoh blangko dari Surat Keputusan Kapolri maupun Surat Keputusan Kapolda Metro Jaya.
- 3) Memerintahkan Waka Polsek untuk mempersiapkan rencana pembekalan bagi petugas Polisi RW yang akan dilaksanakan selama tiga hari dalam tiga gelombang bertempat di Polsek Kebayoran Lama dan dikoordinasikan dengan Kasat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan untuk menyiapkan trainer Polmas.
- 4) Memerintahkan Waka Polsek untuk mempersiapkan rencana pertemuan dengan Para Ketua RW, Dewan Kelurahan, Lurah dan tokoh masyarakat wilayah Kebayoran Lama.

- 5) Merencanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Camat Kebayoran Lama dan Danramil Kebayoran Lama.
- 6) Memerintahkan Kanit Bimmas untuk mengkoordinir para Bhabinkamtibmas dan Kapolsubsektor mendata ulang para Ketua RW wilayah Jakarta Selatan, dan menginventarisir sesuai kelurahannya.
- 7) Memerintahkan Kanit Intelkam untuk mendata ulang intel dasar wilayah Kebayoran Lama.
- 8) Memerintahkan Kanit Reskrim untuk mengevaluasi 70 kasus kriminalitas selama tahun 2010, menginventarisir modus pencurian kendaraan bermotor baik mobil maupun motor, mengevaluasi komplain masyarakat, mengevaluasi SP2HP dan mengevaluasi penyelesaian perkara selama tahun 2010.
- 9) Memerintahkan Kanit Sabhara dan Kapolsubsektor untuk mempersiapkan personel yang akan ditunjuk melaksanakan tugas sebagai Polisi RW.
- 10) Memerintahkan Kasi Humas untuk mempersiapkan bahan himbauan kamtibmas.
- 11) Memerintahkan Kasi Hukum untuk mempelajari dasar hukum Polisi RW.
- 12) Memerintahkan Kasium merencanakan dukungan sarana, prasarana dan logistik.

Evaluasi hasil kegiatan yang telah disepakati dan diperintahkan kepada Waka Polsek, Para Kanit dan Kasub Sektor serta para Kasi jajaran Polsek Kebayoran Lama dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2011 yaitu :

- 1) Waka Polsek melaporkan :

- a) 60 personel yang ditunjuk untuk menjadi petugas Polisi RW sudah ditetapkan dan telah dituangkan dalam Surat Perintah Kapolsek Kebayoran Lama, para personel adalah petugas patroli sebanyak 42 anggota dan 18 personel anggota Polsubsektor jajaran Polsek Kebayoran Lama.
  - b) Rencana sosialisasi tugas Polisi RW akan direncanakan tanggal 11, 12 dan 13 Januari 2011 mulai pukul 09.00 wib sampai dengan 11.30 wib bertempat di aula Polsek Kebayoran Lama.
  - c) Rencana pelantikan Polisi RW akan dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Januari 2011 jam 19.00 wib di Gedung wanita Patra Simprug Kebayoran Lama.
  - d) Memohon nara sumber / trainer Polmas Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengisi materi teknis pelaksanaan tugas Polisi RW.
- 2) Kanit Bimmas dan Kasub Sektor melaporkan :
- a) Data terbaru para Ketua RW wilayah Kebayoran Lama sebanyak 77 pejabat RW di wilayah Kebayoran Lama.
  - b) Mengundang para ketua RW, Dekel, Lurah dan Tokoh Masyarakat Kebayoran Lama untuk mengikuti sosialisasi model Polmas Polisi RW pada tanggal 13 Januari 2011 jam 19.00 wib sampai dengan jam 21.30 wib di Kecamatan Kebayoran Lama. Undangan yang dibuat dan disusun oleh Camat Kebayoran Lama.
  - c) Mengundang ketua RW, Dekel, Lurah dan Tokoh Masyarakat Kebayoran Lama hadir dalam pelantikan petugas Polisi RW di Gedung Patra Simprug Kebayoran Lama.

- 3) Kanit Reskrim melaporkan :
  - a) Data 70 kasus dan data penyelesain perkara selama tahun 2010
  - b) Data kasus curanmor dan pengungkapan.
  - c) Data SP2HP sudah ada.
  - d) Data publik komplain selama tahun 2010.
- 4) Kanit Intelkam melaporkan :

Penyusunan data dalam intel dasar masih berlangsung dan ada perubahan mengenai nama perseorangan, pejabat, tokoh masyarakat, perusahaan, tempat usaha, kelompok komunitas, organisasi, LSM dan partai politik terjadi perubahan baik itu pengurangan dan penambahan terutama data mengenai Ipoleksosbudhankam, sementara data Astra Gatra tidak mengalami banyak perubahan.
- 5) Kasium, Kasi Humas dan Kasikum melaporkan :
  - a) Piranti lunak untuk personel yang ditunjuk sebagai petugas Polisi RW telah selesai, dukungan sarana dan prasarana serta anggaran menggunakan DIPA 2011 yang telah ditetapkan Polres Metro Jakarta Selatan dan dukungan Pemda / Camat Kebayoran Lama.
  - b) Penyusunan himbaun masih berlangsung dan ada yang sudah selesai sedangkan konsep komitmen yang akan diucapkan dalam pelantikan sudah selesai.
  - c) Dasar hukum Polisi RW adalah Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang Ham dan Perkap nomor 7 tahun 2008 tentang Polmas.

Setelah dilakukan beberapa kali rapat, kemudian dilaksanakan kegiatan pembekalan bagi personel yang ditunjuk sebagai Polisi RW secara bertahap

selama tiga hari berturut-turut dengan nara sumber Kapolsek Kebayoran Lama dan Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Selatan (Trainer Polmas) :

- 1) Gelombang satu dilaksanakan pada hari Selasa 11 Januari 2011 jam 09.00 wib s/d 11.30 wib diikuti 20 personel calon Polisi RW.
- 2) Gelombang dua dilaksanakan pada hari Rabu 12 Januari 2011 jam 09.00 wib s/d 11.30 wib diikuti 17 personel calon Polisi RW.
- 3) Gelombang tiga dilaksanakan pada hari Kamis 13 Januari 2011 jam 09.00 wib s/d 11.30 wib diikuti 39 personel calon Polisi RW

Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 pada jam 19.00 di aula Kecamatan Kebayoran Lama telah diadakan sosialisai dan pembekalan pada ketua RW dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh : Kasat Bimmas Polres` Metro Jakarta Selatan, Ketua Dewan Kota, Camat Kebayoran Lama, Kapolsek Kebayoran Lama, Dan Ramil Kebayoran Lama, Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Selatan, para Lurah jajaran Kebayoran Lama, para Dewan Kelurahan wilayah Kebayoran Lama, tokoh masyarakat, ketua FKPM Kebayoran Lama, 77 ketua RW atau yang mewakili ketua RW jajaran Kebayoran Lama, tokoh pemuda wilayah Kebayoran Lama, para Kanit, Kasub Sektor dan para Kasi jajaran Polsek Kebayoran Lama.

Para peserta undangan sepakat dan mendukung pelaksanaan model Polmas dengan mengedepankan personel Patroli Sabhara dan personel Subsektor sebagai pelaksana Polisi RW dengan tugas kunjungan, tatap muka, rapat koordinasi, pertemuan berkala, memberikan himbauan kamtibmas dan pemecahan masalah gangguan kamtibmas.

Pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2011 dilaksanakan pelantikan Polisi RW di aula pertemuan Gedung Wanita Patra di Jalan Simprug Kebayoran Lama. Pelantikan dilakukan oleh Camat Kebayoran Lama dan Muspika dengan dihadiri oleh Kasat Bimmas Polres` Metro Jakarta Selatan, Ketua Dewan Kota, Kapolsek Kebayoran Lama, Dan Ramil Kebayoran Lama, Kasubag Humas Polres Metro

Jakarta Selatan, para Lurah jajaran Kebayoran Lama, para Dewan Kelurahan wilayah Kebayoran Lama, tokoh masyarakat, ketua FKPM Kebayoran Lama, 77 ketua RW atau yang mewakili ketua RW jajaran Kebayoran Lama, tokoh pemuda wilayah Kebayoran Lama, para Kanit, Kasub Sektor dan para Kasi jajaran Polsek Kebayoran Lama.

### 3.3 Pelaksanaan Polisi RW saat ini

Polmas adalah membangun interaksi sosial antara Polri sebagai organisasi dan individu dengan masyarakat. Komponen yang terkandung didalamnya adalah program/ konsep Polmas baik sebagai strategi maupun sebagai filosofi dengan pranata, norma, dan nilai sosial yang berkembang di kehidupan sosial masyarakat madani. Sinergitas dari kesemuanya memunculkan suatu bentuk siskamswakarsa sebagai wahana pemelihara kamtibmas secara bersama antara masyarakat dengan Polri.

Demikian pula yang dilakukan oleh Polisi RW Polsek Kebayoran Lama terhadap pelaksanaan konsep Polmas ini pada dasarnya telah berjalan. Namun kondisi ini memerlukan bimbingan yang intensif oleh Bhabinkamtibmas setempat. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah yang berbeda. Heterogenitas penduduk sangat tinggi di perkotaan karena banyaknya pendatang dari luar daerah. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan perlakuan atau penanganan khususnya dalam membangun interaksi sosial.

Aspek yang terkait dalam pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama adalah Sumber Daya Manusia Polri. Berdasarkan kuantitas relatif cukup namun berdasarkan kualitas individu masih memerlukan peningkatan wawasan berkait dengan pemahaman terhadap pranata, norma dan nilai sosial setempat yang berlaku.

Implementasi Polmas yang dilakukan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama ini masih terkesan berpola *top down*. Artinya, pendekatan kepada masyarakat masih menggunakan kewenangan sebagai aparat negara. Sarana pendukung yang

utama adalah kendaraan bermotor roda 4 bagi para Polisi RW Polsek Kebayoran Lama. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah kemampuan komunikasi anggota yang masih kurang. Dukungan anggaran selama ini masih menggunakan anggaran rutin fungsi sabhara. Penggunaan anggaran sesuai dengan program kerja unit Bimmas termasuk pelibatan Bhabinkamtibmas. Kemudian juga pelaksanaan perubahan mindset untuk menjadi pelayan masyarakat masih kurang. Juga ada kendala di lapangan yang masih banyak jalan kecil yang tidak dapat dilewati oleh kendaraan patroli roda 4.

Berikut daftar para Polisi RW yang bertugas di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Kebayoran lama, yaitu:

**TABEL 3.8**  
**DATA POLISI RW KELURAHAN CIPULIR**

No	Nama RW	Kelurahan	Bhabinkamtibmas	Ketua RW (HP)	Polisi RW (HP)
1	RW 01	Cipulir	Bripka Suhedi 02198704801	H.Uyung 02195225871	Briptu Endro.S 021-70001569
2	RW 02	Cipulir		H. Bahrozi HS 081388370065 0217265535	Bripka Eko Setyo 081218171044
3	RW 03	Cipulir		Ruri Hadi,SH 081654858 02104245662	Brig. Giyanto 021-73453480
4	RW 04	Cipulir		H.M.Yamin Arsyad 0219119220	Brig. Sudiby 08138099903
5	RW 05	Cipulir		Abdul Choir,SE,ST 08164600002	Briptu Angkat. Susilo 08158548399
6	RW 06	Cipulir		Kasiman 0217232675	Aipda Masturi 0818955308
7	RW 07	Cipulir		H.Abdul Latief 0217256128	Brig. Giyanto 021-73453480
8	RW 08	Cipulir		Sunaryo 0217232558	Bripka Rohmadi 08151392960

9	RW 09	Cipulir		Sanuri Abdullah	Aiptu Rukiman 021-7257547
10	RW 10	Cipulir		Drs. H. Sanuri H. M. 08128426199	Aipda Triyono 08131953250

Sumber: Seksi Umum Polsek Kebayoran Lama, 2011

**TABEL 3.9**  
**KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA**

No.	Nama RW	Kelurahan	Bhabinkam tibmas	Ketua RW (HP)	Polisi RW (HP)
1.	RW. 01	Kebayoran Lama Utara	Bripka Widodo	H.Marsudi 021-7266289	Aiptu.H Jarwo 08139666454
2.	RW. 02	Kebayoran Lama Utara		M.Hodir 081280909447	Brigadir Misman 021-60202586
3.	RW. 03	Kebayoran Lama Utara		Ibnu Lichyani 081511100766	Bripda Sujai 081273369394
4.	RW. 05	Kebayoran Lama Utara		H.M. Wiyatno 08187393332	Briptu Rudi H 081311422701
5.	RW. 06	Kebayoran Lama Utara		H.M. Suwarno 08158627203	Aiptu Driyono 0816855333
6.	RW. 07	Kebayoran Lama Utara		H.M. Zen 081384181918	Bripda Sujai 081273369394
7.	RW. 08	Kebayoran Lama Utara		Atma 021-7238529	Brigadir Aritonang 021-26402522
8.	RW. 09	Kebayoran Lama Utara		H. Suwardi 081389454484	Bripka Basuki 08151601996
9.	RW. 10	Kebayoran Lama Utara		Fadilah 08128065945	Aipda m Kamal 021-68657998
10.	RW. 11	Kebayoran Lama Utara		H. Sulaksono 0811985126	Briptu Santoso 081514683636

Sumber: Seksi Umum Polsek Kebayoran Lama, 2011

**TABEL 3.10****KELURAHAN PONDOK PINANG**

No.	Nama RW	Kelurahan	Bhabinkamtibmas	Ketua RW (HP)	Polisi RW (HP)
1.	RW. 01	Pondok Pinang	Aiptu Sumardi 08161402196	H.Danuminto 7650430 081510001840	Bripka Condro 08174860292
2.	RW. 02	Pondok Pinang		M. Yamin Mudjid 98796815	Aiptu Jayus
3.	RW. 03	Pondok Pinang		Ridwan 085718376244	Briptu Munjiat 081213296064
4.	RW. 04	Pondok Pinang		Nurul Falah 7650170 0815110002626	Aiptu Nyata 085711294716
5.	RW. 05	Pondok Pinang		Muhammad Nuh 02140903530	Aiptu Heru Rubil 08128267975
6.	RW. 06	Pondok Pinang		M.Yasim 0817757476	Aiptu Gagan 08158030538
7	RW. 07	Pondok Pinang		Drs.Hm.Natsir	Aiptu Imam.R 08568030538
8	RW. 08	Pondok Pinang		H.Effendi Sh,Mh	Aiptu Triyono 081213625050
9	RW 09	Pondok Pinang		Dartanto 081317112816	AiptuTriyono 081213625050
10	RW 10	Pondok Pinang		Bangun Waspodo 08174883104	Aiptu Imam R 08568035738
11	RW 11	Pondok Pinang		Ny.Muniroh 0818663907	Aiptu Gita 081380231407
12	RW 12	Pondok Pinang		H. Endang Hidayat 0217650769	Aiptu Nano S 08128360034
13	RW 13	Pondok Pinang.		Ir.H. Indra Rusman 0217694628 081399928499	Aipda Sutijan 08129639594
14	RW 14	Pondok Pinang		Ir.H. Toto Mugiarto 0217690402 081199436	Brigadir Adikara 08138960655

15	RW 15	Pondok pinang		Syaukat Banjaran Sari 0217507500	Brigadir Suwandi 08129569724
16	RW 16	Pondok pinang		H. Zainudin Jahisa SH.MH 0217653419 0816708980	Aipda Nengah Dana 08129967042
17	RW 17	Pondok Pinang		Louis Pakaila 0217507500 0818150616	Aiptu Sudri S 081383102078

Sumber: Seksi Umum Polsek Kebayoran Lama.

**TABEL 3.11**  
**KELURAHAN GROGOL UTARA**

No.	Nama RW	Kelurahan	Bhabinkam tibmas	Ketua RW (HP)	Polisi RW (HP)
1.	RW. 01	Grogol Utara	Aiptu Sumarno	H. Racmat 021-5305421	Aiptu Suparmin 08129454783
2.	RW. 02	Grogol Utara		A. Yani 08568970371	Aiptu Kasim Utan 081932755888
3.	RW. 03	Grogol Utara		Rasyid 081319096271	Aiptu Sumardi 081584418142
4.	RW. 04	Grogol Utara		Supandi 021-95646844	Aiptu Bhucori 081905912089
5.	RW. 05	Grogol Utara		H. Dahroni 021-53674422	Aiptu Suwardi 081584418142
6.	RW. 06	Grogol Utara		Gozali 021-5308576	Aiptu A Sumarno 08888983442
7.	RW. 07	Grogol Utara		H. Haris 081519282581	Brigadir Azis 081387173944
8.	RW. 08	Grogol Utara		H. Sunarto 08129052373	Aiptu A. Sumarno 08888983442
9.	RW. 09	Grogol Utara		Triyanto 08128101987	Aiptu Kasim Utan 081932755888
10.	RW. 10	Grogol Utara		Rusli madani 081511699053	Brigadir Rahmat H 08121920213
11.	RW. 11	Grogol Utara		Muaz 081280022422	Bripka Edi Wilopo 085813962397

12.	RW. 12	Grogol Utara		H. Suitasari I 021-533145	Brigadir Aziz 081387173944
13.	RW. 13	Grogol Utara		Mudilih 081382731113	Aiptu Suparmin 08129454783
14.	RW. 14	Grogol Utara		Tukino 081380201212	Aiptu Ahmad Sahri 08161162022
15.	RW. 15	Grogol Utara		H. Arif A 0811104548	Aiptu Ahmad Sahri 08161162022
16.	RW. 16	Grogol Utara		Hamdilah 021- 5328385	Aiptu Bucori 081905912089

Sumber: Seksi Umum Polsek Kebayoran Lama.

**TABEL 3.12**  
**KELURAHAN GROGOL SELATAN**

No.	Nama RW	Kelurahan	Bhabinkam tibmas	Ketua RW (HP)	Polisi RW (HP)
1.	RW. 01	Grogol Selatan	Aiptu Suradi	HR. Agusman 021-93141197	Aiptu Bambang Hk 08989833898
2.	RW. 02	Grogol selatan		H. Olil 081511725660	Aiptu Bambang Hk 08989833898
3.	RW. 03	Gerogol Selatan		M. Arifin 081319423525	Briptu Remo 021-94752801
4.	RW. 05	Grogol Selatan		H. Marali 0818602650	Aiptu Triyono 08121313878
5.	RW. 06	Grogol Selatan		Sakiman 081514584432	Bripka Syarif H 0818877569
6.	RW. 08	Grogol Selatan		Widi Gung 08128498662	Briptu Remo 021-94752801
7.	RW. 09	Grogol Selatan		H. Asmari 08161678050	Aiptu Wagino 081319146520
8.	RW. 10	Grogol Selatan		H. Nahrawiba 08170709072	Briptu Agus P 085714728725

9.	RW. 11	Grogol Selatan		H.Kodir 087877041890	Aiptu Muklani 081807754354
10.	RW. 12	Grogol Selatan		H. Abdulah HM,S.Ag 081316900756	Bripka Adam Malik 021-99353038
11.	RW. 13	Grogol Selatan		H. Haulani 081513589281	Bripka Triyono 08121389231

Sumber: Seksi Umum Polsek Kebayoran Lama, 2011

**TABEL 3.13**  
**KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN**

No	Nama RW	Kelurahan	Bhabinkam tibmas	Ketua RW (HP)	Polisi RW (HP)
1.	RW. 01	Kebayoran Lama Selatan	Aiptu Mashuri 081513600482	H. Tugiman 0811980788	Bripka Irwanto 021-98368785
2.	RW. 02	Kebayoran Lama Selatan		Dr. Sarman 081546204080	Aiptu Harsono 0818195250
3.	RW. 03	Kebayoran Lama Selatan		H.Somawinata 021-94398296	Aipda Tasori 085691110622
4.	RW. 04	Kebayoran Lama Selatan		H. Maryadi 08179836104	Aipda Tasori 085691110622
5.	RW. 05	Kebayoran Lama Selatan		Kanijo 0817845747	Brigadir Winarno 08128042775
6.	RW. 06	Kebayoran Lama Selatan		H. Wagiyono 021-94073124	Bripka Rahmat 08121920213
7.	RW. 07	Kebayoran Lama Selatan		Ahmad 0811997327	Aiptu Ilhamsyah 0817134903
8.	RW. 08	Kebayoran Lama Selatan		H. Adisuyanto 0818758129	Bripka Irwanto 021-98368785
9.	RW. 09	Kebayoran Lama Selatan		Salwani 08131073614	Aiptu Zainal A 021-33503322
10.	RW. 10	Kebayoran Lama Selatan		H. Agus Pamuji 08158817123	Aiptu Abas 08179863359

11.	RW. 11	Kebayoran Lama Selatan		Siswanto 08129228550	Bripka Fresli H
12.	RW. 12	Kebayoran Lama Selatan		H. Legio 08159502168	Brigadir Winarno 08128042775

Sumber: Seksi Umum Polsek Kebayoran Lama, 2011

Wakapolsek Kebayoran Lama, AKP. Riftazudin mengatakan bahwa kondisi pelaksanaan Polisi RW di lapangan adalah sebagai berikut:

Anggota Polisi RW di lapangan pada dasarnya sudah memadai, hanya belum optimal, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan individu yang tidak merata, makanya program kami adalah terus meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya organisasi yang efektif dan efisien berkait dengan implementasi Polisi RW ini. Sebenarnya, Polisi RW menjalankan peran menjalin interaksi sosial dalam rangka kemitraan sejajar dengan masyarakat dan pemecahan masalah-masalah sosial yang terjadi di tingkat RW.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Kanit Binmas Polsek Kebayoran Lama, AKP. Teguh Sukmawati, mengatakan:

Masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Polisi RW mengakibatkan pelaksanaan di lapangan tidak optimal, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya organisasi. Perbedaan usia Polisi RW ini juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas di lapangan, misalnya, Polisi RW yang berpangkat Aiptu kita tugaskan di daerah yang relatif agak sensitif atau sering terjadi masalah sosial, sedangkan yang masih muda misalkan pangkat Briptu dari Caba reguler, kita tugaskan di wilayah yang agak homogen masyarakatnya.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Wawancara dengan Wakapolsek Kebayoran Lama, *op.cit.*

<sup>38</sup> Wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Kebayoran Lama, *op.cit.*

Hal ini dibenarkan oleh sumber informasi, Aiptu Mashuri, Bhabinkamtibmas Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, dikatakan:

Disamping tugas pokok kami sebagai Bhabinkamtibmas di tingkat kelurahan, kami juga melakukan koordinasi dengan Polisi RW di wilayah karena mereka adalah mata tombak dalam pelaksanaan tugas Polri. Maksud saya, Polisi RW bisa lebih menyentuh ke masyarakat khususnya di tingkat RW, sedangkan saya sebagai Bhabinkamtibmas harus membawahi duabelas RW agak sulit untuk menyentuh per individu masyarakat satu persatu, hanya Polisi RW yang bisa langsung menusuk ke individu.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Camat Kebayoran Lama, Budi Wibowo, SH., Msi. mengatakan bahwa, :

Kinerja Polisi RW di wilayahnya relatif bagus. Kecamatan sangat terbantu dengan keberadaan Polisi RW khususnya berkait dengan ketertiban sosial masyarakat. Sekarang, anak muda yang dulunya suka berkumpul dan mabuk-mabukan sudah mulai berkurang. Mereka segan dengan adanya Polisi RW yang suka bergabung.<sup>40</sup>

Hal yang serupa disampaikan oleh Lurah Grogol Utara, Muhammad Fajar Santoso, S.Sos. bahwa:

Wilayah kami yang dahulunya kumuh dan tidak tertib, sekarang mulai tertata dan warga yang berdiam di wilayah kumuh mulai timbul kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Apalagi daerah kami rawan kebakaran, apabila tidak tertib tentang parkir kendaraan di jalan, dapat mengganggu masuknya kendaraan pemadam kebakaran.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Aiptu Mashuri.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Camat Kebayoran lama, *op.cit*

<sup>41</sup> Wawancara dengan Lurah Grogol Utara, *op.cit*.

### 3.4 Implikasi Polisi RW terhadap Kamtibmas

Konsep Polmas diantaranya adalah menyelesaikan masalah sosial yang timbul di kehidupan sosial masyarakatnya. Penyelesaian masalah sosial ini tentunya harus melibatkan pihak yang bertikai, polisi, saksi masyarakat, dan menggunakan metode mediasi *win-win solution*. Peran tokoh masyarakat sangat dominan dalam menyelesaikan masalah sosial yang timbul di lingkungannya, hal ini dikarenakan tokoh masyarakat merupakan simbol individu yang mampu mengelola kehidupan sosial mengacu kepada pranata dan norma yang berlaku. Karisma tokoh masyarakat mampu meredam kemarahan komunitas dengan keberadaan fisik dan wejangan (kalimat nasehat) yang selalu ditaati oleh para pengikutnya yaitu masyarakat yang menganggap dirinya sebagai orang tua/*patron klien*.

Mengacu kepada konsep Polmas, maka unsur masyarakat merupakan hal yang dominan dalam implementasi Polisi RW. Masyarakat yang madani atau masyarakat sipil modern di tingkat RW adalah masyarakat yang masih memperhitungkan keberlangsungan norma dan pranata sebagai tatanan hidup dalam menciptakan tertib sosial yang bermuara kepada ketentraman dan kenyamanan kehidupan sosialnya.

Dengan demikian terjadi *link* antara implementasi Polisi RW dengan peran serta masyarakat. Peran serta yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat melalui simbol individu yang berpengaruh didalam kehidupan sosial di lingkungannya yaitu para tokoh masyarakat (termasuk didalamnya adalah tokoh agama, pemuda, dan cendekiawan) dalam komunitas masyarakat setingkat RW.

Fenomena ini sangat tepat bagi Polisi RW Polsek Kebayoran Lama guna percepatan implementasi Polmas. Percepatan yang dimaksud adalah membangun kemitraan dengan masyarakat di tingkat RW secara kohesif sehingga secara otomatis interaksi sosial dengan masyarakat umum tercipta. Kondisi ini merupakan suatu bentuk kemudahan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama dalam

melaksanakan kemitraan berkait dengan konsep Polmas. Namun kondisi ini belum terwujud dengan baik, maka secara setiap masalah sosial yang timbul belum dapat untuk dicarikan solusinya. Meskipun demikian implikasi pelaksanaan Polisi RW ini memiliki nilai strategis apabila berhasil dengan baik. Namun kondisi saat ini yang belum mampu menciptakan *performance* Polisi RW yang diharapkan yaitu menciptakan kondusifitas kamtibmas wilayah di tingkat RW.



## BAB IV

### ANALISIS PERMASALAHAN

#### 4.1 Permasalahan di Bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Keamanan, Hukum dan HAM

Dinamika masyarakat Indonesia nampak sedang mengalami redefinisi ke-Indonesia-an yang mengambang yang mengandung kerawanan dan ancaman dengan menonjolkan sentimentil horizontal seperti keagamaan atau aliran kepercayaan, sentimen vertikal seperti keelitan, kelompok miskin, atau sentimen spasial-regional (kedaerahan terutama pada kawasan konflik). Institusi publik maupun sipil nampak lamban dalam membangun integrasi sosial dan semangat rekonsiliasi dalam era reformasi yang masih menonjolkan anarkis.

##### 4.1.1 Bidang Idiologi

Pemaksaan kehendak untuk mengikuti faham yang berorientasi pada agama, faham liberal dan faham sosialis/ komunis yang bertentangan dengan Pancasila sehingga dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan NKRI.

##### 4.1.2 Bidang Politik

- a. Era demokrasi dan transparansi, di samping membawa perubahan yang positif, juga membawa dampak kepada stabilitas politik yang berpengaruh terhadap keamanan dalam negeri.
- b. Tuntutan terhadap pemerintah yang *clean government* dan *good governance* serta tindak tegas KKN terus mencuat/ meningkat.

##### 4.1.3 Bidang ekonomi

- a. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup, telah membawa masalah tersendiri.

- b. Lemahnya kondisi ekonomi telah meningkatkan jumlah kemiskinan, pengangguran dan tindakan PHK sehingga menurunkan kualitas kehidupan masyarakat dan meningkatnya gangguan Kamtibmas.

#### 4.1.4 Bidang sosial budaya

Adanya krisis kebudayaan yang bersumber pada longgarnya nilai-nilai dan moralitas, sehingga timbul gejala kerapuhan tentang persatuan dan kesatuan bangsa, kebebasan dan kerukunan umat beragama berubah drastis yang rentan terhadap disintegrasi.

#### 4.1.5 Keamanan

- a. Terorisme. Gejolak terorisme yang melanda berbagai kawasan di dunia telah pula masuk dan berkembang di Indonesia. Adanya teror Bom yang terjadi di beberapa kota di Indonesia membuat situasi Kamtibmas di Indonesia tidak kondusif.
- b. Separatisme. Adanya MoU antara pemerintah RI dengan GAM membuat gejolak separatisme di Aceh mereda. Namun di beberapa kawasan lain seperti di Papua dan Maluku masih berkejolak dan setiap waktu bisa muncul kembali.
- c. Munculnya mafia global di kawasan Indonesia

#### 4.1.6 Hukum dan HAM

- a. Pranata hukum yang ada belum dapat mengakomodir kepentingan hukum ke depan (internasional, regional dan nasional) termasuk sistem penegakan hukum dan peradilan yang kurang mencerminkan rasa keadilan.
- b. Tindakan massa yang anarkis dan brutal memperlakukan aparat di luar batas kepatutan, yang dilakukan tindakan represif secara terukur, namun justru mereka menganggap tindakan aparat tersebut melanggar HAM, masalah seperti ini yang harus diantisipasi pemecahan masalahnya.

Mengacu kepada perkembangan lingkungan strategis tersebut, maka sebelum melaksanakan sebuah program (dalam hal ini adalah Polisi RW), diperlukan analisis organisasi untuk mengetahui kesehatannya (*Organization Health Audit*) secara sederhana mengingat lingkup yang dioperasikan terbatas pada komunitas Rukun Warga (RW). Namun demikian, hal ini tidak dapat mengesampingkan pengaruh lingkungan strategis yang memiliki signifikansi terhadap pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama. Berdasar analisis SWOT, maka faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama diantaranya:

## 4.2 Internal

### 4.2.1 Kekuatan

- 1) Telah ditetapkannya salah satu tugas Polri yakni membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf c.
- 2) Skep Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri sebagai dasar pelaksanaan Polmas dan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, memberikan landasan bagi Perwujudan Polmas melalui Model Wilayah.
- 3) Komitmen Kapolri sangat besar dalam upaya meningkatkan kemampuan anggota Polri dalam penerapan Polmas, antara lain dengan telah menerbitkan: (1) Skep Kapolri No. Pol : Skep/431/VII/2006 tentang Pedoman Pembinaan Personil Pengemban Fungsi Perpolisian Masyarakat (Polmas); (2) Skep Kapolri No. Pol.: SKEP/432/VII/2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi Opsnal Polri dengan Pendekatan Perpolisian

Masyarakat (Polmas); dan Skep Kapolri No. Pol : SKEP/433/VII/2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasional Perpolisian Masyarakat (Polmas).

- 4) Polsek Kebayoran Lama menyusun Perencanaan Kegiatan Polisi RW didasarkan pada kondisi dan situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama mengacu kepada perkembangan lingkungan strategis yang selalu berubah dan sulit untuk diprediksi.
- 5) Sistem pengorganisasian Polisi RW berada pada hirarki Fungsional sehingga tidak mengganggu tatanan Struktural.
- 6) Pelaksanaan Polisi RW di Lapangan mengacu kepada Rengiat yang telah disusun oleh Polsek Kebayoran Lama sebagai pedoman operasionalisasi.
- 7) Polsek Kebayoran Lama memiliki sistem manajemen pengawasan dan pengendalian dalam bentuk Buku Kunjungan sebagai wahana kontrol lapangan bagi Polisi RW.

#### 4.2.2 Kelemahan

- 1) Pengaturan mengenai Polmas masih bersifat umum dan terbatas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008, belum diatur secara tersendiri, sehingga pelaksanaan Polisi RW dapat menyebabkan berbagai tafsiran (multi tafsir).
- 2) Sebagian besar anggota Polisi RW menterjemahkan penyelenggaraan Polisi RW hanya sebatas membangun kemitraan sejajar dan memecahkan masalah sosial di tingkat RW. Kerangka berpikir keproyekan tersebut telah berakibat pada tidak tercapainya tujuan Polisi RW, pelaksanaan Polisi RW mengalami stagnan.
- 3) Sebagian besar anggota Polisi RW belum mengetahui dan memahami nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Polisi RW sering mengabaikan kelembagaan ataupun nilai-nilai budaya yang ada.

- 4) Polisi RW belum memahami pelaksanaan *Restorative Justice* (RJ) dikaitkan dengan pelaksanaan di lapangan.
- 5) Belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang penerapan Polmas pada Pola Tradisional, sehingga cukup menyulitkan para anggota Polri atau Petugas Polmas dalam penyelenggaraan Polmas pada keamanan lingkungan ataupun model pemberdayaan pranata sosial/adat.
- 6) Belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang penerapan Polisi RW secara baku, sehingga cukup menyulitkan para anggota Polisi RW dalam penyelenggaraannya pada keamanan lingkungan ataupun model pemberdayaan pranata sosial/ adat.
- 7) Belum terbentuk Manajemen Polisi RW dalam penyelenggaraan Polisi RW sebagai wahana pengawasan dan pengendalian, sehingga belum terbentuknya prinsip-prinsip transparansi.
- 8) Dukungan sarana dan prasarana, serta anggaran belum memadai dalam pelaksanaan tugas anggota dalam rangka pelaksanaan Polisi RW terhadap masyarakat terutama sarana transportasi dan alat komunikasi.
- 9) Anggaran Polisi RW masih bergabung dengan anggaran Polmas yang ditetapkan tiap tahun sehingga percepatan operasionalisasi Polisi RW terkendala.

### **4.3 Ekternal**

#### 4.3.1 Peluang

- 1) Program Polisi RW secara implisit merupakan salah satu program Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dimana Polmas merupakan salah satu program dalam agenda Indonesia Aman dan Damai, dan Polisi RW merupakan bagian integral dari Polmas.

- 2) Secara fungsional, hubungan antara Kelurahan dan Dewan Kelurahan dengan Polsek Kebayoran Lama beserta Satuan Wilayah lainnya telah terjalin dengan baik. Hal ini memudahkan upaya koordinasi dan sinkronisasi, serta dukungan antar intansional secara fungsional dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
- 3) Demokratisasi telah menjadi paradigma baru masyarakat Indonesia karena baik di kota-kota maupun di perdesaan, sehingga berbagai aspek kehidupan baik dalam proses kemasyarakatan, maupun pemerintahan selalu dilakukan secara demokrasi. Hal ini menjadi peluang bagi Polri untuk melaksanakan Polmas dengan pendekatan budaya, mengingat Polmas yang berintikan kemitraan/kerjasama antara Polri dengan Masyarakat, serta secara bersama-sama mencari solusi dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial dalam masyarakat hanya dapat terbentuk pada masyarakat dan sistem pemerintahan yang demokratis. Akar demokrasi telah tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat. Pada hampir semua suku/etnis di Indonesia terdapat pola musyawarah dalam menyelesaikan sengketa atau dalam menetapkan berbagai permasalahan dilingkungan mereka.
- 4) Masyarakat Kebayoran Lama yang heterogen, memiliki nilai-nilai budaya yang sangat beragam, dimana didalamnya terdapat lembaga-lembaga yang memiliki fungsi sebagai pemelihara keamanan warga, serta nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang masih diakui dan ditaati oleh masyarakatnya. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Polisi RW untuk melakukan perannya melalui pendekatan budaya.
- 5) Dukungan masyarakat sangat besar terhadap dibentuknya Polmas-polmas berdasarkan komunitas, karena pada dasarnya kelembagaan Polmas sudah terbentuk pada masyarakat

Indonesia dalam bentuk dan nama yang berlainan. Kelembagaan Polmas yang terbentuk berdasarkan budaya-budaya komunitas maupun geografis sangat membantu Polri dalam pembinaan Kamtibmas.

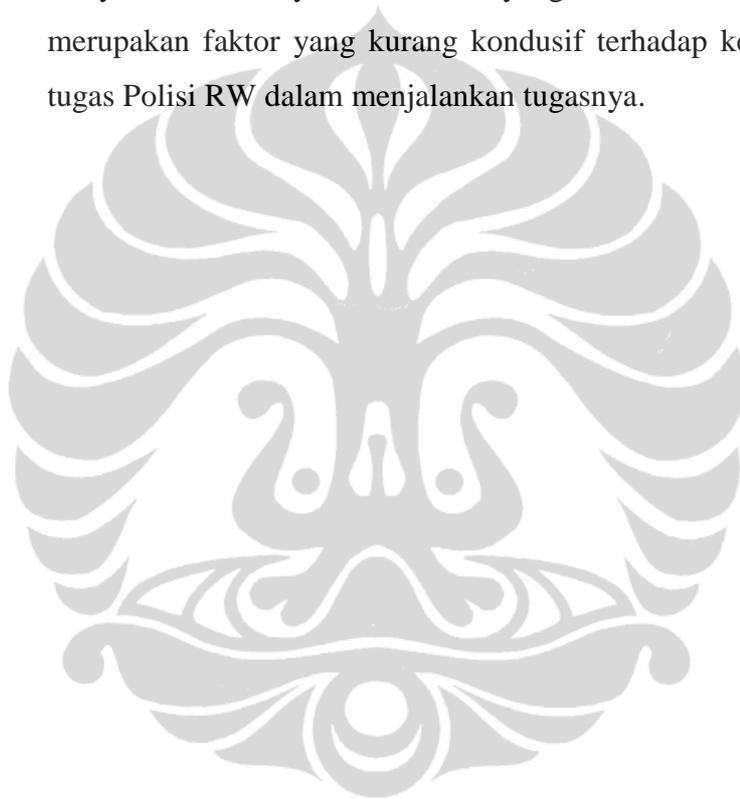
- 6) Tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polisi RW dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Kebayoran Lama merupakan faktor kondusif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan *community policing* Kecamatan Kebayoran Lama.
- 7) Secara kelembagaan Aparat Penegak Hukum Lainnya, yaitu jaksa dan hakim telah memiliki hubungan yang baik dalam rangka menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi.

#### 4.3.2 Kendala

- 1) Pengetahuan dan pemahaman Kelurahan dan Dewan Kelurahan terhadap program Polisi RW yang telah ditetapkan Polsek Kebayoran Lama masih relatif rendah. Hal ini dapat terlihat masih banyaknya Lurah yang belum mengetahui program tersebut.
- 2) Belum banyak dukungan dari pemerintahan tingkat Kecamatan maupun Kelurahan dalam pelaksanaan Polisi RW, termasuk mengusulkan kepada Bupati untuk anggaran guna kegiatan Polisi RW.
- 3) Persepsi masyarakat dalam memandang Polri masih bersifat negatif, karena berbagai perilaku masa lalu yang memang belum pulih saat ini. Sekalipun ada penerimaan dalam upaya membangun kemitraan, lebih berpandangan bukan sebagai mitra tetapi sebagai pembina.
- 4) Masih kecil kepercayaan masyarakat terhadap Polri terutama menyangkut transparansi dan akuntabilitas seluruh kegiatan Kepolisian yang dilakukan yang berhubungan langsung dengan

masyarakat. Hal ini berimplikasi terhadap pelaksanaan Polisi RW di lapangan.

- 5) Sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui dan memahami Polisi RW secara terminologis, sehingga respon masyarakat terhadap keberadaan Polisi RW masih relatif kecil. Hal ini menimbulkan kesulitan para Petugas Polisi RW.
- 6) Masih terdapat masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum masyarakat Kebayoran Lama yang rendah, kondisi ini merupakan faktor yang kurang kondusif terhadap keberhasilan tugas Polisi RW dalam menjalankan tugasnya.



## BAB V

### KINERJA POLISI RW YANG IDEAL

#### 5.1 Pelaksanaan Polisi RW yang diharapkan berkait dengan pemeliharaan kamtibmas wilayah.

Pada masyarakat kota tumbuh budaya-budaya komunitas atau kawasan baru, misalnya kawasan pertokoan, kawasan mall, kawasan perumahan, kawasan kondominium. Demikian pula dengan dengan kondisi masyarakat di Kebayoran Lama. Heterogenitas masyarakat dengan latar belakang budaya dan ekonomi maupun politik. Keberagaman ini mengakibatkan kendala bagi Polri untuk melakukan pendekatan pranata, norma, dan nilai sosial dalam mewujudkan kamtibmas wilayah. Hal ini terlihat dari Laporan Intelijen Dasar Polsek Kebayoran Lama.

Mengingat terdapatnya keragaman budaya yang dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia, maka dalam percepatan pelaksanaan Polmas sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri diharapkan:

- a. Tidak terpaku pada pembentukan Polmas secara formal dengan membentuk FKPM dan BKPM secara struktur, sehingga seolah-olah FKPM merupakan lembaga satu-satunya dalam penyelenggaraan Polmas. Artinya, pelaksanaan Program Polisi RW merupakan langkah yang tepat dalam aspek pembinaan masyarakat secara sektoral dalam lingkup komunitas yang lebih kecil, dan tidak menghilangkan forum komunikasi yang telah ada.
- b. Polisi RW dapat mengembangkan penerapan Polmas pada lembaga-lembaga sosial atau adat sesuai dengan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat bersangkutan. Dengan demikian lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat dimanfaatkan. Pada masyarakat Perkotaan misalnya dimana kepedulian dan kohesi sosial rendah dan memiliki kecenderungan formal dapat dibentuk FKPM yang terstruktur seperti *Koban* atau *Chuzaiشو*, dan dapat dibuat bangunan-bangunan tertentu

untuk para anggota berkumpul atau bertemu, seperti Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM), Pospol dan lain-lain. Namun demikian tidak harus seragam, dalam bentuk FKPM, dapat saja pada komunitas etnik atau keagamaan tertentu yang ada di perkotaan dilakukan Polmas melalui lembaga-lembaga perkumpulan tersebut, seperti kelompok pengajian, juga dapat saja pada kelompok-kelompok kemitraan Polisi yang sudah terbentuk, seperti LSM Peduli Polisi, atau Ronda di lingkungan kawasan perumahan modern (*Polmas Pola Tradisional*)

- c. Melakukan pemberdayaan (*empowering*) pada lembaga-lembaga kemasyarakatan/sosial/ adat yang ada. Konsep pemberdayaan lebih mengarahkan untuk mendorong dan menumbuhkembangkan sumber daya masyarakat lokal termasuk kebudayaannya. Lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat setempat yang terbentuk karena kebudayaan, dimanfaatkan dan ditumbuhkembangkan secara bersama-sama dengan para tokoh masyarakat setempat.

Pemberdayaan ini untuk menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menghadapi kejahatan, memberikan pelayanan dan keamanan antara masyarakat dengan Polisi RW. Semakin kuat suatu masyarakat di tingkat RW, maka ketahanannya dalam menangkal tindak kejahatan pun semakin meningkat pula. Dengan demikian, dibutuhkan mobilisasi semua sumber daya yang tersedia dalam masyarakat dan polisi untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan keamanan secara bersama.

- d. Menghargai dan menghormati kelembagaan-kelembagaan yang ada sebagai bagian dari keberlangsungan Program Polisi RW.

Mitra berarti sahabat/ teman yang didasari sikap saling mempercayai, menghormati dan ada kesetaraan/ kesejajaran. Mitra bukan hubungan atasan dan bawahan melainkan hubungan yang saling mendukung dan saling melengkapi. Oleh karena itu Polisi RW harus menghargai dan menghormati eksistensi kelembagaan-kelembagaan yang ada pada masyarakat setempat/ lokal. Kelembagaan yang sudah ada diikuti dan

dilaksanakan oleh para warganya, diharapkan dapat dimanfaatkan guna kepentingan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, bahkan kelembagaan tersebut dapat digunakan untuk menjadi salah satu alternatif dalam memecahkan berbagai persoalan sosial yang ada di masyarakat (*problem solving*).

- e. Mendinamisasikan lembaga-lembaga sosial/ adat yang ada agar lebih mengarah pada penciptaan lembaga yang memiliki perhatian masalah-masalah keamanan.

Banyak kelembagaan yang tumbuh dan masih dipelihara oleh masyarakat Indonesia. Pada kelembagaan tersebut ada yang mengatur secara umum (makro) seluruh kehidupan warganya dan ada pula secara khusus mengatur mengenai permasalahan keamanan. Oleh karena itu dalam konteks Polisi RW diharapkan lembaga ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemitraan Polisi dan masyarakat guna mencegah terjadinya kejahatan, dan menjadi sarana dalam memecahkan berbagai permasalahan masyarakat yang dapat menjadi potensi gangguan (PG/ FKK).

- f. Sementara itu pola penerapan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama melalui pranata sosial/ adat istiadat, sangat dimungkinkan dan memiliki keuntungan yang sangat besar jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik. Pranata sosial/ adat istiadat yang ada di Kecamatan Kebayoran Lama sangat beragam, namun terdapat beberapa komunitas warga yang memiliki ciri umum yang dapat digunakan sebagai sarana Polmas, antara lain: lembaga tersebut terbentuk sudah membudaya sehingga sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, diputuskan atas dasar musyawarah para tokoh masyarakat sebagai tokoh informal yang memiliki kewibawaan, keputusan ditaati masyarakatnya.

Namun demikian pada masyarakat yang masih bersifat *introvert* (tertutup), kelembagaan ini sangat sulit dimasuki oleh orang luar, terlebih dengan adanya gagasan baru, peranan tokoh masyarakat yang sangat besar sehingga mendominasi keputusan. Kondisi ini tentu

cukup menyulitkan para anggota Polisi RW dalam membangun kemitraan dengan masyarakat meskipun di tingkat RW. Oleh karena itu dalam upaya mempercepat penerapan Polisi RW melalui pranata, norma, dan nilai sosial diharapkan :

- 1) Terbangunnya interaksi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas berdasarkan prinsip kesetaraan, sikap saling mempercayai dan menghormati dalam upaya mencegah kejahatan, dan memecahkan masalah keamanan dalam komunitas RW/ masyarakat
- 2) Terbangunnya hubungan personal antara Warga masyarakat RW dengan Polisi RW sebagai pribadi. Polisi RW harus mengutamakan hubungan pribadi langsung daripada hubungan formal/ birokrasi yang umumnya lebih kaku, demi menciptakan tata hubungan yang erat dengan komunitas masyarakat RW.
- 3) Terbinanya pranata, norma dan nilai sosial sebagai bagian dari kegiatan Polisi RW. Pembinaan dalam konteks Polisi RW adalah upaya untuk menumbuhkembangkan dan mengoptimalkan potensi masyarakat dalam hubungan kemitraan (*partnership and networking*).

Dengan demikian maka, pranata, norma, dan nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Polisi RW. Hal ini diharapkan bermuara kepada terwujudnya kamtibmas pada komunitas tingkat RW.

## **5.2 Sistem dan Metode Pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama yang diharapkan**

Kultur Polisi RW yang diharapkan adalah kebiasaan yang dilakukan di Kecamatan Kebayoran Lama yang menunjukkan kebiasaan sebagai Polisi Sipil, yaitu sikap yang responsif, terbuka, dan akuntabel. Sikap dan kebiasaan yang responsif berkaitan dengan integritas pribadi (*integrity*) dan kelompok yang mengedepankan bukti kinerja yang menggambarkan suatu tanggung jawab atas

kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya. Merespons berkaitan dengan kemampuan memilih alternatif-alternatif bentuk tanggapan yang akan dilakukan. Respons seseorang atau kelompok tergantung kepada stimulus yang datang kepadanya. Orang yang memiliki integritas akan memilih respons berdasarkan pemikiran-pemikiran logis. Sebaliknya orang reaktif dipengaruhi oleh lingkungan fisik atau lingkungan sosial. Ketika orang memperlakukan mereka dengan baik, mereka merasa senang; jika orang tidak memperlakukan mereka dengan baik, mereka menjadi defensif dan protektif. Orang yang reaktif membangun kehidupan emosional mereka di sekitar perilaku orang lain, memberi kekuatan pada kelemahan orang lain untuk bisa mengendalikan mereka. Orang reaktif digerakkan oleh perasaan, keadaan, dan oleh kondisi lingkungan mereka. Sementara orang yang memiliki integritas digerakkan oleh nilai-nilai yang sudah dipikirkan secara cermat, diseleksi, dan dihayati. Orang yang memiliki integritas tetap dipengaruhi oleh stimulus dari luar, baik fisik, sosial, atau psikologis. Namun respons mereka terhadap stimulus tersebut, sadar atau tidak sadar, didasarkan pada pilihan atau respons yang berdasarkan nilai tertentu. Dengan demikian, sikap responsiveness adalah sikap yang ditampilkan oleh orang yang memiliki integritas pribadi sebagai pribadi yang bertanggung jawab (baca: tanggung jawab: responsibility, respons-ability : kemampuan untuk memilih respons).

Sikap dan kultur yang terbuka (*openness*) adalah sikap dan kebiasaan Polisi yang terbuka terhadap berbagai perubahan yang ada di masyarakat sehingga dapat terus menerus melakukan perbaikan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tantangan tugas yang dihadapinya. Sikap dan kebiasaan terbuka adalah pengakuan akan kelebihan dan kekurangan manusia serta hasrat dan kemampuannya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Prinsip keterbukaan mendorong seseorang untuk membuka dirinya terhadap segala sesuatu informasi atau pengetahuan baru yang belum dimilikinya sehingga kemungkinan untuk maju selalu terbuka.

Akuntabilitas (*accountability*) mengandung arti pertanggung-jawaban atau sesuatu pekerjaan yang memiliki kadar pertanggungjawaban. Akuntabilitas Polri berarti perwujudan kewajiban Polri untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi Polri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas personil Polri mengharuskan setiap personil untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya yang diukur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Polisi RW Polsek Kebayoran Lama sebagai sebuah program kerja memerlukan implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari seluruh anggota Polisi RW pada semua aspek tugas dan fungsi Kepolisian. Beberapa hal yang perlu dicermati sebagai sistem dan metode pelaksanaan Polisi RW di lapangan diantaranya:

a. Responsif terhadap perubahan lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat mengalami perubahan terus menerus, baik lingkungan politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Perubahan-perubahan tersebut memerlukan respons yang positif dari Polisi RW dengan melakukan perubahan sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapi dan mengacu kepada kompetensi yang dimiliki. *Responsiveness* di sini adalah merespons secara cepat terhadap perubahan-perubahan lingkungan masyarakat, dengan dasar pertimbangan yang logis dan merujuk kepada aturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta nilai-nilai dasar Kepolisian.

b. Responsif terhadap laporan masyarakat

*Responsiveness* ditampilkan Polisi RW dalam merespons laporan masyarakat dalam bentuk segera menindak lanjuti laporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Respons yang segera dari Polisi RW dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang telah memberinya kepercayaan, karena itu respons Polisi RW merupakan tanggung jawab atas kepercayaan tersebut.

c. Responsif terhadap keluhan masyarakat

*Responsiveness* ditampilkan dalam menghadapi keluhan masyarakat. Keluhan tersebut harus disikapi pula sebagai respons masyarakat terhadap kinerja atau perilaku Polisi RW, misalnya masyarakat mengeluh karena lamanya pelayanan Polisi dalam

pembuatan SIM. Keluhan tersebut direspons Polisi RW dengan menyampaikan kepada Kapolsek sebagai buket (bahan keterangan) untuk dilanjutkan kepada satuan fungsi yang berkompeten. Keluhan merupakan ungkapan dari kekurangan atau ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri kepada masyarakat. Keluhan masyarakat dijadikan sebagai bentuk komunikasi antara yang dilayani dengan yang melayani sehingga terjadi saling memahami, apa yang diinginkan oleh masyarakat, dipahami oleh Polisi RW yang melayaninya. *Responsiveness* dalam menghadapi keluhan masyarakat merupakan pembuktian atas penerimaan Polisi RW sebagai pelayan yang bertanggung jawab.

Responsiveness dapat diwujudkan apabila Polisi memiliki:

- 1) Keikhlasan dalam melayani masyarakat dan menempatkan tugas Kepolisian sebagai amanat yang harus dilaksanakannya.
- 2) Kenyamanan dalam melaksanakan tugas sehingga memberikan suasana hati yang senang apabila dapat memberikan pelayanan yang optimal.
- 3) Adanya tolok ukur yang jelas terhadap kinerja Polisi RW dalam bentuk standar minimum pelayanan publik sehingga Polisi RW dan masyarakat dapat mengevaluasi hak dan kewajiban masing-masing.

d. Keterbukaan terhadap perubahan

Masyarakat mengalami perubahan terus menerus, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Perubahan-perubahan tersebut menuntut sikap Polisi RW untuk terbuka sehingga dapat menyikapinya dengan melakukan perubahan pula sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapi. Sikap terbuka akan mendorong Polisi RW untuk mampu menghadapi berbagai kemungkinan yang harus dihadapi sesuai dengan tugas pokoknya.

e. Keterbukaan terhadap kritikan

Masyarakat sebagai pemberi kepercayaan tentu saja memiliki harapan-harapan terhadap Polisi RW. Harapan-harapan masyarakat

pada umumnya merupakan gambaran dari cita-cita ideal yang ada pada pikiran mereka terhadap Polisi. Karena itu, sikap terbuka Polisi RW dilakukan dengan menerima kritikan dari masyarakat dengan cara mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memikirkan dan mempertimbangkan secara logis sehingga dapat menghasilkan keputusan yang komprehensif.

f. Implementasi sikap akuntabilitas

Dalam era keterbukaan dan demokratisasi, pemerintahan dan organisasi-organisasi pelayanan publik seperti Polisi RW dituntut untuk bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi, yakni melakukan setiap program dan kegiatan selalu berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, hukum, maupun moral kepada atasannya, maupun kepada masyarakat dan akhirnya kepada Tuhan.

Akuntabilitas Polri menyangkut hal-hal berikut:

1) Akuntabilitas administratif

Akuntabilitas administratif berupa pertanggungjawaban secara organisasi dan anggaran kepada Kapolsek sebagai atasan langsung.

2) Akuntabilitas penegakan hukum

Akuntabilitas penegakan hukum oleh Polisi RW hanya sebatas tertangkap tangan atau penyerahan dari masyarakat sebelum unit fungsi yang berkompeten datang, jadi sifatnya hanya menjaga dan mengamankan.

3) Akuntabilitas sosial/ moral

Akuntabilitas sosial berupa pertanggungjawaban publik yang diberi penilaian dan sorotan oleh masyarakat. Akuntabilitas merupakan salah satu syarat untuk menarik kepercayaan, karena itu organisasi apapun yang memiliki akuntabilitas akan menerima kepercayaan dari berbagai pihak. Akuntabilitas bagi Polisi RW merupakan tuntutan nyata guna mewujudkan

kepercayaan masyarakat kepada Polri. Hal ini dikarenakan oleh kinerjanya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pada akhirnya Sistem dan Metode Pelaksanaan Polisi RW yang dilakukan oleh Polsek Metro Kebayoran Lama mengadopsi Konsep Polmas dengan berpedoman kepada Grand Strategi Polri yang diterapkan di kewilayahan. Penerapan ini dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategik yang setiap waktu berubah.

### **5.3 Kontribusi Kinerja Polisi RW terhadap Kamtibmas di Kecamatan Kebayoran Lama**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI telah menetapkan tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut, Polri telah menetapkan berbagai strategi agar tugas dapat dilaksanakan secara profesional.

Salah satu strategi Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah dengan menerapkan Perpolisian Masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pentingnya perpolisian masyarakat diterapkan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, sebagaimana disebutkan Ronny Lihawa (2005), antara lain:

- a. Masyarakat terus mengalami perubahan baik karakter maupun struktur sosial ekonominya;
- b. Karakteristik kejahatan dan kekerasan mengalami perubahan pula;
- c. Kurang efektifnya cara pemolisian tradisional yang lebih menekankan pada aspek penegakan hukum dan bersifat represif, dengan mengabaikan aspek pencegahan (preventif); dan;
- d. Keterbatasan sumber daya Kepolisian.

Sejalan dengan arus globalisasi, lingkungan strategi mengalami perubahan yang cukup signifikan pada lingkungan nasional, termasuk Indonesia. Masyarakat Indonesia mengalami perubahan karakter maupun struktur sosial ekonomi, budaya, politik serta keamanan.

Demikian pula dengan operasionalisasi Polisi RW merupakan bagian integral dari Program Polmas hanya dibedakan oleh obyek masyarakat yang dibatasi pada tataran Rukun Warga, harus tetap berpedoman kepada ketentuan Polmas. Dengan kemampuan sumber daya organisasi yang ada pada Polsek Kebayoran Lama, diharapkan dapat dioptimalkan dengan baik.

Menurut Wakapolsek Kebayoran Lama, AKP. Riftazudin, S.Kom., pelaksanaan Polisi RW saat ini telah berjalan sesuai kebijakan Kapolsek meskipun belum ada sebuah parameter untuk mengukur keberhasilannya. Namun dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang ketat, misalnya monitoring pada Buku Kunjungan Polisi RW atau Buku Kontrol maka dapat diketahui kondisi wilayah secara *real time* dan sekaligus sebagai wahana pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) bagi Polsek Kebayoran Lama.

Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kamtibmas sebagai suatu kondisi ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum, artinya terdapat suasana yang didukung adanya keadaan, ketaatan dan kebersamaan masyarakat dalam menghayati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan dan mencerminkan adanya kepastian dan keadaan dalam kehidupan masyarakat; sehingga Kamtibmas sebagai suatu kegiatan mengandung makna kemampuan untuk membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah

dan menanggulangi segala pelanggaran hukum dan gangguan Kamtibmas lainnya yang meresahkan masyarakat.

Adapun Kamtibmas sebagai suatu tujuan adalah merupakan salah satu prasyarat yang perlu diwujudkan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bangsa menuju cita-cita bangsa dalam mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kultur Polisi RW yang tumbuh dan berkembang dapat berkontribusi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Karena pelayanan merupakan dampak dari sikap pelayanan dan kultur yang berkembang di kalangan para pelayan. Kontribusi dari kultur Polisi RW adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang sederhana, yakni memberikan pelayan terhadap informasi tentang prosedur pelayanan kepolisian pada fungsi yang ada.
- b. Pelayanan yang mudah, yakni mensosialisasikan pelayanan Kepolisian dilakukan dengan pendekatan yang mempermudah pelayanan sehingga masyarakat mau mengurus sendiri karena mereka memandang pengurusan administratif biasanya dapat dilakukan oleh siapa saja atau diwakilkan namun ada beberapa fungsi yang mengharuskan keberadaan yang bersangkutan.
- c. Pelayanan yang jelas dan pasti, yakni meyakinkan kepada masyarakat bahwa pelayanan kepolisian yang dilakukan oleh petugas menunjukkan jelas dan pastinya proses pelayanan; kejelasan mengenai apa yang diperlukan, biaya yang dikeluarkan dan waktu yang dibutuhkan serta adanya kepastian dalam mendapatkan pelayanan untuk bisa atau tidaknya suatu keperluan itu diproses.
- d. Pelayanan yang aman, yakni pelayanan yang diberikan dapat melahirkan rasa aman kepada masyarakat yang dilayani; jauh dari rasa khawatir akan dirugikan atau ketakutan akan keselamatan dirinya.
- e. Pelayanan yang terbuka, yakni proses pelayanan tidak ditutup-tutupi, tetapi terbuka, baik dalam proses, waktu, maupun biaya.

- f. Pelayanan yang efisiensi, yakni pelayanan kepolisian dilakukan secara efisien sehingga masyarakat yang dilayani tidak menyia-nyiakan waktu, tenaga, dan pikirannya.
- g. Pelayanan yang adil, yakni pelayanan yang berpihak pada kelayakan dan kepatutan yang wajar, jauh dari diskriminasi atau keberpihakan kepada kepentingan lain di luar tugas.
- h. Pelayanan yang tepat waktu, yakni adanya jadwal yang jelas dalam pelayanan sehingga masyarakat pengguna dapat mengetahui kapan pelayanan selesai, atau harus menunggu berapa lama sehingga suatu pelayanan dapat diselesaikan.

Kultur Polisi RW yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan kebiasaan yang terbuka, tanggap, dan dapat dipertanggungjawabkan melahirkan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan secara prima menyebabkan masyarakat merasa puas. Kepuasan masyarakat tersebut akan melahirkan sikap percaya kepada Polisi RW khususnya dan Polri pada umumnya yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku sebagai berikut:

- a. Masyarakat akan menghormati dan menghargai Polisi RW dan senang untuk bekerja sama dalam melancarkan tugas-tugas Polri.
- b. Masyarakat akan siap untuk membantu Polisi RW apabila diperlukan sehingga Kamtibmas di wilayah RW dapat diwujudkan..
- c. Masyarakat mengikuti ajakan dan imbauan Polisi RW untuk disiplin dan patuh hukum.
- d. Polisi RW memiliki wibawa yang kuat di hadapan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kemampuan Polisi RW akan berpengaruh kepada tingginya mutu pelayanan kepada masyarakat, berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada Polisi RW khususnya dan Polri pada umumnya. Kepercayaan masyarakat kepada Polri pada hakikatnya merupakan sasaran dari grand Strategi Polri, yakni membangun Polisi yang dipercaya masyarakat sejalan dengan rencana strategi dan operasionalisasi membangun kepercayaan terpadu yang mencakup : menanamkan kepercayaan (*trust building*) dengan khalayak

publik ; memperluas kemitraan (*partnership* dan *networking*) secara bertahap dengan masyarakat; meningkatkan kemampuan (*strive for excellence*) dalam setiap kegiatan polisi dan menghindari kompromi atau sub-optimalisasi kinerja Polri.



## **BAB VI**

### **UPAYA POLSEK KEBAYORAN LAMA DALAM MENGOPTIMALKAN KINERJA POLISI RW**

#### **6.1 Polisi RW Sebagai Implementasi Polmas**

Reformasi Kepolisian lebih ditujukan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas terutama berkaitan dengan tugas polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan maupun penegak hukum. Reformasi tersebut sudah barang tentu membutuhkan partisipasi masyarakat. Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah bantuan atau dukungan terhadap perubahan paradigma baru polisi Indonesia melalui pendekatan efektif dan efisien dengan mengedepankan pembinaan potensi masyarakat yang dikembangkan melalui Polmas yang diimplementasikan dalam konsep Polisi RW sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan rasa aman di lingkungannya sehingga dapat dikembangkan menjadi lebih baik.

Menurut Malinowski dan Brown (1976), masyarakat sebagai organisme hidup, dan keduanya menyumbangkan buah pikiran mereka tentang hakikat, analisa fungsional yang dibangun di atas model organis sehingga memerlukan kebutuhan untuk menopang kehidupan sosialnya. Namun apabila kebutuhan itu sulit untuk dipenuhi maka berimplikasi terhadap tumbuhnya patologi sosial yang diawali dengan ketidak-tertiban sipil, kemudian meningkat menjadi gangguan kamtibmas yang pada akhirnya bermuara kepada terjadinya tindak kejahatan dan kecemasan masyarakat menjadi tinggi.

Dalam praktek kehidupan polisi, dapat dicermati bahwa polisi dalam tugasnya tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya karena kehidupannya setiap hari selalu berhadapan dengan masyarakat selama 24 jam terus menerus. Mengingat tugasnya selalu berada di tengah-tengah masyarakat maka sebelum anggota Polisi RW menempati tugasnya yang baru, maka dia harus melalui dengan mengenal budaya masyarakat lokal di tempat dia bertugas. Yang dimaksud dengan budaya masyarakat adalah pola kebiasaan, adat istiadat, agama sampai pola kehidupannya sehari-hari. Oleh karena kehidupannya yang demikian maka tentunya akan berpengaruh juga pada budaya masyarakat lokal. Apabila

Polisi RW dapat menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat di lingkungan tugasnya, maka tentu dalam menjalankan tugasnya dia akan mendapat dukungan dan bantuan masyarakat.

Sedangkan langkah-langkah implementasi Polisi RW pada masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama diantaranya adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Mabes Polri, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Jakarta, Mabes Polri, 2005:

- a. Dilaksanakan dalam lingkup yang kecil (RT atau maksimal RW) yang menekankan pada komunikasi dari hati ke hati (memahami bahasa lokal dan adat istiadat masyarakat suku bangsa setempat), untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan warga komunitas kepada Polisi RW. Hal ini kemudian diikuti pendataan dengan kategori-kategori (pemukiman, perkantoran, nama warga/ kepala keluarga dan sebagainya) dan mencatat keluhan dari masyarakat.
- b. Polisi RW berusaha menyelesaikan berbagai masalah sosial di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan masalah keamanan.
- c. Berupaya mengurangi rasa ketakutan warga masyarakat akan adanya kriminalitas, melalui patroli jalan kaki, patroli bersepeda ataupun penjagaan pada jam-jam rawan.
- d. Lebih mengutamakan terciptanya maupun terpeliharanya keteraturan sosial di wilayah tugasnya, sehingga warga komunitas dapat melaksanakan aktivitas maupun proses produktifitasnya dengan rasa aman tanpa adanya ketakutan.
- e. Pendekatan Polisi RW bukan lagi pada ancaman, tetapi pada potensi yang ada untuk menciptakan dan memelihara keteraturan sosial.
- f. Dalam menjaga hubungan antara Polisi RW dengan warga komunitas dengan tetap menunjukkan peran dan fungsinya masing-masing (polisi tetap polisi dan komunitas tetap komunitas).
- g. Mengoptimalkan anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di wilayahnya untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan menjadi jembatan kemitraan dengan Polisi RW.

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan tugas Polisi RW Polsek Kebayoran Lama di lapangan mengacu kepada konsep Polmas, diantaranya :

- a. Kemitraan Masyarakat di tingkat RW
- b. Pemecahan masalah atau *problem solving*
- c. Rasa senasib sepenanggungan.
- d. Komitmen, Integritas dan Konsistensi.
- e. Ada komponen yang perlu diberdayakan yaitu (1) Warga masyarakat; (2) Perangkat RW; (3) Komunitas Usaha Kecil.

Hal ini dimaksudkan sebagai pengejawantahan konsep Polisi RW dimana peran dan fungsinya diimplementasikan dalam kegiatan:

- a. Komunikasi yang dibangun antara individu Polisi RW dengan masyarakat sebagai landasan membangun kepedulian masyarakat terhadap kamtibmas di tingkat RW. Pendapat Colin Cherry (1964) mendefinisikan komunikasi sebagai “usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda. Memiliki bersama serangkaian peraturan untuk berbagai kegiatan mencapai tujuan”. Makna ini secara implisit telah dilakukan oleh Polisi RW dimana tujuan akhirnya adalah kamtibmas di tingkat RW yang kondusif sebagaimana ketentuan pada Konsep Polisi RW bahwa polisi tidak dapat mencegah kejahatan tanpa bantuan masyarakat.
- b. Perwujudan komunikasi yang efektif yang bermuara kepada kepedulian masyarakat di tingkat RW terhadap pemeliharaan kamtibmas ini menimbulkan sebuah resistensi terhadap gangguan kamtibmas. Hal ini sesuai pendapat Herbert Blumer, salah seorang penganut pemikiran Mead, pokok pikiran interaksionisme simbolik ada tiga; yang pertama ialah bahwa manusia bertindak (*act*) yaitu secara bersama-sama memelihara kamtibmas terhadap sesuatu (*thing*) yang diartikan sebagai gangguan kamtibmas yang dimungkinkan mengusik keteraturan/ ketertiban sipil, atas dasar makna (*meaning*) yaitu perwujudan rasa aman sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam konsep Polisi RW hal ini merupakan

pengejawantahan dari kinerja Polisi RW yang akan berbuat lebih banyak terhadap terjadinya kejahatan secara bersama dengan masyarakat.

- c. Melaksanakan koordinasi dengan Ketua RW, sebagaimana dikatakan oleh Sondang P. Siagian bahwa koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama antara Polisi RW dengan segenap warga di tingkat RW untuk memperoleh kesatuan tindakan memelihara kamtibmas melalui tindakan yang tepat, cepat, dan akurat. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur kelompok masyarakat di tingkat RW dimana kebutuhan untuk memelihara kamtibmas termasuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas dapat diwujudkan secara terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin. Artinya, apabila kondisi tersebut ideal maka kegiatan patroli yang dilakukan masih dirasakan kurang intensif karena luasnya wilayah akan terbantu dengan adanya koordinasi yang baik.

Semua aktifitas tersebut di atas adalah realisasi dari kinerja Polisi RW sebagai implementasi Polmas. Namun, kondisi ideal tersebut masih belum optimal ditinjau dari parameter keberhasilan Polmas. Beberapa hal yang menyangkut indikator keberhasilan ini diantaranya:

- a. Polisi RW belum ada dalam struktur dan manajemen internal organisasi Polri.
- b. Implementasi dilakukan telah dilaksanakan dalam ruang lingkup wilayah yang kecil yaitu tingkat RW, namun belum menyentuh kepada tingkat RT.
- c. Terciptanya hubungan serta komunikasi dari hati ke hati antara aparat dengan warga masyarakat namun belum kohesif atau efektif.
- d. Polisi RW mulai mampu memahami berbagai gejala yang ada dalam masyarakat di tingkat RW dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas.
- e. Polisi RW bekerja berdasarkan Rengiat Polsek Kebayoran Lama khususnya dalam tindakan bersama masyarakat untuk mencegah dan mengatasi gangguan kamtibmas, serta hal-hal lain yang dapat merugikan masyarakat.

- f. Terciptanya dan terpeliharanya keteraturan sosial serta rasa aman bagi masyarakat.
- g. Polisi RW mulai mampu mengevaluasi apa yang telah dilakukan untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan serta sebagai acuan dalam memahami gejala sejenis yang mungkin muncul di masa mendatang atau di kelompok masyarakat lainnya.
- h. Polisi RW telah memberikan penerangan atau penyuluhan kepada warga dalam berbagai permasalahan sosial yang mereka hadapi meskipun secara informal.
- i. Polisi RW berupaya membangun Citra Polri dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat.
- j. Kehadiran dan performa Polisi RW mampu memberi rasa aman masyarakat sehingga berfungsi sebagai wahana dalam meningkatkan produktifitas masyarakat.

Di sini nampak bahwa indikasi-indikasi awal bagi keberhasilan Polisi RW ini merupakan suatu awalan bagi indikator lainnya, yang pada akhirnya bermuara pada suatu indikator utama, yaitu adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di mana masyarakat di tingkat RW merasa leluasa untuk menjalankan aktifitas kehidupannya, bekerja dan bersosialisasi tanpa merasa takut akan ancaman gangguan kamtibmas serta meningkat produktifitasnya.

## **6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Operasional Polisi RW**

- a. Internal
  - 1) Aspek Sumber Daya Manusia

Polisi RW sebagai individu yang melaksanakan peran dan fungsinya mengacu kepada Konsep Polmas haruslah sosok yang mempunyai artinya memiliki kemampuan lengkap sebagai seorang pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum. Kontribusi ini akan memberikan dampak positif terhadap terwujudnya sosok polisi modern yang profesional, bermartabat, humanis dan menghormati HAM. Artinya, sosok

Polisi RW harus mampu berperan sebagai *Agent of Change* bagi kehidupan sosial masyarakatnya.

Dengan demikian diperlukan sebuah sinergitas optimal pada organisasi baik secara individu maupun dalam konteks HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) dalam rangka kinerja organisasi Polisi RW khususnya dan Polsek Kebayoran Lama pada umumnya. Kondisi ini akan tercipta manakala kemampuan individu Polisi RW pada aspek teknis kepolisian dan non teknis yaitu masalah pemahaman terhadap Konsep Polmas, Teori Komunikasi, Teori Interaksi Sosial, Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Operasional Polri dan berbagai Ilmu Sosial yang terkait dengan tugas dan kewenangannya sebagai Polisi RW di Lapangan.

## 2) Aspek Sistem dan Metode

Operasionalisasi Polisi RW telah ditentukan dengan baku oleh Mabes Polri dalam wujud Pedoman, Petunjuk Teknis (Juknis), maupun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), serta Peraturan-Peraturan terkait lainnya. Hal ini sebenarnya sudah cukup kuat untuk dijadikan landasan dalam mengoperasikan Konsep Polisi RW. Namun demikian, mengingat pelaksanaan Polisi RW di Lapangan selalu bersentuhan dengan masyarakat baik sebagai individu maupun dalam komunitas yang dipengaruhi oleh pranata, norma, dan nilai sosial, maka diperlukan adaptasi terhadap landasan sistem dan metode Polmas. Perubahan atau adaptasi ini yang sering disebut sebagai "kearifan lokal" yaitu sebuah kebijakan yang mengacu kepada keinginan atau harapan masyarakat sebagai *stake holder* Polri terhadap peran dan fungsi Polri sebagai Alat Negara.

Polsek Kebayoran Lama berupaya merealisasi sebuah kearifan lokal dengan menyusun sebuah sistem dan metode operasionalisasi Polisi RW mengacu kepada perkembangan lingkungan strategis masing-masing wilayah yang didasarkan

kepada karakteristik demografi dan budaya lokal masyarakatnya serta gangguan kamtibmas yang sering terjadi. Hal ini dimaksudkan untuk melandasi langkah antisipatif yang dilakukan oleh Polisi RW secara bersama-sama dengan masyarakat dalam rangka pemeliharaan kamtibmas di wilayah.

### 3) Aspek Sarana dan Prasarana

Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polisi RW dalam melaksanakan tugasnya, diupayakan diminimalisasi oleh Polsek Kebayoran Lama melalui langkah mengoptimalkan sumber daya organisasi dalam mendukung operasionalisasi Polisi RW Polsek Kebayoran Lama. Langkah konkrit yang dilakukan adalah kesiapan komando dalam memback-up Polisi RW pada aspek bantuan perkuatan secara cepat dan tanggap. Respon yang cepat akan mampu melokalisir masalah sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Misalnya, bantuan anggota Patroli Kota untuk segera merapat ke lokasi unjuk rasa atau TKP kejahatan.

Kelengkapan yang dimiliki oleh setiap Polisi RW adalah Buku Kunjungan sebagai bukti telah dilakukan kegiatan sambang warga. Dalam Buku Kunjungan dapat dilihat umpan balik dari warga terhadap kinerja Polisi RW meskipun dalam hal ini diwakili oleh Ketua RW. Namun dalam perkembangan waktu, Buku Kunjungan dijadikan sebagai "Fungsi Kontrol" bagi Polisi RW yang dapat dibaca dari respon masyarakat dimana Polsek Kebayoran Lama memberikan kebebasan yang obyektif kepada masyarakat untuk melakukan kritik khususnya terhadap operasionalisasi Polisi RW.

### 4) Aspek Anggaran

Polsek Kebayoran Lama selama ini membebankan Anggaran Polisi RW kedalam anggaran rutin fungsi sabhara. Hal ini sangat tepat mengingat Konsep Polisi RW adalah deferensiasi dari Konsep Polmas. Keterbatasan anggaran ini

menjadi kendala yang serius dalam pelaksanaan Polisi RW. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan adanya pendanaan dari masyarakat terhadap pelaksanaan Konsep Polmas. Misalkan, atas inisiatif masyarakat, Polisi RW diundang untuk memberikan sosialisasi Konsep Polmas pada acara Aarisan masyarakat di tingkat RT, Kegiatan Masyarakat dalam rangka menciptakan tertib sosial, dan sebagainya.

b. Eksternal

1) Aspek Birokrat Lintas Sektor

Upaya Polsek Kebayoran Lama dalam operasionalisasi Polisi RW, melakukan pendekatan institusional dengan aparat Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka sosialisasi konsep Polisi RW yang berlandaskan konsep polmas. Dalam Musyawarah Pimpinan Tingkat Kecamatan, Kapolsek atau yang mewakili memberikan gambaran konkrit tentang kondisi kamtibmas dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kamtibmas itu sendiri.

Pencerahan terhadap kehidupan sosial masyarakat ditinjau dari aspek peran dan fungsi Polisi RW sebagai wahana bagi para Pimpinan di tingkat kecamatan dan Kelurahan diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan sangat menarik bagi birokrat di tingkat kecamatan dan kelurahan karena terdapat kesamaan program dengan mereka.

2) Aspek Koordinasi

Melalui kesamaan program antara polri dan pemerintahan sipil (kecamatan dan kelurahan) dilakukan koordinasi dalam rangka menyusun program bersama antara Polsek Kebayoran Lama dan Kantor Kecamatan Kebayoran Lama dalam bidang ketertiban sosial dan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Dengan demikian maka jelas bahwa koordinasi adalah aktifitas berupa kesepakatan-kesepakatan antara Polsek

Kebayoran Lama dengan Pemerintahan Sipil (Kantor Kecamatan Kebayoran Lama) pada suatu kegiatan pemeliharaan Tertib Sipil dan Kamtibmas yang diintegrasikan ke dalam suatu tindakan efisien berupa program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, koordinasi bukan merupakan suatu kegiatan proses tetapi adalah suatu aktifitas upaya (*effort*) Polsek Kebayoran Lama melalui Pelaksanaan Polisi RW.

3) Aspek Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat yang telah memahami arti dan makna kamtibmas yang kondusif, pentingnya rasa aman, dihimbau untuk peduli terhadap kondisi lingkungannya. Bentuk kepedulian ini merupakan modal utama Polisi RW dalam menjalankan tugasnya. Pemberdayaan masyarakat yang telah mempunyai moral kepedulian lingkungan ini difungsikan sebagai kepanjangan tangan Polisi RW dalam hal Pulbaket (Pengumpulan Bahan Keterangan) dalam rangka deteksi dini (*early detection*) guna menyusun Rengiat (Perencanaan Kegiatan) Polisi RW.

4) Aspek Alternatif Anggaran Operasional

Polisi RW yang kreatif melakukan kampanye kamtibmas dengan memasang spanduk himbauan bekerja sama dengan pelaku bisnis yang ada di wilayahnya. Ketentuan pemasangan nama sponsor tidak mengganggu substansi dari himbauan yang tertulis di Spanduk. Dengan demikian maka Polsek Kebayoran Lama dapat menekan anggaran pemeliharaan kamtibmas dengan memanfaatkan aspek eksternal secara simbiosis mutualisme.

### 6.3 Optimalisasi Kinerja Polisi RW

Penerapan Polmas sebagai falsafah dan strategi dalam pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, oleh karena itu agar setiap pimpinan dan seluruh anggota Polri guna mengimplementasikan dalam semua aspek pelaksanaan tugas Polri maupun kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Polmas merupakan program kesatuan kewilayahan yang wajib dan menjadi tanggung jawab pimpinan serta seluruh anggota Polri untuk diimplementasikan khususnya dalam pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama dan ditumbuhkembangkan sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing dengan memperhatikan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Praktek keterlibatan masyarakat tradisional dalam pemolisian sudah dikenal dalam berbagai bentuk perlu dikembangkan dan diimplementasikan pola penerapan Polmas sebagaimana ditetapkan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008. Pola-pola penyelesaian masalah masyarakat melalui kebiasaan sudah umum diterapkan di dalam masyarakat setempat, yang kesemuanya merupakan pola-pola pemecahan masalah dan pencegahan serta pembinaan ketentraman dan kerukunan masyarakat yang mendasarkan pada asas kemitraan, kebersamaan dan keharmonisan di dalam masyarakat, oleh karena itu perlu dimanfaatkan pranata sosial/ adat yang ada guna mempercepat implementasi Polmas dalam konteks pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kebayoran Lama yang aman, tertib dan tentram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah sosial lainnya, dan masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius. Dalam upaya mempercepat pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama melalui pendekatan Polmas, perlu dibentuk tim manajemen Polisi RW yang dapat mengikutsertakan unsur non Polri (unsur tokoh masyarakat, Kelurahan, instansi sampling dan aparat penegak hukum lainnya).

Berpedoman kepada ketentuan dan acuan tersebut di atas, maka Polsek Kebayoran Lama mengoptimalkan kinerja Polisi RW dengan cara yang sistematis berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Polmas dengan langkah-langkah berikut.\

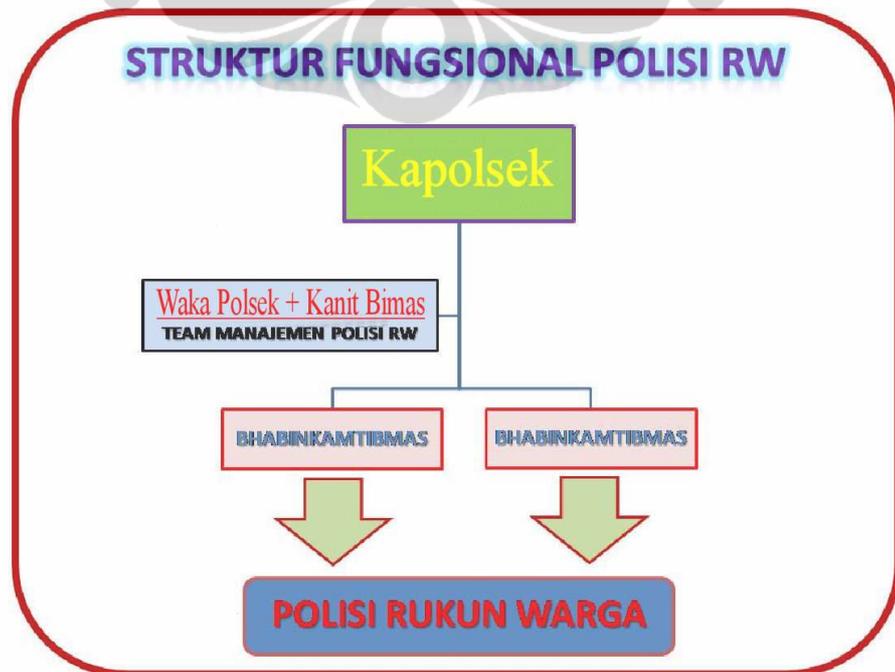
a. Perencanaan

Pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama didasarkan kepada Rencana Kegiatan (Rengiat) Harian, Mingguan, dan Bulanan Polsek Kebayoran Lama. Perencanaan ini meliputi aktifitas:

- 1) Menyusun Daftar Nominasi Anggota Polsek Kebayoran Lama yang akan mengemban tugas sebagai Polisi RW disesuaikan dengan kemampuan individu dalam pengenalan medan (budaya, interaksi sosial, kamtibmas)
- 2) Menyusun Data Kamtibmas sebagai dasar dislokasi Polisi RW
- 3) Menetapkan Polisi RW khususnya berprinsip pada konsep *local job for the local boy*.
- 4) Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pendukung (mis. Buku Kunjungan).
- 5) Menyusun aturan (HTCK) antara Polisi RW, Bhabinkamtibmas (Petugas Polmas), dan Unit Fungsi lainnya.

b. Pengorganisasian

Polisi RW hingga saat ini secara eksplisit belum masuk dalam struktur organisasi Polri. Namun demikian hal ini sebenarnya dapat dibuat struktur fungsional sebagaimana yang dilakukan oleh Polsek Kebayoran Lama, berikut ini.



c. Pelaksanaan

Optimalisasi pelaksanaan Polisi RW pada masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama melalui pendekatan Konsep Polmas, diharapkan mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan kamtibmas secara efektif. Hal ini didasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang dibangun melalui strategi yang dibangun oleh Polsek Kebayoran Lama dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan dstrategik sebagai faktor yang mempengaruhi secara eksternal maupun kondisi internal organisasi.

Dengan demikian maka hal utama yang perlu diperhatikan diantaranya:

- 1) Membangun Polisi RW berdasarkan tumbuh dan berkembangnya wilayah budaya, baik berdasarkan geografis dan kawasan (pertokoan, perumahan, mall, kondominium dan lain-lain) maupun geneologis (suku, agama, ras dan antar golongan) yang dilakukan baik secara formal maupun informal dengan memperhatikan norma, pranata, dan nilai sosial setempat atau mampu menunjukkan kearifan lokal.
- 2) Melakukan upaya revitalisasi nilai-nilai sosial budaya/ adat setempat sebagai modal sosial (*social capital*) yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Polisi RW.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat RW melalui pendekatan Polmas guna mewujudkan kamtibmas.
- 4) Membangun kerjasama/ kemitraan dengan masyarakat setempat baik dalam sistem keamanan lingkungan maupun pranata sosial/ adat dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban.
- 5) Membangun kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah kejahatan guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban.
- 6) Membangun kebersamaan antara Polisi dan masyarakat pada komunitas sistem keamanan lingkungan atau pranata sosial/ adat

setempat dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah sosial ataupun hukum (*problem solving*) dengan pendekatan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku setempat.

Sedangkan tujuan optimalisasi kinerja Polisi RW melalui pendekatan Polmas, yakni:

- 1) Meningkatkan efektifitas kegiatan-kegiatan Polisi RW yang dilaksanakan, sehingga semua dukungan sumber daya internal dan eksternal yang tersedia dapat dikelola secara efektif dan efisien guna tercapainya penentuan sasaran yang tepat, didukung dengan penggelaran dan penggunaan cara-cara/ metode Polmas yang tepat, diterima dan didukung masyarakat setempat serta pengawasan dan evaluasi implementasi Polisi RW bersama-sama dengan masyarakat.
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai sumber daya eksternal yang penting dalam pelaksanaan Polisi RW, sehingga dapat terjamin keberlanjutan implementasi Polmas.
- 3) Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat RW guna mewujudkan kamtibmas wilayah.

Demikian pula dengan sasaran yang ingin dicapai dalam optimalisasi kinerja Polisi RW melalui pendekatan Polmas, yaitu :

- 1) Sikap perilaku yang didasari oleh keyakinan, ketulusan dan keikhlasan semua pimpinan beserta seluruh anggota Polsek Kebayoran Lama untuk meningkatkan pelaksanaan Polisi RW pada komunitas sistem keamanan lingkungan dengan kearifan lokal.
- 2) Meningkatkan kemitraan dengan lembaga sosial kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, individu-individu warga masyarakat di tingkat RW yang patuh hukum untuk mendukung upaya-upaya pencegahan kejahatan dan ketidaktertiban sosial melalui pemberdayaan sistem

keamanan lingkungan dan pemberdayaan pranata sosial/ adat yang berlaku setempat.

- 3) Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas operasional Polisi RW melalui pemberdayaan sistem keamanan lingkungan maupun pemberdayaan pranata sosial/ adat yang berlaku setempat.
- 4) Terimplementasinya Polmas melalui pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama secara efektif baik secara formal maupun informal, termasuk penyelenggaraan Polmas pada sistem keamanan lingkungan ataupun pada pranata sosial/ adat yang berlaku setempat.

Mengacu kepada uraian rinci Manajemen Operasional Polri yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama, maka dapat disusun langkah-langkah optimalisasi Polisi RW sebagai berikut:

- a. Strategi
  - 1) Identifikasi Potensi di tingkat RW
    - a) Kenali bentuk / jenis pranata yang ada
    - b) Tokoh yang berpengaruh dalam pranata tersebut
    - c) Tata nilai yang berlaku
    - d) Mekanisme dalam hubungan/ sistem kekerabatan mereka
    - e) Hal-hal yang tabu/ dilarang
    - f) Mekanisme pengaturan kehidupan sosial
    - g) Mekanisme penyelesaian konflik yang berlaku
  - 2) Pelaksanaan Polisi RW
    - a) Penyiapan petugas
    - b) Penyiapan metode pendekatan
    - c) Penyiapan sarana/ prasarana
    - d) Penyiapan pihak ke tiga yang dapat mendinamisir
    - e) Perumusan kesepakatan bersama
- b. Implementasi Strategi
  - 1) Jangka Pendek (6 bln - 1 tahun)

- a) Melakukan pendidikan dan pelatihan Polisi RW bagi anggota Polsek Kebayoran Lama yang diperuntukkan untuk menjadi *trainer* Polisi RW khusus wilayah Kecamatan Kebayoran Lama.
- b) Melakukan pendidikan dan pelatihan Polmas bagi Polisi RW, khususnya yang akan ditugaskan menerapkan Polmas di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama.
- c) Kapolsek beserta jajarannya dan anggota melakukan safari ke tingkat RW guna mensosialisasikan program Polisi RW sebagai paradigma baru pemolisian masyarakat, yang diarahkan khusus pada komunitas setingkat RW serta komunitas-komunitas dalam masyarakat, seperti komunitas adat, komunitas Pokdar Kamtibmas, Ojeg Kamtibmas, Ormas yang ada di tingkat RW dan lain-lain.

Metode sosialisasi dan publikasi merupakan pendekatan atau suatu cara yang digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan tugas-tugas Kepolisian dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan ini diarahkan pada sosialisasi dan publikasi secara langsung kepada masyarakat tentang Polmas dan manfaat Polisi RW bagi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan lingkungan.

Kegiatan sosialisasi diarahkan pada program-program percepatan yang bersifat penerangan dan pendidikan masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami masalah Polmas. Akselerasi tugas-tugas Polisi RW dengan demikian diarahkan pada upaya pembentukan sikap dan kesadaran masyarakat mengenai masalah keamanan.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini akan lebih efektif apabila dibarengi dengan publikasi (*media setting*)

yang bersifat berkala berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi publikasi adalah membentuk opini publik dan memberikan informasi yang bersifat positif, edukatif dan persuasif, sekaligus sebagai *counter information* atas berita-berita negatif tugas-tugas Kepolisian. Dengan demikian kegiatan sosialisasi, edukatif dan publikasi diharapkan dapat mendorong lahirnya kesadaran masyarakat secara sendiri-sendiri dalam menciptakan keamanan (*community policing*) di lingkungan RW.

Pelaksanaan metode sosialisasi dan edukasi dapat berbentuk :

- (1) Ceramah
- (2) Diskusi
- (3) Perlombaan dan Simulasi
- (4) Pilot Proyek RW Binaan Kamtibmas
- (5) Pendidikan, Pelatihan (Kaderisasi Kamtibmas) dan lain-lain.

Sedangkan pelaksanaan metode publikasi yakni menerbitkan publikasi yang bersifat temporal dan berkala. Publikasi yang bersifat temporal diarahkan untuk membentuk opini publik dan pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbentuk penerangan atau penerbitan *temporary*, antara lain :

- (1) Kapita Selektta.
- (2) Laporan/Kumpulan Peristiwa (Teror Bom).
- (3) Buku-buku.
- (4) Baligo, Billboard, Spanduk, Papan Reklame dan lain-lain.

- d) Membentuk Tim Manajemen Polisi RW yang beranggotakan berbagai komponen disesuaikan dengan

kompetensi pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama.

- e) Tim manajemen Polisi RW Polsek Kebayoran Lama memilih dan menetapkan anggota Polisi RW pada wilayah-wilayah tertentu sebagaimana konsep *local job for the local boy*, misalnya pada masyarakat pada suatu RW masih memiliki pranata sosial/ adat yang kuat dan ditaati warganya. Sedangkan untuk membina sistem keamanan lingkungan langsung dilakukan pembinaan oleh Kanit Binmas Polsek Kebayoran Lama yang dibantu anggota Tim Manajemen Polisi RW lainnya.
- f) Petugas Polmas atau Bhabinkamtibmas sebagai koordinator lapangan Polisi RW, memberikan bimbingan dan arahan kepada Polisi RW untuk melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat, khususnya tokoh adat, serta masyarakat setempat melalui pendekatan humanistik kemasyarakatan, antara lain:
  - (1) Memanfaatkan setiap momen hari-hari besar, baik hari besar nasional maupun keagamaan untuk melakukan kegiatan bersama dengan tokoh masyarakat dan masyarakat, yang memiliki makna kebersamaan, seperti menjadi bagian panitia, ikut bergotong royong atau membantu dalam pengamanan.
  - (2) Memanfaatkan setiap kegiatan masyarakat di wilayah kerjanya, seperti perayaan perkawinan, khitanan dan lain-lain untuk mendekatkan diri dan membangun kepercayaan masyarakat, melalui kesediaan melakukan pengamanan bersama-sama dengan masyarakat lainnya.
  - (3) Untuk model sistem keamanan lingkungan, Polisi RW melakukan kemitraan dengan kelompok-

kelompok keamanan (Linmas/ Hansip), atau orang yang ditunjuk menjaga kawasan (sekuriti). Pola yang dilakukan selain membina adalah pola pemberdayaan, menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada pada mereka, baik tenaga maupun dana.

- g) Mempertahankan jalinan komunikasi dan kerjasama dengan para tokoh dalam masyarakat yang menggunakan sistem keamanan lingkungan, kelompok-kelompok ronda, serta para tokoh/ Tetua adat pada masyarakat yang menggunakan model pranata sosial/ adat dalam mengamankan lingkungan RW secara berkesinambungan, dengan melakukan kegiatan kunjungan, sambang dan tatap muka (*silaturahmi*) dengan tokoh-tokoh masyarakat secara berkala dalam upaya membangun saling kesepahaman, saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya dalam melakukan pengamanan sesuai peran masing-masing.
- h) Anggota atau Polisi RW melakukan sosialisasi Polmas pada lembaga sosial masyarakat atau komunitas sejenis di tingkat RW, tentang pentingnya memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan. Pada sistem keamanan lingkungan dengan berbagai pola disesuaikan dengan keinginan masyarakat berdasarkan musyawarah RW termasuk kawasan usaha (pertokoan/ pendidikan/ perkantoran) dilakukan sosialisasi pada saat kegiatan warga, seperti olah raga, hari-hari besar, kegiatan gotong royong warga, dan lain-lain, atau pada saat kelompok warga melakukan siskamling dengan mendatangi dan ikut berpartisipasi dalam ronda malam.

Sementara itu sosialisasi dilakukan Polisi RW pada komunitas masyarakat tradisional pada saat adanya

kegiatan-kegiatan sosial dan adat, seperti kegiatan upacara-upacara perkawinan, kematian atau upacara lainnya.

- i) Melakukan komunikasi, negosiasi, dengan tokoh masyarakat/ adat untuk mengintegrasikan pola-pola pengamanan yang ada pada mereka dengan program Polmas yang digulirkan Polri.

2) Jangka Sedang (1-2 tahun)

Program jangka sedang diarahkan pada pelebagaan dan pemberdayaan hubungan antara Polsek Kebayoran Lama dengan masyarakat serta terlaksananya konsep Polisi RW Polsek Kebayoran Lama di masyarakat lingkungan RW yang memiliki pranata sosial/ adat yang dipertahankan para warganya, melalui kegiatan:

- a) Melaksanakan pelebagaan dan pemberdayaan pada masyarakat tradisional secara teratur. Strategi pelebagaan pada dasarnya adalah konsep pemberdayaan (*empowering*), percepatan (*quick step*) dan membangun sinergitas (*network*) pada masing-masing lini/ komponen operasional polsek, agar dicapai adanya kesatuan gerak secara simultan terintegrasi dalam menyikapi setiap gangguan yang ada. Integrasinya seluruh satuan fungsional secara kelembagaan dalam Polri, dapat menunjukkan suatu kekuatan yang bersifat "jejaring" secara sinergi sebagai modal operasional, terlebih lagi apabila ini dikembangkan secara luas pada lembaga-lembaga lain dan masyarakat. Sebagai suatu kelembagaan yang memiliki hubungan secara permanen dengan masyarakat, maka hubungan-hubungan tersebut harus memiliki aturan yang permanen pula, sehingga hubungan-hubungan dapat dilakukan secara teratur, serta dapat

menetapkan dan melaksanakan konsep Polisi RW secara bersama.

Optimalisasi memerlukan implementasi program atau kegiatan yang cepat, tepat, tegas dan fleksibel. Masyarakat RW harus dijadikan basis kekuatan dalam menghadapi gangguan keamanan. Oleh karena itu strukturisasi kelompok masyarakat dan pengorganisasian masyarakat di tingkat RW sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan masyarakat yang berasal dari masyarakat itu sendiri (*social capital*). Strukturisasi dan revitalisasi masyarakat berasal dari bawah (*bottom up*).

Apabila kelembagaan masyarakat RW ini dapat terbangun maka Polsek Kebayoran Lama pada hakekatnya telah memiliki lembaga atau “*organisasi partisan*” yang berbasis masyarakat yang dapat bekerjasama dengan Kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi berbagai tindak kejahatan yang semakin meningkat. Dalam perspektif ini maka pendekatan revitalisasi nilai-nilai budaya masyarakat, pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan kegiatan *social engineering* sangat penting, sebab tanpa demikian pembentukan organisasi partisan itu sulit dapat terwujud, yang berarti pula sistem keamanan berbasis masyarakat tidak mudah untuk dicapai.

- b) Disamping itu, keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat RW juga dipengaruhi oleh intensitas pembinaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian pada tingkat wilayah masing-masing. Karena itu diperlukan percepatan dalam sistem/ pola pembinaan wilayah atau lingkungan agar dapat terbentuk bangunan keamanan yang

berbasis masyarakat dan mencerminkan kekuatan masyarakat sebagai “aset sosial” dalam bidang keamanan.

- c) Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, baik yang telah terorganisir maupun yang masih bersifat perkumpulan diaktifkan untuk menjadi bagian mitra Polisi RW dalam melakukan pengamanan lingkungan.
- d) Bersama-sama tokoh masyarakat, khususnya Tetua Adat melakukan kampanye pentingnya pengelolaan keamanan secara bersama-sama baik melalui ceramah-ceramah pada kewilayahan sesuai dengan wilayah hukumnya, membuat pamflet, brosur, poster dan media lainnya seperti radio dan televisi, yang bertujuan membangun kewaspadaan akan bahaya terorisme di lingkungannya.
- e) Memberi dorongan dan pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan di tingkat RW yang ada guna memanfaatkan kembali nilai-nilai budaya yang positif bagi upaya membangun kebersamaan didalam masyarakat lingkungannya.

### 3) Jangka Panjang (3-5 tahun)

Sasaran program jangka panjang adalah merevitalisasi nilai-nilai sosial budaya/ adat serta mengimplementasikannya dalam Polmas. Uraian bab III tentang pelaksanaan Polisi RW saat ini dan analisis permasalahan pada bab IV menunjukkan bahwa pada hampir di semua komunitas masyarakat memiliki potensi yang secara positif dapat digunakan sebagai pendekatan dalam penanggulangan kejahatan, namun nilai-nilai tersebut pada saat ini sering diabaikan oleh masyarakatnya atau mengalami degradasi. Oleh karena itu perlu adanya revitalisasi, dengan melakukan kegiatan:

- a) Bersama-sama para tokoh masyarakat, khususnya Tetua Adat mengidentifikasi nilai-nilai budaya atau adat, baik kelembagaan, aturan-aturan, idiom-idiom atau kearifan

lokal lainnya yang memiliki nilai positif bagi tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan.

- b) Mendorong dan mendukung serta memfasilitasi upaya terbentuknya kelompok budaya baik didasarkan wilayah administrasi, maupun kelompok-kelompok suku, agama, ras atau golongan.
- c) Mengkampanyekan nilai-nilai budaya yang positif bersama tokoh-tokoh masyarakat, seperti budaya rasa kasih sayang pada sesama, persatuan dan kesatuan, persaudaraan, gotong royong, tolong menolong, toleransi, budaya mempelajari ajaran agama, melalui berbagai media baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pada acara-acara pertemuan rutin dengan masyarakat. Kampanye nilai-nilai budaya tersebut sangat penting, untuk men-*counter* atau mengikis budaya-budaya yang sangat memungkinkan tumbuhnya potensi gangguan (PG/FKK) di wilayah tersebut, seperti tumbuhnya fanatisme kelompok pada ajaran agama atau kepercayaan tertentu, sikap dan perilaku individualis pada masyarakat, eksklusivisme, ikatan emosional yang berkedok agama, kesukuan, rasa atau golongan, yang pada saat ini sudah mulai tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia.
- d) Mendorong komunitas adat yang memiliki fungsi keamanan untuk mengaktifkan kelembagaan tersebut dalam rangka memelihara keamanan. Polisi RW dapat berfungsi sebagai pembina serta memberikan fasilitasi.
- e) Memfasilitasi pertemuan rutin tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya mencapai kesepahaman dan saling pengertian antar tokoh masyarakat, baik tokoh agama, adat, aliran kepercayaan, tokoh pemuda, mahasiswa, tokoh buruh dan

lain-lain tokoh masyarakat dalam menjalankan peranannya di dalam penanggulangan kejahatan.

- f) Polisi RW bersama-sama dengan masyarakat dan Kantor Kelurahan/ perangkat RW setempat melakukan penyelesaian berbagai permasalahan sosial yang memerlukan penyelesaian, Dalam penyelesaian selalu diperhitungkan kebaikan-kebaikan dan keselarasan warga.
- g) Polisi RW harus memberikan ketauladanan dalam kehidupan sehari-hari, dengan ikut memperlihatkan keikutsertaannya dalam gotong royong, tolong menolong, toleransi dan memiliki sikap perilaku pemersatu dan mengembangkan budaya persaudaraan dalam lingkungan wilayah kerjanya.
- h) Tim Manajemen Polisi RW membuka ruang bagi munculnya pendanaan dari luar Polsek, seperti Kelurahan atau Kecamatan, donatur lokal yang peduli kamtibmas dan berbagai donatur lain dengan pertanggung-jawaban penggunaannya kepada masyarakat (transparan dan akuntabel).

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

Dari hasil uraian dan analisis bab-bab terdahulu dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan:

- a. Pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama berpedoman pada Konsep Polmas (Pamolisan Masyarakat) yang bersifat modern sebagaimana Surat Keputusan Kapolri No. Pol : 737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang disempurnakan dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pamolisan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Implementasi Polisi RW di lapangan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai harapan organisasi (Polsek Kebayoran Lama). Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya organisasi Polsek Kebayoran Lama dalam mendukung keberhasilan kinerja Polisi RW.
- b. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Polisi RW terdiri dari aspek internal organisasi berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Polsek Kebayoran Lama dan aspek eksternal yaitu perkembangan lingkungan strategis yang sulit diprediksikan, yang selalu berubah setiap saat. Kondisi ini sangat mempengaruhi pelaksanaan Polisi RW dalam mewujudkan kamtibmas di wilayah khususnya di tingkat RW.
- c. Upaya mengoptimalkan kinerja Polisi RW Polsek Kebayoran Lama dilaksanakan dengan cara yang sistematis. Mengacu kepada visi dan misi, serta tujuan dan sasaran maka dibangun sebuah strategi yang integratif. Melalui implementasi strategi mengoptimalkan kinerja Polisi RW Polsek Kebayoran Lama dengan pendekatan Polmas, maka dapat diuraikan dalam 3 (tiga) pentahapan yaitu jangka pendek, dan jangka sedang, serta jangka panjang yang bersifat aplikatif.

## 7.2 Saran

Dari hasil kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Polisi RW disarankan dapat melakukan tindakan penyelesaian sengketa sesuai tata cara budaya lokal (*Restorative Justice/ RJ*) sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I Latar Belakang permasalahan dengan mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku, dan diskresi kepolisian.
- b. Dibuat buku petunjuk pelaksanaan tugas bagi Polisi RW sehingga jelas tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Mengoptimalkan kinerja fungsi Tim Manajemen Polisi RW pada aspek pengawasan dan pengendalian kegiatan Polisi RW di lapangan guna mereduksi komplin masyarakat.
- d. Mengusulkan kepada Mabes Polri untuk Konsep Polisi RW diterapkan kepada seluruh jajaran Polri dengan berlandaskan kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Bacaan

- Abdulsyani.( 1987). *Manajemen dan Organisasi*, Jakarta : Bina Aksara.
- Bayley, David H. (1994). *Police for The Future*, Oxford University Press, New York.
- Cangara, Hafied. ( 2002). *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. ( 2002 ). *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, Terjemahan Bahasa Indonesia, Jakarta : KIK Pres.
- Danim, Sudarwan.( 2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Djamin, Awaloedin.( 1995 ). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Sespim Polri.
- Friedmann, Robert R.( 1992 ). *Community Policing: Comparative Perspectives and Prospects*, Edition: 2, New York : St. Martin's Press.
- Gellner, Ernest.( 1995 ). *The Importance of Being Modular*. Dalam John Hall (ed.), *Civil Society: Theory and Comparison*, London : Polity Press.
- Hadiman, *Diktat Panduan Kuliah Mata Pelajaran Manajemen Operasional Polri di PTIK (MOP)*
- Hunt, CL & Horton PB. ( 1992 ). *Sosiologi 1&2*, Jakarta: Erlangga.
- Kamanto, Sunarto.( 2000 ). *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kratcoski, Peter C. & Duane Dukes. ( 1995 ). *Issues in Community Policing*, London : Anderson Pub. Co., Criminal Justice Division.
- Kunarto.( 1987 ). *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- ..... (penyunting). ( 2004 ). *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta, Cipta Manunggal. Kunarto (penyunting).( 2004 ). *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Lihawa, Ronny. (2004). *Kegiatan Babinkamtibmas Dalam Pencegahan Kejahatan di Kelurahan Kebayoran Lama Utara*.
- Mardalis. ( 1989 ). *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

- Moekijat. ( 1994 ). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Cetakan I, Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad, Farouk. ( 2003) . *Menuju Reformasi Polri*, Jakarta: PTIK Press.
- Osse, Anneke. (2006). *Memahami Pemolisian*, Jakarta: Rinam Antartika.
- Ostrom, Eleanor. ( 1978 ). *The Public Service Production Process : A Framework for Analyzing Services*, Police Studies Journal vol.7.
- Rakhmat, Jalaluddin.( 2004 ). *Psikologi Komunikasi*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rangkuty, Freddy. ( 2009 ). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus*, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk menghadapi Abad 21, Cet. Ke 16, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi
- Reksodiputro, Mardjono.( 2001 ). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Robbins, Stephen. ( 1994 ). *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*, alih bahasa Jusuf Udaya,Lic, Ec, Arcan.
- Rover, C.de. ( 2000 ). *To Serve & To Protect acuan universal penegak HAM*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang. ( 1994 ). *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Sutabri. ( 2005 ). *Tata : Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: Andi Offset
- Suparlan, Parsudi.( 2004 ). *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta: YPKIK.
- Wilson, James Q & Kelling, George L. ( 1982 ). *Broken Windows : The Police and Neighborhood Safety*, Atlantic Monthly, March. ( 1982 ).

### **Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Skep Kapolri No. Pol.: Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025.

4. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

### **Webpage**

Admin Web, [http://digilib.petra.ac.id/img-rep//jiunkpe/s1/eman/2008/jiunkpe-ns-s1-2008-31403361-9052-hanurda-chapter2\\_1\\_high.jpg](http://digilib.petra.ac.id/img-rep//jiunkpe/s1/eman/2008/jiunkpe-ns-s1-2008-31403361-9052-hanurda-chapter2_1_high.jpg)

Admin Web, *247 Anggota Polisi RW Dikukuhkan*, dalam [http://www.lintasberita.com/Nasional/Politik/247\\_Anggota\\_Polisi\\_RW\\_Dikukuhkan](http://www.lintasberita.com/Nasional/Politik/247_Anggota_Polisi_RW_Dikukuhkan)

Admin Web, *Pola Pengamanan Berbasis Teknologi*, dalam <http://bataviase.co.id/node/194160>

Edunet, *Mengasah Kemampuan Komunikasi Anak*, dalam <http://www.tempointeraktif.com/edunet/artikel/2003/02/03/edu,20030203-03,id.html>

Nurman Surachman, *Polisi rukun warga (RW) sebagai implementasi perpolisian masyarakat pada polsek metro Kelapa Gading*, dalam <http://www.garuda.dikti.go.id/jurnal/detil/id/17:3642/q/pengarang:Surachman%20/offset/0/limit/15>



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Camat Kebayoran Lama  
Budi Wibowo, SH., MSi.



Rapat membahas pola Polmas  
di Polsek Kebayoran Lama



Sosialisasi dan pembekalan kepada  
Polisi RW, Bhabinkamtibmas dan Babinsa



**Pembekalan kepada Polisi RW tentang  
cara pelayanan yang baik (Public Relation)**



Sosialisasi dan pembekalan kepada  
Ketua RW dan tokoh masyarakat



**Wawancara dengan Waka Polsek  
AKP. Riftazudin**



**Wawancara dengan Kanit Bimas  
AKP. Teguh Sukmawati**



Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Cipulir  
Bripka Suhedi



Wawancara dengan Bhabinkamtibmas  
Kelurahan Kebayoran Lama Utara  
Bripka Widodo



Wawancara dengan Bhabinkamtibmas  
Kelurahan Kebayoran Lama Selatan  
Aiptu Mashuri



Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Pondok Pinang  
Aiptu Sumardi



Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Grogol Utara  
Aiptu Sumarno



Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Grogol Selatan  
Aiptu Suradi



Wawancara dengan Lurah Pondok Pinang  
H. Achmad Arsani, S.Sos.



Wawancara dengan Lurah Cipulir  
Ambayar, SE.



Wawancara dengan Lurah Kebayoran Lama Selatan  
H. Umar Ali, S.Sos.



Wawancara dengan Lurah Kebayoran Lama Utara  
H. Agus Suryadi, S.Sos., MSi.



Wawancara dengan Lurah Grogol Selatan  
Mustaqim, S.Sos.



Wawancara dengan Lurah Grogol Utara  
Mohammad Santoso, AP. MSi.



## Acara Pelantikan Polisi RW



Wawancara dengan Kasi Um  
Aiptu. Sartoyo



**Wawancara dengan Kanit Reskrim  
AKP. Prayitno**



## Wawancara dengan Kanit Lantas AKP Soenardjo



**IMPLEMENTASI POLISI RUKUN WARGA (RW)  
DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA  
MELALUI PENDEKATAN KONSEP POLMAS  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMTIBMAS**

**PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR**

Sumber Informasi : Waka Polsek Kebayoran Lama

Nama :  
Tempat / Tanggal lahir :  
Pendidikan Terakhir :  
Agama :  
Riwayat Jabatan :

1. Bagaimana menurut saudara kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama?
2. Bagaimana dengan kondisi kamtibmas secara umum di Kecamatan Kebayoran Lama?
3. Faktor apa saja sangat berpengaruh dalam mewujudkan kamtibmas di Kecamatan Kebayoran Lama?
4. Bagaimana menurut pendapat saudara kinerja Polisi RW Polsek Kebayoran Lama dalam menyikapi masalah kamtibmas saat ini?
5. Bagaimana cara melakukan kontrol terhadap pelaksanaan tugas Babinkamtibmas?
6. Apakah saudara memberikan pembinaan terhadap Polisi RW dan bagaimana caranya?
7. Bagaimana prinsip kerja Polisi RW di kecamatan Kebayoran Lama?
8. Bagaimana dukungan sumberdaya organisasi terhadap pelaksanaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama?
9. Menurut saudara, upaya apa yang tepat dalam mendukung kinerja Polisi RW?

## **PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR**

Sumber Informasi : Camat Kebayoran Lama

Nama :  
Tempat / Tanggal lahir :  
Pendidikan Terakhir :  
Agama :  
Riwayat Jabatan :

1. Sudah berapa lama menjabat Camat di Kebayoran Lama?
2. Bagaimana menurut saudara kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Kebayoran Lama?
3. Bagaimana dengan kondisi tertib sosial secara umum di wilayah kerja saudara?
4. Masalah apa saja yang ada di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama yang berkaitan dengan kamtibmas?
5. Faktor apa saja yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan tertib sosial di wilayah kerja saudara?
6. Bagaimana menurut pendapat saudara menyikapi keberadaan Polisi RW di wilayah Kebayoran Lama?
7. Menurut saudara, sejauh mana interaksi sosial yang terjalin antara masyarakat dengan Polisi RW berkait dengan permasalahan kamtibmas di wilayah Kebayoran Lama?
8. Bagaimana peran Kantor Kecamatan dalam mendukung kinerja Polisi RW Polsek Kebayoran Lama?

## **PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR**

Sumber Informasi : Jajaran Lurah di Kecamatan Kebayoran Lama

Nama :  
Tempat / Tanggal lahir :  
Pendidikan Terakhir :  
Agama :  
Riwayat Jabatan :

1. Bagaimana menurut saudara kehidupan masyarakat di Kelurahan yang saudara pimpin?
2. Bagaimana dengan kondisi tertib sosial secara umum di wilayah kerja saudara?
3. Faktor apa saja yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan tertib sosial di wilayah kerja saudara?
4. Bagaimana menurut pendapat saudara terhadap keberadaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama?
5. Bagaimana koordinasi yang saudara lakukan dengan Polisi RW dalam menyikapi kondisi kamtibmas di wilayah saudara?
6. Sejauh mana efektivitas kinerja Polisi RW di wilayah saudara terhadap pemeliharaan kamtibmas di tingkat RW?

## **PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR**

Sumber Informasi : Para Ketua RW di Kecamatan Kebayoran Lama

Nama :  
Tempat / Tanggal lahir :  
Pendidikan Terakhir :  
Agama :

1. Bagaimana menurut saudara kondisi kamtibmas di wilayah saudara?
2. Masalah apa saja yang terjadi berkaitan dengan gangguan kamtibmas?
3. Menurut saudara, bagaimana peran Polisi RW Polsek Kebayoran Lama di wilayah saudara?
4. Nilai tambah apa yang didapatkan dari adanya Polisi RW?
5. Faktor apa saja yang sangat berpengaruh dalam perwujudan kamtibmas di wilayah kerja saudara?
6. Apakah saudara selalu berkomunikasi dengan Polisi RW?
7. Apa saja yang dibicarakan saat pertemuan dan komunikasi dengan Polisi RW?
8. Bagaimana menurut pendapat saudara interaksi sosial yang terjalin antara Polisi RW dengan masyarakat di tempat saudara?
9. Apakah ada kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan Polisi RW?
10. Bagaimana menurut pendapat saudara keberadaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama dibandingkan kondisi kamtibmas sebelumnya?
11. Apa yang menjadi saran saudara untuk mendukung Polisi RW?

## **PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR**

Sumber Informasi : Bhabinkamtibmas dan Polisi RW

Nama :  
Tempat / Tanggal lahir :  
Pendidikan Terakhir :  
Agama :  
Riwayat Jabatan :

1. Sudah berapa lama tugas di Polsek Kebayoran Lama?
2. Apakah saudara memahami tentang kehidupan sosial budaya masyarakat yang menjadi tanggung jawab saudara sebagai Bhabinkamtibmas/ Polisi RW?
3. Bagaimana menurut saudara kondisi kamtibmas di wilayah tugas?
4. Menurut saudara, bagaimana penerapan Polmas yang diaplikasikan dalam tugas Polisi RW?
5. Pendidikan / kursus apa yang telah didapatkan selama menjadi Polisi?
6. Apa yang anda dapatkan selama mengikuti pendidikan?
7. Apakah hasil pendidikan dapat saudara aplikasikan dalam melaksanakan tugas?
8. Apa yang menjadi pedoman saudara dalam bertugas sebagai Polisi RW?
9. Apa yang saudara lakukan di RW tempat bertugas?
10. Faktor apa saja yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Polisi RW di lapangan?
11. Bagaimana menurut pendapat saudara upaya yang digunakan untuk mendukung kinerja Polisi RW Polsek Kebayoran Lama?

## **PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR**

Sumber Informasi: Tokoh Masyarakat/ Agama/ Pemuda/ Cendekiawan/LSM

Nama :  
Tempat / Tanggal lahir :  
Pendidikan Terakhir :  
Agama :

1. Bagaimana menurut saudara kehidupan sosial budaya masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama?
2. Menurut saudara, bagaimana dengan kondisi kamtibmas secara umum di Kecamatan Kebayoran Lama?
3. Faktor apa saja yang sangat berpengaruh dalam perwujudan kamtibmas di kecamatan Kebayoran Lama?
4. Bagaimana menurut pendapat saudara terhadap keberadaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama?
5. Menurut saudara, sejauh mana interaksi sosial yang terjalin antara masyarakat dengan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama berkait dengan kamtibmas?

# **BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS**

## **POLISI RW**

### **POLSEK KEBAYORAN LAMA**

#### **1. Pendahuluan**

##### **1.1 Umum**

- a. Dalam kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum, Polsek Kebayoran Lama harus mampu menciptakan situasi keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat untuk menciptakan dan masyarakat, wujud kerjasama ini merupakan implementasi Polmas yang sudah lama digulirkan oleh pimpinan kita. Sebagaimana dituangkan dalam peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2008, bahwa petugas Polmas pada dasarnya adalah seluruh anggota polisi mulai dari pangkat terendah hingga yang tertinggi mengemban fungsi Polmas, karena Polmas merupakan penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mencari solusi untuk mengantisipasi permasalahan dan mampu memelihara keamanan dan ketertiban.
- b. Sebenarnya, implementasi Polmas di wilayah Kebayoran Lama telah dilaksanakan, dari tiga model Polmas yang dituangkan dalam peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2008, yaitu tentang implementasi Polmas Model A, B, dan C, keseluruhan telah ada dan masih berjalan,

namun demikian setelah dilakukan evaluasi ditemukan kekurangan-kekurangan yang pantas untuk ditingkatkan segera, sehingga pada rancangan ini Polsek Kebayoran Lama akan mengefektifkan kebijakan yang telah ada yaitu implementasi Polmas model C membentuk Polisi RW dengan mengedepankan personil Patroli Sabhara dan anggota Polisi Sub Sektor bekerja sama dengan FKPM dan komunitas masyarakat lainnya dengan mengintensifkan kontak person antara Polisi RW dengan warga masyarakat secara langsung/ tatap muka atau melalui sarana komunikasi, rancangan tersebut dilakukan atas dasar masukan dari personil dan staf Polsek Kebayoran Lama.

## 1.2 Maksud Dan Tujuan

- a. Polisi RW adalah program unggulan Polsek Kebayoran Lama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mengembangkan model Pomolisian/ Perpolisian masyarakat, dengan demikian Polisi RW diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan komunitas masyarakat yang ada di lingkungan RW setempat, sehingga terwujud 7 (tujuh) dimensi pelayanan masyarakat yang mencakup komunikasi yang berbasis kepedulian, tanggap, cepat dan tepat kemudahan pemberian informasi, prosedur yang efisien dan efektif, biaya yang formal dan wajar, serta kemudahan menyelesaikan permasalahan di Polsek Kebayoran Lama.
- b. Dengan adanya Polisi RW diharapkan terwujudnya hubungan yang harmonis antara warga masyarakat dengan Polisi sehingga segala informasi yang ada di masyarakat dapat diperoleh dengan cepat dan Polsek sebagai basis deteksi dini dapat tercapai, perwujudan tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya yang berpengaruh di masyarakat oleh karena itu Polisi RW harus memiliki data berpengaruh di masyarakat, oleh karena itu Polisi RW harus

memiliki data komponen-komponen masyarakat yang ada di RW yang menjadi wilayah tugasnya masing-masing.

### 1.3. Dasar

- a. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Menjalankan Tugas Polri.
- d. Skep Kapolri nomor Polisi : Skep/737/X/2005, tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- e. Rencana Kerja Polres Metropolitan Jakarta Selatan Tahun 2011.
- f. Rencana Kegiatan Polsek Kebayoran Lama Tahun 2011.

## 2. Pelaksanaan

### 2.1 Sumber Personil

Anggota Polsek terpilih yaitu :

- Sehat jasmani dan rohani
- Berpenampilan baik
- Tegass dalam bertindak dan tetap simpatik
- Taat menjalankan ibadah agamanya
- Memiliki sifat terbuka, cukup tanggap, suka menolong dan mudah bergaul. Selanjutnya disiapkan serta ditugaskan dengan Surat Perintah Atasan yang berhak dan diutamakan dari anggota Unit Bimmas,

apabila personel Unit Bimmas tidak mencukupi dapat diambil dari unit-unit Sabhara Resintel dan Taud yang sifat penugasannya sebagai perbantuan pada Unit Bimmas.

## 2.2 Kemampuan yang harus dimiliki

- a. Kemampuan berkomunikasi efisien dan efektif tentang Polri, tentang hukum, tentang masalah-masalah Kamtibmas dan konsep-konsep Binkamtibmas serta tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan Kamtibmas.
- b. Kemampuan mendeteksi FKK, PH, dan AF di lingkungan RT/ RW.
- c. Kemampuan menyelesaikan perkara kasus-kasus tindak pidana ringan dan sangat ringan.
- d. Kemampuan melayani masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya yang berkaitan dengan aspek Kamtibmas.

## 2.3 Tugas Pokok Polisi RW

- a. Tugas pokok Polisi RW adalah menjalin kemitraan dengan komunitas masyarakat yang ada di lingkungan RW setempat, sehingga terwujud 7 (tujuh) dimensi pelayanan masyarakat yang mencakup komunikasi yang berbasis kepedulian, tanggap, cepat dan tepat kemudahan pemberian informasi, prosedur yang efisien dan efektif, biaya yang formal dan wajar, serta kemudahan menyelesaikan permasalahan di Polsek Kebayoran Lama, sehingga dapat tercipta kondisi yang menguntungkan bagi upaya penertiban dan penegakan hukum, upaya perlindungan, dan pelayanan masyarakat setempat.
- b. Membina kesadaran hukum masyarakat tentang :
  - Kedudukan, tugas, wewenang, fungsi, dan peranan Polri.
  - Sanksi-sanksi pidana dan proses pemidanaan.
  - Hak dan kewajiban warga masyarakat dalam menegakan hukum.

- c. Membina kesadaran keamanan dan ketertiban masyarakat tentang :
  - Masalah Kamtibmas
  - Sebab-sebab timbulnya gangguan Kamtibmas
  - Cara-cara penanggulangannya
  - Cara-cara penyelenggaraan siskamling pemukiman
- d. Membina partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara swakarsa di lingkungan RW.
- e. Sebagai polisi di tengah-tengah masyarakat, Polisi RW juga melakukan tugas-tugas kepolisian umum dalam hal-hal tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yaitu :
  - i. Mengumpulkan bahan keterangan
  - ii. Mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat
  - iii. Menerima laporan dan pengaduan masyarakat
  - iv. Memberi bantuan pengawalan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat
  - v. Membina tertib lalu lintas
  - vi. Penanganan tingkat pertama kejahatan pelanggaran atau kecelakaan di tempat kejadian perkara (TKP)
  - vii. Melaksanakan tugas-tugas di bidang pembangunan dan kegiatan masyarakat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dan masyarakat setempat.

#### 2.4 Peranan, fungsi, dan kegiatan

##### a. Peranan

Sesuai dengan lingkup tugasnya di atas, Polisi RW berperan sebagai :

- i. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, kesadaran tentang kamtibmas dan partisipasi masyarakat dalam pembinaan Kamtibmas di lingkungan RW.
- ii. Sebagai pelindung dan pelayanan masyarakat bagi terwujudnya rasa tenang di masyarakat di lingkungan RW.

##### b. Fungsi

Polisi RW dalam melaksanakan perannya tersebut di atas berfungsi sebagai :

- i. Juru penerang dan penyuluh di bidang hukum dan kamtibmas
- ii. Pelayanan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan kamtibmas dalam masyarakat
- iii. Perlindungan masyarakat dari ancaman/ gangguan kamtibmas terhadap kepentingan-kepentingannya
- iv. Penertiban hukum dan norma-norma masyarakat yang berkaitan dengan aspek kamtibmas

c. Kegiatan-kegiatan

Berdasarkan fungsi-fungsinya tersebut di atas, Polisi RW melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- i. Kegiatan-kegiatan penerangan dan penyuluhan meliputi :
  - a) Ceramah pada kelompok sosial atau kelompok-kelompok masyarakat
  - b) Tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dengan eks narapidana, warga masyarakat penyandang masalah sosial, dengan guru dan siswa, pegawai negeri, pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan kepentingan (*community of interest*) kelompok berdasarkan etnis/ suku, agama, profesi, pekerjaan, keahlian, hobby, dan lain-lain dan diharapkan dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.
  - c) Melakukan sambang atau kunjungan RW, tokoh-tokoh masyarakat, pusat-pusat keramaian, proyek-proyek pembangunan, pada peristiwa kemasyarakatan, pada hajatan masyarakat dan warga masyarakat yang tertimpa musibah serta pada lokasi terjadinya peristiwa gangguan kamtibmas.
- ii. Kegiatan pelayanan dan bantuan masyarakat :

- a) Memberikan atau melakukan konsultasi-konsultasi, pengarahan-pengarahan dan saran-saran penyelesaian masalah-masalah sosial dan keamanan kepada warga masyarakat.
  - b) Membantu pelapor atau pengadu dalam kasus-kasus pidana
  - c) Menerima informasi, laporan dan atau pengaduan masyarakat tersebut yang berkaitan dengan masalah-masalah kamtibmas
- iii. Kegiatan umum Kepolisian lain dalam rangka pelayanan dan perlindungan masyarakat seperti :
- a) Tindakan pertama pada kasus tertangkap tangan
  - b) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara
  - c) Menegur dan atau memberhentikan orang yang dicurigai
  - d) Membantu mencari tersangka, saksi dan barang bukti suatu perkara kriminal.

## 2.5 Petunjuk Pelaksanaan Tugas/ Kegiatan

- a. Apabila dari tempat kedudukannya di Mapolsek lebih mudah menjangkau wilayah RW dalam 1 (satu) hari Polisi RW melakukan sambang dekat ke wilayah-wilayah RW atau kepada kelompok-kelompok masyarakat atau kepada warga masyarakat tertentu sesuai program kegiatan dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Kapolsek/ Wakapolsek dan Ka Unit Bimmas, sambang dekat dilakukan tiga sampai empat hari dalam satu minggu dan waktu dua hari digunakan untuk membuat laporan, menyusun jadwal kegiatan baru dan mendapatkan arahan dari Kapolsek/ Wakapolsek dan Ka Unit Bimmas.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan Polisi RW diberikan petunjuk pelaksanaan tugas di lapangan yang meliputi :
  - i. Pendataan keadaan geografi dan demografi di lingkungan RW setempat.
  - ii. Pendataan potensi di lingkungan RW yang meliputi potensi demografi sosial dan sumber daya alam.

- iii. Pendataan tentang FKK, PH dan AF.
- iv. Petunjuk tentang siapa-siapa yang harus dihubungi dan cara-cara menghubunginya.
- v. Petunjuk cara-cara membuat laporan.
- vi. Membuat rencana atau jadwal kegiatan selama satu minggu (contoh : jadwal temu warga, olah raga bersama, mengunjungi Masjid/ Gereja, penyuluhan, dan lain-lain).

## 2.6 Hubungan Tata Cara Kerja

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas rutin, Polisi RW selalu mengadakan hubungan baik secara vertikal maupun secara horisontal, disamping itu mengadakan hubungan dengan Bintara Jaga Polsek, pos-pos Polisi dan kring-kring Reserse, dan kring-kring Intel.

### a. Hubungan vertikal

- i. Keatas dengan Kapolsek/ Wakapolsek dan Ka Unit Polsek
  - Wajib melaporkan situasi kamtibmas secara rutin/ periodik
  - Menerima petunjuk-petunjuk, perintah dan konsignes dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas rutin.
- ii. Ke bawah dengan tokoh-tokoh masyarakat :
  - Mengumpulkan pendapat masyarakat tentang perkembangan situasi kamtibmas.
  - Memberi petunjuk tentang penertiban organisasi dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kamtibmas.
  - Memberikan bantuan pelayanan.
  - Membantu memecahkan masalah-masalah sosial dan keamanan yang dihadapi.

### b. Hubungan horisontal

- i. Dengan Ketua RW
  - Dalam pengumpulan data wilayah.
  - Dalam kegiatan-kegiatan pembangunan lingkungan.

- Dalam rangka pengerahan warga masyarakat untuk tugas-tugas pembinaan kamtibmas seperti kegiatan siskamling pemukiman.
  - Dalam penanganan masalah-masalah sosial yang memerlukan dukungan Polri.
- ii. Dengan Babinsa (binter)
- Dalam rangka kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).
  - Dalam rangka pemantapan pengamanan lingkungan pemukiman atau tempat-tempat tertentu.
  - Dalam rangka kegiatan-kegiatan sosial.
- iii. Dengan pos-pos Polisi, dalam rangka tukar menukar informasi membantu pelayanan masyarakat.
- iv. Dengan kring-kring Reserse, dalam rangka tukar menukar informasi dan melakukan pembinaan khusus kepada oknum-oknum masyarakat yang dinilai oleh unit Reserse sebagai penyandang masalah sosial, khususnya tabiat/ prilaku kriminal.
- v. Dengan kring-kring Intel, dalam rangka mendeteksi dan tukar menukar informasi baik masalah sosial, kejahatan, dan terorisme.
- vi. Dengan Bintara jaga Polsek :
- Untuk penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan harian Polisi RW.
  - Merekam situasi yang dilaporkan masyarakat atau oleh anggota polsek lainnya untuk segera dilakukan kegiatan melalui proses kegiatan yang berlaku.

### **3. Sistem Pelaporan**

Laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan :

- a. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kapolsek/ Wakapolsek/ Ka Unit Bimmas setiap hari, laporan cukup dengan menunjukkan buku tugas dan buku kunjungan.

- b. Melaporkan hal-hal khusus yang perlu mendapatkan perhatian tentang sesuatu yang dilihat dan didengar yaitu, kasus-kasus pidana, bencana alam, suara-suara sumbang dan suara-suara positif, selebaran gelap, desas-desus, orang hilang dan sebagainya.
- c. Membuat laporan mingguan, yang merupakan kegiatan harian ditambah masalah-masalah yang perlu diketahui oleh Kapolsek/ Wakapolsek/ Ka Unit Bimmas pada tiap-tiap hari Senin pagi.

#### **4. Pengawasan dan Pengendalian**

Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud adalah :

- a. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bawah supervisi Kapolsek/ Wakapolsek/ Ka Unit Bimmas.
- b. Apabila terdapat informasi atau isu-isu negatif tentang penugasan dan tentang Bintara (Polisi RW) yang dimaksud, Kapolsek segera melakukan pengecekan atas informasi atau isu tersebut, apabila mengandung kebenaran maka segera dilakukan upaya pengendalian atas penugasan Bintara (Polisi RW) yang dimaksud dan apabila tidak mengandung kebenaran segera dilakukan upaya peredaman informasi atau isu yang negatif itu.
- c. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan dengan :
  - Pemeriksaan buku tugas
  - Penugasan laporan rutin dan laporan khusus serta penelitian atas laporan tersebut.
  - Wawancara
  - Pemanggilan tiba-tiba.
  - Pengecekan langsung di lapangan
  - Rapat-rapat staf
  - Pertemuan antara Muspika dengan Ketua RW

#### **5. Penutup**

Demikian Buku Petunjuk Pelaksanaan Tugas Polisi RW ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Polisi RW

dalam upaya untuk lebih memantapkan kedudukan Polisi RW di tengah-tengah masyarakat, Buku Petunjuk Pelaksanaan Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : I Wayan Gede Ardana, Sik  
**Tempat Tgl Lahir** : Karangasem , 12 Juli 1974  
**Agama** : Hindu  
**Pekerjaan** : Anggota Polri  
**Pangkat** : Komisaris Polisi  
**Nama Istri** : Yunita Aristina, Sh.Mkn  
**Nama Anak** : 1. Putu Angelica Eldora Yuardana  
2. Made Neisya Gayatri Maharani Yuardana

### RIWAYAT PENDIDIKAN :

<b>Umum :</b>	<b>Kepolisian :</b>
SD Lulus Tahun 1987	AKPOL Lulus Tahun 1997
SMP Lulus Tahun 1990	PTIK Lulus Tahun 2006
SMA Lulus Tahun 1993	S2-KIK-UI Lulus Tahun 2011

### JABATAN YANG PERNAH DIEMBAN :

Pamapta Polres Kulon Progo Yogyakarta	1998
Kaur Bin Ops Lantas Polres Kulon Progo Yogyakarta	1999
Kaur Bin Ops Lantas Poltabes Yogyakarta	2000
Kapolsek Sedayu Polres Bantul Yogyakarta	2001
Kasubsi STNK Ditlantas Polda DIY	2002
Kapolsek Gondo Kusuman Poltabes Yogyakarta	2003
Ka Induk PJR Ditlantas Polda DIY	2004
Kasat Lantas Polres Kulon Progo Yogyakarta	2005
Wakasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat	2006
Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur	2008
Kapolsek Metro Setia Budi Jakarta Selatan	2010
Kapolsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan	2011